

Drs. Kusnadi, M.A.

PENGANTAR ETNOGRAFI KOMUNIKASI

*Menyingkap Makna Dibalik Perilaku
Komunikatif Manusia*



bekerjasama dengan



PENGANTAR ETNOGRAFI KOMUNIKASI
Menyingkap Makna Dibalik Perilaku
Komunikatif Manusia

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

PENGANTAR ETNOGRAFI KOMUNIKASI

Menyingkap Makna Dibalik Perilaku Komunikatif Manusia

Drs. Kusnadi, M.A.



Bekerjasama dengan



PENGANTAR ETNOGRAFI KOMUNIKASI
Menyingkap Makna Dibalik Perilaku Komunikatif Manusia

Penulis : **Drs. Kurnadi, M.A.**

Sampul & Layout : **OmahDesain**

Cetakan I : Februari 2019

Kode Produksi : **LBP: 02.19.00226**
xii+182 hlm. 16x23 cm

Penerbit : **LaksBang PRESSindo, Yogyakarta**
(Member of LaksBang Group)
<http://laksbangpressindo.com>
E-mail: laksbangyk@yahoo.com

bekerjasama dengan
Jurusan Sastra Indonesia FIB-UNEJ.

Anggota IKAPI

ISBN: 978-602-5452-48-2

Hak cipta © dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

Buku ini ditulis dan dipersembahkan untuk keluargaku, guru-guru sekolahku mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang telah mengajarku tentang ilmu pengetahuan, etika budaya, dan peradaban manusia; guru-guru agamaku yang menanamkan nilai-nilai ketauhidan, kejujuran, dan kesalehan sosial; tetanggaku yang mengajarku tentang makna hidup berbagi dan tepo seliro antarsesama; dan para kolegaku yang berbudi pekerti baik sebagai kawan seiring berdiskusi untuk mempertajam kapasitas nalar-akademisku selama ini. Semoga amal-ibadah beliau semua diterima oleh Allah Swt. Aamiin ya.

KATA PENGANTAR

Memahami peristiwa komunikasi atau interaksi komunikatif dalam suatu kelompok masyarakat dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Buku ini memahami interaksi komunikatif dari sudut pandang etnografi komunikasi yang menempatkan peristiwa komunikatif tersebut sebagai praktek budaya masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan kondisi struktural dan kultural (identitas etnik) suatu masyarakat tentu saja memiliki pola-pola, proses, dan pemaknaan yang berbeda pula. Karena masyarakat kita memiliki keragaman budaya dan aktivitas kehidupan yang kompleks, pola-pola interaksi komunikatif yang terjadi juga sangat beragam. Kekayaan pola-pola komunikasi ini merupakan modal sosial yang dapat dijadikan bahan perumusan rekayasa pola-pola komunikasi sosial yang berkemajuan, kreatif, inovatif, produktif, dan efektif untuk berbagai kepentingan pembangunan bangsa.

Karena nilai strategis fungsi kemasyarakatan dari pola-pola komunikasi di berbagai bidang kehidupan manusia, mata kuliah etnografi komunikasi harus diajarkan di perguruan tinggi. Sepulang menyelesaikan pendidikan S-2 Antropologi di UI pada tahun 1998, penulis mengajukan usulan agar mata kuliah etnografi komunikasi diajarkan kepada Ketua Jurusan Sastra Indonesia,

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Usulan tersebut diterima dan mata kuliah etnografi komunikasi dimasukkan kurikulum jurusan sebagai mata kuliah pilihan bebas dan baru pada tahun 2012, mata kuliah etnografi komunikasi ditetapkan sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa S-1 Jurusan Sastra Indonesia. Selain diajarkan di Program S-1, juga menjadi mata kuliah wajib di Program Megister Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember sejak tahun 2013. Penetapan mata kuliah etnografi komunikasi telah memperkaya kajian bahasa antarbidang (*linguistik interdisipliner*), di samping mata kuliah sosiolinguistik atau sosiologi bahasa, pragmatik, dan analisis wacana kritis. Kajian-kajian itu sangat relevan untuk memahami bahasa dalam konteks kehidupan sosial masyarakat pemilikinya (*language for social life*). Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Riga Adiwoso Suprpto, M.A. yang mengampu mata kuliah etnografi komunikasi ketika penulis menempuh pendidikan magister antropologi.

Semula naskah buku referensi ini merupakan diktat buku ajar yang ditulis penulis pada tahun 2004 dan 2013 untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah etnografi komunikasi, mengingat publikasi buku tentang etnografi komunikasi sangat sedikit dan sulit diperoleh. Perubahan diktat buku ajar menjadi buku referensi ini (2017) merupakan upaya penulis untuk meningkatkan materi buku secara berkualitas dan menyebarkannya secara luas sehingga memberikan pengetahuan yang memadai bagi mahasiswa yang menempuh perkuliahan etnografi komunikasi, seperti di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Program Magister Linguistik, serta Prodi Antropologi, Sosiologi, Sastra Indonesia, dan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di FKIP.

Publikasi buku ini didasari oleh pemikiran agar buku ini menjangkau kebutuhan mahasiswa lain yang sedang mempelajari etnografi komunikasi, seperti mahasiswa jurusan atau prodi ilmu komunikasi, pendidikan bahasa Indonesia, sosiologi, antropologi, hubungan masyarakat, serta para praktisi komunikasi. Publikasi buku pada tahun ini berkat dukungan anggaran dari Jurusan Sastra Indonesia FIB yang bekerja sama dengan Penerbit Laksbang PRESSindo, Yogyakarta. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan jurusan dan penerbit yang telah bekerja maksimal sehingga buku ini sampai ke tangan pembaca. Penulis berharap mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat akademis bagi pengembangan disiplin etnografi komunikasi. Kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca budiman sangat diharapkan oleh penulis sebagai masukan untuk penerbitan ulang buku ini di masa mendatang.

Jember, Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kajian Bahasa Antarbidang.....	6
1.3 Kontribusi bagi Ilmu Lain	16
BAB II DARI ETNOGRAFI KE ETNOGRAFI	
 KOMUNIKASI	23
2.1 Pengertian Etnografi	23
2.2 Ruang Lingkup Etnografi	26
2.3 Etnografi Komunikasi	32
BAB III DIMENSI-DIMENSI SOSIAL BAHASA.....	43
3.1 Fungsi Konstruktif-Destruktif Bahasa.....	43
3.2 Bahasa: Identitas Komunitas.....	49
3.3 Variasi Bahasa	58
3.4 Struktur Sosial dan Pilihan Bahasa	63

PENGANTAR ETNOGRAFI KOMUNIKASI

BAB IV	RUANG SOSIAL KOMUNIKASI	69
	4.1 Pranata: Ruang Interaksi Sosial	69
	4.2 Kesantunan Berbahasa.....	75
	4.3 Komponen-komponen Komunikasi.....	84
	4.4 Dampak Komunikasi Mikro	90
BAB V	PRAKTEK KOMUNIKASI SEHARI-HARI SEBAGAI REALITAS SOSIAL	97
	5.1 Gejala “Gunung Es Komunikasi”	97
	5.3.1 Situasi Komunikatif.....	113
	5.3.2 Peristiwa Komunikatif	114
	5.3.3 Tindak Komunikatif.....	114
	5.2 Kompetensi Komunikatif	106
	5.3 Struktur Praktek Komunikasi	112
	5.4 Komunikasi sebagai Realitas Sosial.....	119
BAB VI	SUDUT PANDANG MEMAHAMI KAJIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI	125
	6.1 Komunitas T tutur: Subjek Kajian	125
	6.2 <i>Bounded Communicative Event</i>	131
	6.3 Pendekatan Emik dan Etik.....	136
	6.4 Pola-pola Komunikasi sebagai Praktek Budaya..	141
BAB VII	STRATEGI MENEMUKAN TOPIK PENELITIAN. .	149
	7.1 Penentuan Topik Penelitian	149
	7.2 Informan Penelitian	155
	7.3 Perihal Data.....	161
	7.4 Konsep dan Teori	168
	DAFTAR PUSTAKA	177

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi etnografi komunikasi (etkom) bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola komunikasi dan pemaknaannya, memahami proses-proses interaksi sosial, serta menemukan nilai-nilai budaya atau norma-norma sosial yang mendasari interaksi komunikatif tersebut. Landasan nilai-nilai dan norma budaya ini merupakan referensi dari kelompok masyarakat atau komunitas, tempat pelaku interaksi sosial berada. Pencapaian tujuan pemahaman tersebut dapat digunakan untuk mendorong dinamika kehidupan masyarakat. Banyak hal yang dapat dipelajari dari makna pola-pola komunikasi sebagai modal sosial yang sangat berharga bagi kehidupan suatu masyarakat.

Pola-pola komunikasi atau pola-pola interaksi komunikatif merupakan formulasi dari praktek tindakan sosial berulang dan stabil dalam jangka waktu lama yang di dalamnya terdiri atas

komponen-komponen: ujaran kebahasaan (*verbal*) dan bahasa tubuh (*body language/nonverbal*), unsur suprasegmental, tatanan (struktur) materi pesan, arah dan intensitas interaksi (aliran pesan) di antara partisipan, latar sosial-budaya pelibat interaksi, serta karakteristik pranata sosial sebagai ruang interaksi antar-subjek. Relasi sinergi-dialektika di antara komponen tersebut menimbulkan proses-proses komunikasi yang didasari oleh sistem nilai budaya yang berlaku. Pola-pola komunikasi dan proses-proses sosial yang berlangsung merupakan petunjuk untuk memahami makna budaya dibalik perilaku interaksi komunikatif tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, kegiatan komunikasi dan interaksi sosial dapat ditemukan di berbagai kesempatan. Kegiatan demikian bisa berlangsung di dalam keluarga, kantor, tempat kerja, berbagai pertemuan dalam kegiatan masyarakat, sekolah, pasar, toko, rumah sakit, dan sebagainya. Berbagai ruang interaksi sosial memiliki pola-pola komunikasi yang berbeda-beda. Perbedaan pola terjadi karena situasi sosial (pelaku, aktivitas, dan tempat) dan nilai-nilai budaya atau norma-norma sosial yang melatarbelakangi interaksi juga berbeda-beda. Tugas studi etnografi komunikasi adalah mengeksplorasi atau menggali pola-pola interaksi komunikatif dan makna-makna budaya yang mendasarinya karena merupakan kekayaan kearifan lokal (*local wisdom* atau *local genius*) yang luar biasa dan tersebar di berbagai ranah interaksi sosial, serta selalu ditemukan dalam berbagai kebudayaan suku bangsa.

Interaksi sosial dan komunikasi antarpelaku dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran sekolah dan di pasar tradisional mempunyai pola-pola komunikasi yang berbeda. Di ruang sekolah, hubungan sosial antara guru dan murid akan lebih dominan diwarnai peran guru. Walaupun ada kesempatan untuk berdialog

atau tanya-jawab dengan guru, hal ini tidak mengurangi peran dominan tersebut. Tipe interaksi sosial yang ada adalah tipe komunikasi searah, yang menempatkan guru dalam posisi superaktif, sedangkan murid bersifat pasif. Sebaliknya juga, komunikasi antara pedagang dan pembeli di pasar-pasar tradisional dapat berlangsung aktif atau interaktif di antara kedua belah pihak. Pola interaktif ini untuk mencapai kesepakatan bersama tentang nilai harga barang yang ditawarkan. Posisi kedua belah pihak setara, tetapi saling bertentangan sehingga hal ini menjadi dasar berlangsungnya komunikasi timbal-balik yang dinamis. Pola-pola komunikasi dan norma-norma interaksi tersebut relatif terbuka, dua arah, dan interaktif.

Pola-pola komunikasi sosial yang interaktif, terbuka, dan bisa memberikan keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat akan cenderung berkontribusi terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, ada dua orang dokter praktek yang sama-sama memiliki keahlian spesialis jantung dan pembuluh darah, tetapi dokter Brodin lebih banyak dikunjungi pasiennya daripada dokter Husin. Mengapa bisa terjadi demikian? Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda karena bergantung pada perspektif akademis yang digunakannya. Bagi seorang ahli ekonomi bidang pemasaran, ia akan mengatakan bahwa keberhasilan dokter Brodin tersebut karena ia piawai memikat kepercayaan calon pasien melalui berbagai cara berpromosi sehingga pasar (pasien) menjadi takluk. Bagi ahli agama, keberhasilan dokter Brodin dipandang sebagai akibat dari kebiasaan dokter Brodin memberi sodaqoh kepada fakir-miskin dan anak-anak yatim-piatu, sehingga Tuhan YME melapangkan jalan rezekinya. Bagi ahli etnografi komunikasi, dokter Brodin lebih disukai oleh pasiennya karena ia mengembangkan pola-pola komunikasi

yang dialogis, terbuka, santun, dan responsif terhadap persoalan kesehatan yang dihadapi oleh pasiennya. Sudut pandang yang berbeda terhadap suatu kasus yang sama, sehingga menghasilkan tiga pendapat yang berbeda pula.

Sikap simpati dan empati dari dokter Brodin yang kemudian membangun citra positif pada pasien bahwa dokter Brodin tersebut dianggap sebagai “orang baik”, peduli, dan komunikatif, sehingga menjadikan banyak pasien berobat kepada dokter Brodin. Secara umum, dokter Brodin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan menerapkan kompetensi komunikatif (*communicative competence*) yang baik dalam berinteraksi dengan pasiennya. Hal yang sebaliknya menimpa pada dokter Husin, yang dipandang oleh pasiennya sebagai dokter yang kurang empati, pendiam, cenderung menakut-nakuti pasien, dan mendominasi dialog dengan pasien, sehingga ia kurang disukai oleh para pasiennya. Melalui interaksi dengan orang lain, pengalaman pasien ketika berobat ke dokter Husin disebarluaskan secara luas sehingga menjadi opini publik yang kemudian berwujud sikap sosial kurang simpati kepada dokter Husin. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak mau berobat ke dokter Husin, sehingga tempat praktek dokter Husin selalu sepi pengunjung.

Dalam kasus dokter Brodin, baik dokter, maupun pasien sama-sama memperoleh keuntungan. Dokter merasa puas karena misinya untuk menyembuhkan bisa tercapai dengan lancar. Bagi pasien, sikap dokter yang simpati dan apresiatif terhadap penyakit pasien membantu rasa percaya diri (*sugesti*) pada mereka sehingga menjadi modal untuk penyembuhan penyakitnya. Penggabungan antara modal psikologis dan ketepatan diagnosa penyakit pasien memberikan kontribusi yang besar untuk penyembuhan pasien. Pola-pola komunikasi manakah yang dapat menunjang kehidupan

manusia, mengoptimalkan kinerja, dan meningkatkan dinamika kehidupan masyarakat sangat bergantung pada tujuan yang akan dicapai, ruang interaksi, dan karakteristik interaksi. Pola-pola komunikasi yang dikembangkan oleh dokter Brodin seperti di atas, belum tentu cocok dan berhasil guna jika diterapkan dalam interaksi sosial yang berdimensi nonmedis.

Kasus dokter Brodin dan dokter Husin di atas memberikan pelajaran pada kita bahwa pola-pola interaksi sosial dan komunikasi yang tidak sejalan dengan pemenuhan kebutuhan interaksi akan mengakibatkan masalah sosial di antara peserta interaksi. Jika di suatu kampung berdasarkan data-data statistik yang ada terdapat kasus perceraian yang tinggi dan peningkatan angka jumlah generasi muda yang terlibat kasus narkoba, hal ini dari sudut pandang etnografi komunikasi dapat dianalisis sebagai akibat dari tidak adanya konstruksi pola-pola komunikasi sosial yang baik antara suami dan isteri dan antara orangtua dan anak (generasi muda) sebagai jembatan untuk saling memahami kepentingan masing-masing dan bertukar pengetahuan bersama. Demikian juga, apabila siswa suatu SMA di kelas A prestasinya sangat baik dan sebagian besar siswa di kelas B prestasinya di bawah nilai rata-rata kelas, berarti pola-pola komunikasi dan interaksi sosial yang dibangun antara guru dan murid di kelas A sangat baik dan di kelas B bersifat kurang baik. Kajian etnografi komunikasi dapat menunjukkan aspek positif-negatif dari suatu pola-pola komunikasi yang terbentuk dalam aktivitas pendidikan dan menawarkan pola-pola komunikasi yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dengan memperhatikan contoh-contoh tersebut, masih banyak masalah sosial yang bisa dikaji dan dijelaskan dari perspektif etnografi komunikasi, sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya.

Demikianlah, setiap ruang interaksi sosial memiliki pola-pola komunikasi yang berbeda-beda. Interaksi sosial dalam bentuk komunikasi di pasar tradisional, minimarket, rapat dinas, seminar ilmiah, rembug kampung, konsultasi akademis, melamar calon menantu, dan bertamu senantiasa menghadirkan karakteristik pola-pola komunikasi yang beragam. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kemampuan dan akses memasuki bermacam-macam interaksi sosial. Secara sosiologis interaksi sosial merupakan struktur dasar yang membentuk masyarakat. Interaksi sosial memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan eksistensi suatu komunitas atau masyarakat. Oleh sebab itu, kajian etnografi komunikasi, khususnya pada masyarakat etnik yang beragam pranata dan budayanya, merupakan suatu hal yang sangat penting dikembangkan pada masa-masa mendatang.

1.2 Kajian Bahasa Antarbidang

Beberapa ahli linguistik memandang dan melakukan pendekatan kajian terhadap bahasa sebagai objek studi dengan cara yang berbeda-beda. Dengan mengutip pendapat Jack C. Richards dan Theodore S. Rodgers dalam bukunya *Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis* (1986), Purwoko (2014:9-11) meringkaskan bahwa pada umumnya terdapat tiga macam perspektif teoritis (*theoretical views*) terhadap bahasa sebagai objek studi ilmiah. Pertama, *the structural view*. Para ahli dari kelompok ini memandang bahasa sebagai suatu sistem dari berbagai elemen yang secara struktural berkaitan satu sama lain, sehingga merupakan rangkaian lambang yang bermakna, seperti ditunjukkan dalam kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kedua, *the functional view*. Kelompok ini memandang bahasa sebagai sebuah wahana untuk menampung ekspresi yang

bermakna fungsional atau merefleksikan makna komunikasi dan identitas sosial penuturnya, seperti diwakili dalam kajian sosiolinguistik. Ketiga, *the interactional view*. Kelompok ini memandang bahasa sebagai sebuah wahana untuk menampung realisasi dari hubungan antarindividu dan performansi dari interaksi sosial antarindividu, seperti terwakili dalam kajian etnografi komunikasi, teori tindak tutur, analisis wacana, analisis percakapan, dan pragmatik.

Kridalaksana (1983:xxviii-xxix), melakukan pembidangan kajian linguistik ke dalam: (a) mikrolinguistik, (b) makrolinguistik, dan (c) sejarah linguistik. Kajian mikrolinguistik mencakup: teori linguistik, linguistik deskriptif, dan linguistik historis-komparatif. Kajian makrolinguistik terbagi lagi ke dalam bidang interdisipliner dan terapan. Bidang interdisipliner meliputi kajian: fonetik, stilistika, filsafat bahasa, psikolinguistik, sosiolinguistik, etnolinguistik, filologi, semiotika, epigrafi, dan paleografi. Bidang terapan mencakup kajian: pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi, fonetik terapan, sosiolinguistik terapan, pembinaan bahasa asing, pembinaan bahasa khusus, linguistik medis, grafologi, dan mekano-linguistik. Pembidangan demikian tidak didasari oleh pemikiran filosofis yang jelas.

Pendapat lain disampaikan oleh pakar pragmatik Geoffrey Leech (1993:69-70). Menurutnya, dua pendekatan dalam studi linguistik, yaitu *formalisme* dan *fungsionalisme*. Pendekatan formalisme memandang bahasa sebagai fenomena mental (*langue*), warisan genetik, sistem yang otonom, dan perolehan bahasa pada anak-anak berdasarkan “kemampuan alamiah belajar bahasa”. Pendekatan fungsionalisme menempatkan eksistensi bahasa sebagai fenomena sosial, diperoleh melalui proses sosial, bagian dari sosial-budaya masyarakat, dan perolehan bahasa pada anak-

anak berdasarkan perkembangan kebutuhan dan kemampuan komunikatif anak dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua pendekatan dianggap saling melengkapi sehingga studi linguistik harus mencakup kedua pendekatan tersebut. Prinsip ini diterapkan oleh Leech pada studi pragmatik dan pragmatik dipandang sebagai bagian dari perluasan studi linguistik. Pendekatan formalisme untuk memahami struktur internal/kaidah bahasa (*langue*) dalam studi linguistik struktural, seperti kajian sintaksis dan morfologi, sedangkan pendekatan fungsional untuk memahami penggunaan bahasa dan norma-norma sosial yang mendasarinya (*parole*).

Secara filosofis dan metodologis, kedua pendekatan di atas tidak mudah diintegrasikan dan diterapkan pada suatu kajian bahasa. Karena itu, seorang peneliti bahasa harus mengetahui tentang hal-hal apakah dari kedua pendekatan tersebut dapat dipertemukan. Misalnya, kita mau meneliti interaksi komunikatif jual-beli di pasar tradisional dari pendekatan etnografi komunikasi. Pelibatan pendekatan formalisme dalam riset ini hanya sebatas memahami bahwa struktur kalimat dan proses pembentukan teks interaksi komunikatif itu sesuai dengan kaidah ragam bahasa percakapan. Meski demikian, pemahaman struktur ini tidak diikuti dengan analisis struktural setiap kalimat yang membentuk teks tersebut. Dalam kajian ini, penekanannya lebih ke “makna teks” dengan mencari korelasi antara motif subjektif tindak kebahasaan dengan teks dan konteksnya. Dalam hal ini, kita tidak meneliti struktur kalimat teks (*langue*), tetapi meneliti makna penggunaan bahasa. Pemaknaan struktur adalah bagian kecil dari pemahaman makna teks secara luas.

Dengan mengacu pada ketiga pendapat di atas dan meskipun sama-sama menjadikan entitas bahasa sebagai objek kajian, studi etnografi komunikasi sangat berbeda dari linguistik. Per-

beda terjadi karena pendekatan yang dipakai oleh kedua disiplin tersebut dalam memahami bahasa tidak sama. Oleh sebab itu, pendapat Jack C. Richards dan Theodore S. Rodgers (1986) lebih relevan dalam konteks kajian etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi bukan merupakan kepanjangan tangan atau bagian dari linguistik. Baik etnografi komunikasi, maupun linguistik merupakan disiplin yang berbeda dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Keduanya memiliki “otonomi kajian akademik” yang mandiri dan setara. Etnografi komunikasi tidak dapat diposisikan sebagai bagian (bawahan atau klien) dari studi makrolinguistik atau interdisipliner linguistik sebagaimana pembagian Kridalaksana (1983:xxviii-xxix) di atas. Dengan perspektif demikian, etnografi komunikasi cukup hanya disebut sebagai “suatu kajian bahasa interdisipliner” atau “kajian bahasa antarbidang”.

Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bahasa dari sudut pandang struktur internalnya. Pendekatan demikian disebut sebagai pendekatan struktural (sistemik) terhadap bahasa. Bahasa diperlakukan sebagai “entitas otonom” yang terpisah dari subjektivitas manusia dan konteks sosial budaya, tempat hidup dan tumbuh dari bahasa tersebut. Bahasa tersusun oleh bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dan bagian-bagian tersebut terikat oleh hubungan fungsional sebagai suatu sistem yang otonom. Sebagai disiplin, linguistik terdiri atas empat subdisiplin yang saling berkaitan, yaitu: fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.

Penempatan bahasa secara terpisah dari subjektivitas manusia dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan merupakan cara pandang positivisme agar kajian linguistik bersifat objektif, empiris, logis, dan rasional. Bahasa dilihat sebagai fakta sosial agar

kajian terhadap bahasa lebih objektif dan rasional. Pandangan akademis ini diletakkan oleh bapak linguistik modern, Ferdinand de Saussure, sangat dipengaruhi oleh pemikiran sosiolog Emile Durkheim sebagai penganut paradigma positivisme (fakta sosial), yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh August Comte dalam disiplin sosiologi (Kridalaksana, 2005:15-16). Atas dasar aliran filsafat positivisme itu, Saussure membagi bahasa menjadi tiga matra, yaitu *langage*, *langue*, dan *parole*. Pembagian demikian sebagai pembenar terhadap analisis bahasa yang berfokus pada struktur internal atau aspek struktural dari wujud bahasa, yang berupa *langue*. Seandainya Saussure adalah seorang ahli sosiolinguistik yang berkiblat pada aliran filsafat fenomenologis, tentu akan berbeda pula cara Saussure dalam membagi dan memahami matra-matra bahasa.

Hasil akhir dari kajian linguistik adalah dirumuskannya kaidah-kaidah kebahasaan (*rules*), baik pada tataran kata (morfologi) atau frase, klausa, maupun kalimat (sintaksis). Kaidah-kaidah di bidang pembentukan kata dan frase, klausa-kalimat sering disebut sebagai “tatabahasa” (*grammar*). Kaidah-kaidah tersebut menjadi kerangka dasar bagi pembentukan unsur-unsur bahasa. Misalnya, jika seorang mahasiswa meneliti tentang “morfologi kata kerja bahasa Madura”, ia akan menghasilkan atau memperoleh sejumlah kaidah morfologis yang terkait dengan seluk-beluk pembentukan kata kerja dalam bahasa Madura. Kaidah-kaidah tersebut merupakan hasil “konstruksi peneliti” setelah menganalisis data-data tentang proses pembentukan kata kerja bahasa Madura. Penutur bahasa Madura yang diteliti tentu saja tidak tahu-menahu tentang kaidah-kaidah morfologi kata kerja yang dihasilkan oleh peneliti. Konstruksi kaidah kebahasaan adalah “wilayah eksklusif” dari peneliti bahasa

(linguis). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etik. Demikianlah, ciri-ciri pokok kajian linguistik yang dipengaruhi oleh paradigma positivisme.

Berbeda dengan linguistik, etnografi komunikasi memandang bahasa sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat, dengan mengingat bahwa hasil akhir kajian adalah formulasi tema-tema budaya. Peletak dasar studi etnografi komunikasi adalah seorang antropolog yang sekaligus ahli bahasa, Dell Hymes (1962/1964), yang kemudian dikembangkan oleh Muriel Saviile-Troike (1989). Hymes tidak ingin menyederhanakan bahasa “hanya dipahami” dari aspek strukturnya (*langue*) yang bersifat abstrak sebagaimana hasil kerja para ahli bahasa (linguis). Bahasa merupakan realitas yang kompleks, yang tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang. Setelah melakukan kajian bahasa secara struktural dan kaidah-kaidah bahasa itu ditemukan oleh para linguis, tindak lanjut apalagi yang harus dilakukan oleh si linguis tersebut? Apakah kaidah-kaidah bahasa itu “bisa berbicara” tentang sesuatu hal kepada masyarakat? Jika seorang linguis atau peneliti bahasa melakukan kajian tentang struktur sintaksis (seperti kalimat inti atau kalimat majemuk) bahasa Madura dan menghasilkan laporan yang komprehensif, pertanyaan berikut yang diajukan adalah apakah nilai fungsional (aksiologis) dari hasil kajian tersebut bagi penyelesaian masalah kehidupan sosial masyarakat Madura? Manfaat kongkret yang dirasakan oleh masyarakat dari kaidah-kaidah abstrak tersebut mungkin terbatas, yaitu bagaimana kita dapat membuat ujaran kalimat yang benar sehingga tidak mengganggu interaksi komunikatif dengan orang-orang Madura. Keterbatasan aksiologis bagi pemecahan kompleksitas masalah kehidupan manusia telah mendorong munculnya tafsir baru dan studi alternatif terhadap eksistensi bahasa, seperti yang dilakukan

oleh para ahli etnografi komunikasi, pragmatik, sosiolinguistik, atau antropinguistik. Kajian linguistik adalah kajian yang melepaskan bahasa dari konteks sosial-budayanya, tempat bahasa berpijak dan para penuturnya lahir, tumbuh, dan mati.

Bahasa sebagai unsur budaya memiliki fungsi-fungsi yang kompleks bagi aktivitas kemasyarakatan. Dalam perspektif etnografi komunikasi, bahasa yang menjadi salah satu medan kajiannya adalah bahasa yang kita pahami dalam pengertian sehari-hari, bahasa yang sewajarnya yang digunakan oleh manusia normal, dan bukan bahasa artifisial, seperti bahasa isyarat pada anak-anak yang mengalami gangguan mentalitas atau berkebutuhan khusus. Syarat bahasa yang demikian juga diberlakukan pada kajian linguistik struktural. Para ahli etnografi komunikasi berupaya untuk memahami peranan bahasa dalam perilaku komunikatif etnik atau komunitas yang berbeda-beda kebudayaannya. Hasil studi etnografi komunikasi berupa prinsip-prinsip komunikasi sosial dalam suatu pranata atau pola-pola komunikasi beserta makna budayanya. Bahasa diletakkan pada peran maknawi fungsionalnya dalam komunikasi antarmanusia.

Selain pemahaman bahasa secara fungsional dan interaksional, pengetahuan tentang perihal komunikasi dan aspek-aspek sosial-budaya masyarakat sangat diperlukan dalam studi etnografi komunikasi. Oleh sebab itu, kajian etnografi komunikasi semestinya merupakan kajian “bahasa antarbidang” sebagai pengganti dari istilah “linguistik interdisipliner” seperti selama ini dipahami. Kalaupun tetap disebut kajian “linguistik interdisipliner” seperti tertulis dalam literatur kebahasaan, pengertian “linguistik” dalam konstruksi “linguistik interdisipliner” adalah “linguistik interaksional”, bukan “linguistik struktural”. Menurut Sudaryanto (1986:38-39), ilmu-ilmu yang memakai nama “linguistik” cukup

banyak dan tidak menunjuk pada kajian “linguistik”, seperti metalinguistik, paralinguistik, etnolinguistik, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan sejarah linguistik. Pendapat ini benar dan setiap penggunaan kata “linguistik”, baik secara tunggal, maupun dalam konstruksi frase harus dipahami terlebih dulu konteks dan rujukannya, sehingga kita tidak mudah mengartikan “sosiolinguistik” atau “etnografi komunikasi” sebagai bagian dari kajian “linguistik (struktural)”.

Kajian etnografi komunikasi merupakan kajian antarbidang (keilmuan/disiplin) yang menyinergikan tiga unsur keilmuan sebagai suatu kesatuan secara setara, yaitu peran fungsional bahasa, kemampuan dan ketrampilan komunikasi, dan sosial-budaya masyarakat. Dalam “bahasa keilmuannya”, kajian etnografi komunikasi terkonstruksi oleh tiga disiplin keilmuan, yaitu: linguistik/bahasa (interaksional), ilmu komunikasi, dan antropologi (juga sosiologi). Aspek linguistik atau bahasa adalah salah satu bagian pokok dari etnografi komunikasi dan masing-masing unsur tidak mendominasi satu sama lain. Etnografi komunikasi merupakan disiplin yang bersifat kolaboratif. Dengan kata lain, etnografi komunikasi dapat saja disebut sebagai kajian yang bersifat “linguistik interdisipliner” sepanjang pemahaman istilah tersebut mengacu pada rujukan “linguistik interaksional (juga fungsional)”, yakni penggunaan bahasa (*language use*) dalam interaksi sosial di masyarakat, bukan studi bahasa secara struktural. Oleh sebab itu, dalam kajian etnografi tidak dibenarkan analisis aspek struktural bahasa. Kajian etnografi komunikasi dimaksudkan untuk mengungkap makna dibalik sebuah teks interaksi komunikatif secara komprehensif.

Selain pandangan di atas dalam menempatkan posisi kajian etnografi komunikasi, pendapat lain menganggap etno-

grafi komunikasi sebagai bagian dari ilmu komunikasi. Suatu pandangan yang tidak sesuai dengan asal-usul atau sejarah kajian etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi merupakan studi deskriptif yang mendalam terhadap praktek-praktek komunikasi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Penekanannya pada kata “komunikasi” yang dianggap sebagai aspek dominan. Karena pandangan demikian, sebagian ahli bahasa menganggap etnografi komunikasi tidak ada sangkut-pautnya dengan fenomena kebahasaan, khususnya kajian linguistik struktural (Sudaryanto, 1986:38-39). Kalau pandangan demikian diterapkan secara konsisten, seharusnya disiplin lain seperti pragmatik, sosiolinguistik, psikolinguistik, atau antropolinguistik, juga diperlakukan sama, yakni tidak ada kaitannya dengan kajian linguistik struktural. Suatu sikap akademis yang tidak beralasan jika menolak adanya sifat “aspek kebahasaan” dalam kajian etnografi komunikasi dan pada saat yang sama menerima disiplin pragmatik, sosiolinguistik, psikolinguistik, atau antropolinguistik dengan menganggap disiplin-disiplin tersebut berkaitan dengan aspek kebahasaan (linguistik).

Sebenarnya, kajian bahasa antarbidang itu memang “tidak berkaitan langsung dengan analisis linguistik struktural”, tetapi terkait dengan kajian bahasa secara fungsional/interaksional. Karena itu, disiplin-disiplin tersebut tetap harus diajarkan pada jurusan/program studi sastra Indonesia/pendidikan bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi sebagai upaya memperkaya wawasan akademik mahasiswa dalam memahami eksistensi bahasa. Selain itu, kajian bahasa secara fungsional/interaksional memiliki manfaat langsung yang jauh lebih besar bagi kepentingan masyarakat, jika dibandingkan dengan kajian linguistik struktural (*pure linguistic*). Jalan tengah yang perlu dikembangkan adalah

semua pendekatan dalam memahami eksistensi bahasa harus diajarkan agar tidak terjadi “tirani pendapat” dalam menilai pendekatan-pendekatan kajian kebahasaan. Menurut Dell Hymes, “Dan jika linguistik merupakan studi bahasa, *bukan sekedar grammar* saja, maka studi linguistik interdisipliner memperkaya apa yang dimaksud dengan bahasa” (Purwoko, 2014:15).

Dalam perspektif ke depan, apakah etnografi komunikasi akan berkembang dan semakin mantap sebagai disiplin tersendiri, seperti halnya linguistik (struktural)? Hal ini sangat bergantung pada tiga hal, yaitu: *pertama*, perkembangan yang dinamis dalam pengayaan kajian etnografi komunikasi yang dilakukan oleh para ahli; *kedua*, kecepatan dalam penemuan konsep-konsep, teori-teori, dan pemutakhiran metodologi etnografi komunikasi sebagai basis dari kemajuan disiplin; dan *ketiga*, nilai manfaat yang semakin besar dan nyata dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud dari hasil kajian etnografi komunikasi. Apabila ketiga hal itu dapat dicapai dan seiring dengan semakin pentingnya interaksi komunikatif antarmanusia untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial, peluang kemajuan akademik untuk kajian etnografi komunikasi semakin besar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etnografi komunikasi merupakan kajian antarbidang, yang melibatkan integrasi secara sinergis disiplin antropologi dan linguistik (interaksional), yang kemudian diperkuat dengan disiplin ilmu komunikasi, sosiologi, filsafat bahasa, dan sosiolinguistik. Jika kajian linguistik (*pure linguistic*) dimaksudkan untuk memperoleh dan mengidentifikasi kaidah-kaidah kebahasaan yang menjadi temuan studinya, etnografi komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan pola-pola komunikasi serta regulasi-regulasi budaya yang menjadi dasar kegiatan interaksi

sosial dalam suatu pranata masyarakat. Etnografi komunikasi bukan bagian (*onderbow*) atau kepanjangan dari kajian linguistik (struktural) dan ruang/tujuan akhir kajian keilmuannya berbeda dengan pragmatik, sosiolinguistik, atau analisis wacana kritis sebagai kajian bahasa antarbidang (keilmuan).

1.3 Kontribusi bagi Ilmu Lain

Hasil kajian atau penelitian etnografi komunikasi dapat berkontribusi terhadap ilmu-ilmu lain. Kontribusi tersebut untuk meningkatkan manfaat ilmu-ilmu lain (aksiologis) bagi kepentingan masyarakat atau membantu penyelesaian masalah-masalah sosial di ranah ilmu-ilmu lain tersebut. Studi etnografi komunikasi dapat menetapkan suatu objek penelitian yang ranahnya bersentuhan dengan ilmu-ilmu lain. Jika keadaannya demikian, peneliti etnografi komunikasi dituntut untuk memiliki pengetahuan yang terkait dengan ranah ilmu-ilmu lain. Sebagai contoh, jika kita meneliti tentang (objek) interaksi komunikatif antara dokter dan pasien dalam aktivitas pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit, seorang peneliti tidak hanya berbekal pengetahuan disiplin etnografi komunikasi, tetapi ia juga harus memiliki pengetahuan tentang pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan akademis disiplin pelayanan publik dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit kepada pasien, sehingga membantu terhadap proses penyembuhan pasien.

Dalam ilmu ekonomi, khususnya bidang pemasaran, pendekatan etnografi untuk mendalami dan memahami persepsi, kebutuhan, dan aspirasi konsumen terhadap produk dan atau komunikasi iklannya, terus semakin meningkat. Riset etnografis pemasaran ini sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan pada hasil

riset-riset konvensional yang dianggap kurang progresif untuk mengakselerasi kegiatan pemasaran (Maulana, 2009). Misalnya, studi etnografi di bidang pemasaran produk manufaktur dapat membantu pengoptimalan pemasaran produk tersebut kepada konsumen. Dalam kegiatan pemasaran produk, sales memainkan peranan penting sebagai ujung tombak perusahaan dalam berinteraksi secara *door to door* dengan calon konsumen atau pelanggan. Jika dilihat dari sudut pandang etnografi komunikasi pola-pola interaksi komunikatif antara sales dan calon konsumen berlangsung dengan ciri-ciri sebagai berikut: intensif-persuasif, ofensif, komprehensif, berdurasi cepat, dan mendominasi pembicaraan dengan calon konsumen, sehingga membuka ruang terbelinya produk oleh calon konsumen.

Ciri-ciri dari pola-pola komunikasi di atas terbentuk karena kebutuhan (fungsi) pemasaran yang bersifat: cepat dan tepat waktu, meyakinkan calon konsumen untuk membeli barang, dan mempercepat sikap calon konsumen mengambil keputusan untuk membeli barang, sehingga dalam waktu singkat jumlah produk yang terjual cukup banyak. Hasil studi etnografi komunikasi tentang interaksi komunikatif antara sales dan konsumen dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pemasaran, khususnya dalam kaitannya dengan strategi “menaklukkan” konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa studi etnografi komunikasi dapat berkontribusi pada dimensi epistemologis dan aksiologis terhadap pengembangan dan pemanfaatan disiplin pemasaran dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Demikian pula, misalnya kajian etnografi komunikasi terhadap interaksi jual-beli barang konsumsi di pasar tradisional di daerah perkotaan dapat berkontribusi terhadap bidang keilmuan antropologi atau sosiologi. Dalam transaksi ekonomi di

masyarakat perkotaan terdapat tiga jenis interaksi komunikatif, yaitu: (1) tatap-muka dan timbal-balik humanistik, seperti di pasar tradisional atau di toko dan warung; (2) tatap-muka dan timbal-balik mekanis, seperti di pasar swalayan/pasar modern, seperti *super market* atau *mini market*; dan (3) non-tatap muka, tetapi timbal-balik mekanis, seperti di dunia maya. Jenis interaksi komunikatif yang kedua dan ketiga ini merupakan produk kemajuan teknologi dan meningkatnya kapitalisasi masyarakat perkotaan. Penetrasi jenis kedua dan ketiga interaksi komunikatif tersebut sudah merasuk sampai ke masyarakat pedesaan, menjadi pranata baru bagi masyarakat pedesaan, serta akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan liberalisasi ekonomi dan bersaing dengan pranata interaksi tradisional.

Bagi masyarakat perkotaan, pasar tradisional merupakan “oase sosial” atau ruang sosial yang memungkinkan terjalinnya integrasi sosial antarwarga masyarakat. Interaksi komunikatif dalam pranata ekonomi (jual-beli) adalah sarana yang menjembatani berlangsungnya tatap-muka, bertutur-sapa atau dialogis, saling mengenali diri, berbagi informasi-pengalaman bersama, membangun saling percaya (*trust*) bersama, dan memanusiakan sesama, sehingga dapat meleburkan ketegangan-ketegangan sosio-psikologis dan mengantisipasi konflik sosial di antara warga perkotaan. Situasi sosial hidup di perkotaan, tekanan-tekanan ekonomi, dan kompetisi memperebutkan sumber daya ekonomi perkotaan sangat potensial melahirkan konflik terbuka dan ketegangan sosial laten. Melalui kegiatan ekonomi di pasar tradisional, jalinan sosial yang merenggang karena ketegangan sosial dan konflik terbuka dapat direkatkan kembali. Dalam konteks demikian, interaksi komunikatif yang terjadi pada transaksi ekonomi antara pedagang dan pembeli barang di pasar tradisional

memegang peranan penting. Selain aspek ekonomi, substansi komunikasi di antara mereka juga menyangkut aspek-aspek sosial, politik, dan budaya. Demikian pula, dalam mengatasi konflik etnisitas di berbagai daerah rawan, pasar tradisional memegang peranan penting sebagai wadah mediasi untuk resolusi konflik, khususnya lewat peran kaum perempuan, yang umumnya terlibat dalam aktivitas ekonomi informal.

Kajian terhadap interaksi komunikatif antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional dan memahami makna pola-pola komunikasi yang terbangun di antara mereka tidak hanya menggiring pemahaman kita pada eksistensi pasar tradisional sebagai simpul-simpul integrasi dan keserasian sosial masyarakat perkotaan, tetapi juga memberikan pembelajaran tentang bagaimana integrasi dan keserasian sosial itu dijaga dan dipelihara secara berkelanjutan. Tema budaya yang dilahirkan melalui aktivitas pranata transaksi ekonomi, seperti *tuna sathak*, *bathi sanak* menunjukkan bahwa dalam akad jual-beli, yang diutamakan tidak hanya keuntungan ekonomi semata, tetapi juga membangun persaudaraan antarsesama. Bahkan kerugian ekonomi tidak dipersoalkan, asalkan saja terjalin persaudaraan antara pedagang dan pembeli.

Dengan persaudaraan yang didasari oleh sikap saling percaya (*trust*) yang kuat, kerja sama ekonomi akan terus berlanjut, sehingga menjadi jaminan kelangsungan kegiatan ekonomi di pasar tradisional tersebut. Spirit kerja sama seperti ini melahirkan relasi pedagang dan konsumen pelanggan, yang kedua belah pihak sama-sama merasakan perolehan manfaat ekonomi atau berbagi keuntungan ekonomi bersama, sehingga kerja sama ekonomi tersebut terus berlangsung dan bertahan lama. Para pedagang biasanya berpegang teguh pada adagium, “Banyak saudara,

banyak rezeki”. Manfaat relasi sosial-ekonomi yang demikian memberikan kontribusi besar terhadap pengayaan kajian dalam disiplin sosiologi dan antropologi, khususnya subdisiplin sosiologi ekonomi dan antropologi ekonomi.

Temuan akhir dalam kajian etnografi komunikasi adalah tema-tema budaya yang berupa rajutan nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau norma-norma sebagai dasar interaksi sosial yang dapat memperkaya kajian antropologi, khususnya dalam memahami konstruksi dasar dari budaya masyarakat yang diteliti. Kajian bahasa dalam etnografi komunikasi dapat menjadi “pintu masuk” untuk memahami budaya suatu masyarakat. Selain itu, kajian etnografi komunikasi memberikan kontribusi besar terhadap ilmu komunikasi karena pemahamannya yang mendalam terhadap praktek komunikasi. Studi etnografi komunikasi mampu mengungkapkan dan mengeksplorasi aktivitas komunikasi sebagai suatu peristiwa yang kompleks makna dan hal ini sangat membantu pengayaan metodologis dalam studi ilmu komunikasi.

Berdasarkan uraian di atas, studi etnografi komunikasi merupakan disiplin yang mengeksplorasi secara kualitatif peristiwa interaksi komunikatif sehari-hari dalam suatu pranata sosial dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif dan mendalam tentang proses-proses interaksi, pola-pola komunikasi yang ada, makna-makna yang terkandung dalam pola-pola komunikasi tersebut, norma-norma budaya yang mendasari interaksi sosial, dan realitas budaya yang menjadi ruang hidup pranata tersebut. Melalui studi etnografi komunikasi akan diperoleh manfaat akademis dan manfaat praktis sosial-budaya. Manfaat akademis berkaitan dengan pengembangan epistemologis studi etnografi komunikasi dan disiplin lainnya, seperti ekonomi-pemasaran, pelayanan publik, sosiologi, dan antropologi. Manfaat

praktis sosial-budaya adalah untuk membantu menjelaskan dan menawarkan pemikiran alternatif mengatasi suatu masalah dalam praktek-praktek kehidupan bermasyarakat, seperti pola-pola komunikasi alternatif untuk menunjang interaksi sosial antara dokter dan pasien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengatasi ketidakpuasan pasien. Dengan demikian, studi etnografi komunikasi dapat membantu peningkatan produktivitas manusia dalam berbagai kegiatan dan mendorong dinamika kemajuan peradaban masyarakat.

BAB II

DARI ETNOGRAFI KE ETNOGRAFI KOMUNIKASI

2.1 Pengertian Etnografi

Istilah etnografi berasal dan sering digunakan dalam kajian-kajian antropologi. Dalam tradisi antropologi, secara harafiah etnografi berarti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa, yang ditulis oleh seorang antropolog atau etnografer atas hasil penelitian lapangan (*field work*) selama sekian bulan atau sekian tahun. Penelitian antropologi untuk menghasilkan laporan tersebut begitu khas sehingga kemudian istilah etnografi juga digunakan untuk mengacu pada metode penelitian yang menghasilkan laporan tersebut. Baik sebagai laporan maupun sebagai metode penelitian, etnografi dapat dianggap sebagai dasar dan asal-asul ilmu antropologi. Antropolog Margaret Mead menyatakan, bahwa antropologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan secara keseluruhan bergantung pada hasil kajian lapangan yang

dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat-masyarakat yang nyata hidup. Pendapat yang dikemukakan oleh Anthony F.C. Wallace adalah bahwa semua karya komparatif dan teoritis antropologi kultural bergantung pada deskripsi etnografi yang cermat dan mendalam. Menurut pendapat Adamson Hoebel, dasar antropologi kultural adalah etnografi (Marzali, 1997: xv-xvi).

Pada umumnya, para ahli antropologi tidak memiliki pen-
definisian yang sama tentang pengertian “etnografi”. Hammersley dan Atkinson (1983:1-2) merekamnya sebagai berikut: “Etnografi adalah suatu penelitian untuk memperoleh pengetahuan kebudayaan (Spradley, 1980); penyelidikan rinci tentang pola-pola interaksi sosial (Gumperz, 1981) atau analisis secara menyeluruh tentang suatu masyarakat (Lutz,1981). Kadang-kadang etnografi dilukiskan sebagai penggambaran (masyarakat) yang sangat deskriptif atau barangkali sebagai suatu bentuk penceritera-an (Walker, 1981) dan adakalanya, etnografi dipandang sebagai upaya besar untuk mengembangkan dan menguji teori (Glasser and Strauss, 1967 dan Denzin, 1978)”. Perbedaan pendapat dalam studi etnografi ini terjadi karena di antara para ahli tersebut mempunyai “penekanan akademik” yang berbeda pada aspek-aspek tertentu dari objek studi.

Lebih lanjut, Spradley (1997:3-4) mengatakan bahwa etno-
grafi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan masyarakat, dengan tujuan utama memahami suatu pandangan hidup dan dunianya dari sudut pandang penduduk asli (*indigenous people*). Etnografi tidak hanya “mempelajari suatu masyarakat dan kebudayaannya, tetapi juga belajar dari masyarakat”. Penemuan pandangan hidup yang dimiliki oleh penduduk asli dan dari sudut pandang mereka sendiri (*insider*) tentu merupakan jenis pengetahuan yang berbeda dari pengetahuan yang diperoleh

menurut pandangan orang luar (*outsider*).

Menurut Creswell (2014:129-130) dua jenis etnografi yang dikenal secara umum adalah *etnografi realis* dan *etnografi kritis*. Penjelasan di atas termasuk jenis etnografi realis. Etnografi realis adalah suatu laporan objektif yang ditulis oleh seorang peneliti antropologi atau etnografer tentang masyarakat dan kebudayaannya di suatu tempat tertentu. Laporan tersebut tidak terkontaminasi oleh bias pribadi peneliti, tujuan politik, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Seorang etnografer memproduksi pandangan partisipan dengan mengedit secara saksama dan menyusun penjelasan tentang bagaimana kebudayaan ditafsirkan dan ditampilkan. Etnografi kritis adalah yang menggunakan pendekatan “(teori) kritis atau *critical theory*” dengan memasukkan ke dalamnya perspektif advokasi. Pendekatan ini merupakan respons terhadap masyarakat sekarang di mana sistem kekuasaan, prestise, previlese (hak istimewa), dan otoritas digunakan untuk memarginalkan individu, kelompok, atau komunitas dari kelas, ras, dan gender yang berbeda. Etnografi kritis adalah satu jenis riset etnografis di mana penulisnya memperjuangkan emansipasi bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Para peneliti etnografi kritis biasanya merupakan individu yang berpikiran politis yang berusaha melalui risetnya, menentang ketidaksetaraan dan dominasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Pertama, etnografi dapat dilihat sebagai hasil atau laporan (produk dari suatu aktivitas) dan cara/proses untuk mengungkap sesuatu, yaitu kehidupan masyarakat atau suatu komunitas dengan kebudayaannya. Dalam pengertian yang pertama, etnografi adalah tulisan atau laporan yang komprehensif tentang kebudayaan masyarakat atau suatu komunitas. Dalam pengertian

yang kedua, etnografi adalah metode yang digunakan untuk mengungkapkan kehidupan suku bangsa, masyarakat, atau suatu komunitas. Kedua, laporan etnografi dibuat berdasarkan hasil penelitian lapangan yang bersifat objektif dan partisipatif untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan aspek-aspek kehidupan budaya suatu suku bangsa, masyarakat, atau komunitas, dalam jangka waktu yang relatif lama dan mendalam informasinya.

Dalam menuliskan laporan etnografi, data yang diperoleh di lapangan harus dapat berbicara dan di sinilah etnografi itu baru “berbunyi” sehingga etnografi itu dapat menjadi *make sense* (Kleden-Probonegoro, 2012:26). Karena itu, seorang peneliti etnografi dituntut untuk memiliki ketajaman persepsi dan mampu masuk ke dalam “jantung objek”. Selain itu, diperlukan kemampuan interpretasi untuk menyingkap makna-makna di balik data yang teramati dan didengar dari subjek riset sehingga deskripsi etnografi yang dibuatnya dapat menggiring para pembacanya seperti terlibat atau menjadi bagian dari peristiwa yang dilukiskannya.

2.2 Ruang Lingkup Etnografi

Sebagaimana dikemukakan di atas, etnografi adalah tulisan atau laporan yang rinci, cermat, dan mendalam tentang kebudayaan suku bangsa atau kehidupan suatu masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan dalam kehidupan suatu masyarakat yang akan diungkapkan dalam studi etnografi mencakup hal-hal berikut ini: (a) lokasi, lingkungan alam, dan demografi, (b) asal mula dan sejarah suku bangsa, (c) bahasa, (d) sistem teknologi, (e) sistem mata pencaharian hidup, (f) organisasi sosial, (g) sistem pengetahuan, (h) kesenian, serta (i) sistem religi dan kebudayaan (Koentjaraningrat, 1990: 334-335).

Pada dasarnya, studi etnografi untuk mengeksplorasi makna-makna tindakan sosial dibalik perilaku masyarakat yang mengejawantah pada praktek unsur-unsur kebudayaan universal di atas dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa makna tersebut terekspresikan secara langsung dalam bahasa dan banyak yang diterima dan disampaikan hanya secara tidak langsung melalui kata dan perbuatan. Akan tetapi, dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi sosial, setiap orang tetap menggunakan sistem makna yang kompleks untuk mengatur tingkah laku mereka, untuk memahami diri mereka sendiri, dan untuk memahami diri orang lain, serta untuk memahami dunia sosial dimana mereka hidup. Sistem makna itu merupakan kebudayaan mereka dan etnografi selalu mengimplikasikan teori kebudayaan (Spradley, 1997:5).

Kajian etnografi dapat dipandang sebagai suatu kegiatan sistematis dalam rangka memahami cara hidup yang dimiliki oleh suatu masyarakat lain yang berbeda dari kebudayaan yang kita punyai. Pemahaman tersebut harus mengikuti atau sesuai dengan sudut pandang pendukung kebudayaan yang memilikinya. Dalam penelitian etnografi posisi peneliti lebih banyak bertindak sebagai “orang yang belajar” kepada pendukung suatu kebudayaan sehingga peneliti dapat memahami dan mendeskripsikannya dengan baik (Suparlan, 1994:48). Karena itu, dalam kegiatan penelitian etnografi diperlukan pendekatan yang bersifat humanistik dan empatik sehingga menyelami hati dan pikiran dari masyarakat yang sedang diteliti.

Dalam kaitannya dengan lingkup eksplorasi unsur-unsur kebudayaan dalam kehidupan masyarakat atau komunitas yang akan dijadikan objek studi etnografi dikenal adanya dua model etnografi, yaitu etnografi klasik (*classical ethnography*) yang ber-

kembang sebelum abad 20 seperti dalam studi antropolog W.H.R. Rivers dan Franz Boas; etnografi modern (*modern ethnography*) pada awal abad 20 yang tercermin dalam studi-studi A.R. Radcliffe-Brown dan Bronislaw Malinowski; dan etnografi baru (*new ethnography*) pada tahun 1960-an yang terkait dengan antropologi kognitif atau etnosains, seperti pada kajian antropolog Harold C. Conklin, Charles O. Frake, Stephen A. Tyler, dan James P. Spradley (Marzali, 1997:xvi-xxii).

Model studi etnografi klasik secara substantif mengeksplorasi dan mendeskripsikan seluruh aspek kehidupan suatu suku bangsa atau masyarakat secara seimbang dan berdimensi diakronis. Unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki masyarakat dituliskan semua. Hal seperti ini dapat dilakukan karena pengkajian etnografis tersebut mengambil objek komunitas-komunitas kecil yang masih sangat homogen, belum mengalami diferensiasi sosial yang kompleks, sehingga bisa dijangkau oleh seorang etnografer. Model kajian etnografi klasik banyak ditemukan pada tahap awal perkembangan disiplin antropologi.

Sebaliknya, etnografi modern dan etnografi baru meletakkan objek kajiannya pada salah satu aspek kebudayaan masyarakat. Misalnya, pada aspek religi. Akan tetapi, dalam pengkajiannya aspek religi tersebut dicari keterkaitannya dengan aspek-aspek budaya lainnya. Pemfokusan pada satu aspek kebudayaan karena masyarakat sudah berkembang sedemikian rupa menjadi masyarakat kompleks atau masyarakat pascatradisional. Kompleksitas masyarakat tersebut ditandai dengan keragaman kelompok-kelompok etnik, mata pencaharian, ideologi, paham keagamaan, dan sebagainya yang tidak memungkinkan seluruh aspek tersebut dikaji dalam waktu yang singkat.

Yang berbeda dari kedua jenis etnografi di atas adalah pada aspek penekanannya. Etnografi modern meletakkan kajiannya pada dimensi sinkronis tentang pandangan hidup suatu masyarakat dalam upaya mendeskripsikan dan membangun struktur sosial-budaya masyarakat yang diteliti; memusatkan perhatian pada organisasi internal suatu masyarakat dan membanding-bandingkan sistem sosial dalam rangka mendapatkan kaidah-kaidah umum tentang masyarakat. Kajian etnografi baru bertujuan untuk menemukan bagaimana suatu masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikirannya (*mind*) dan menggunakannya dalam praktek-praktek kehidupan. Tujuan kajian demikian terkait dengan perspektif antropologi kognitif Goodenough yang melihat bahwa objek studi antropologi bukanlah fenomena material tetapi *cara-cara fenomena material itu diorganisasikan dalam pikiran*. Dengan kata lain, budaya itu ada di dalam pikiran manusia dan bentuknya adalah organisasi pikiran tentang fenomena material; dan tugas etnografi adalah menemukan dan menggambarkan pengorganisasian pikiran itu (Marzali, 1997:xix-xx).

Sekalipun demikian, teknik eksplorasi dan deskripsi analisis data tetap dilakukan secara rinci, mendalam, komprehensif, holistik-integratif, dan kualitatif interpretatif. Teknik yang demikian disebut dengan *thick description* atau deskripsi secara mendalam untuk memahami suatu kebudayaan masyarakat. Penelitian lapangan yang demikian membutuhkan waktu yang cukup lama sebagai upaya untuk mendapatkan *native's point of view* dengan pendekatan emik (Geertz, 1992:3-39). Geertz membedakan antara istilah *thin description* dan *thick description*. Istilah *thin description* menunjuk “deskripsi yang ditulis dari apa (informasi) yang didengar dan (fakta yang) dilihat oleh peneliti

dengan menggunakan teknik wawancara seperlunya”, sedangkan *thick description* adalah deskripsi mendalam terhadap suatu kebudayaan atau unsur-unsur budaya masyarakat yang bersumber dari fakta-fakta sosial yang tercerap oleh panca indera dan makna-makna tersirat dibalik fakta-fakta tersebut (Kleden-Probonegoro, 2012:16-17). Karena itu, *thick description* membutuhkan aplikasi metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam secara tepat dan sungguh-sungguh.

Jika model etnografi klasik banyak dikerjakan oleh para antropolog atau etnografer ketika awal perkembangan disiplin antropologi, model etnografi modern/baru banyak dilakukan oleh para antropolog pada masa kontemporer ini. Fokus kajian etnografi baru ini lebih tajam, mendalam, dan bersifat mikro, tetapi hasil kajiannya dapat berdampak makro. Karena sifat kajian yang kualitatif, kesimpulan yang diperoleh yang biasanya berupa tema-tema budaya adalah suatu proposisi (“teori”) yang bersifat kasus atau mikro dan tidak berpretensi mencapai proposisi yang berlaku generalistik. Proposisi atau kesimpulan yang bersifat makro dapat diperoleh setelah memperhatikan hasil studi kasus-kasus serupa di berbagai macam masyarakat dan menghubung-hubungkannya untuk mendapat titik keterpaduannya (sinerginya) atau jika kesimpulan tersebut memiliki tingkat abstraksi yang tinggi.

Menurut Creswell (2014:131-134), prosedur untuk melaksanakan studi etnografi realis atau etnografi kritis adalah sebagai berikut.

1. Menentukan apakah etnografi merupakan desain yang paling tepat digunakan untuk mengkaji masalah riset yang dipilih, dengan memperimbangakan nilai penting topik riset, baik untuk kepentingan akademis, maupun dalam konteks penyelesaian masalah sosial strategis.

2. Mengidentifikasi dan menentukan suatu kelompok sosial atau komunitas berkebudayaan sama yang akan dikaji sesuai dengan kebutuhan topik riset yang ditetapkan.
3. Menyeleksi berbagai masalah, teori kebudayaan, atau tema-tema sosial yang hendak dipelajari dari masyarakat yang dijadikan subjek penelitian etnografi.
4. Untuk mengkaji masalah atau konsep-konsep kebudayaan masyarakat yang diteliti harus ditetapkan dulu jenis etnografi yang akan digunakan sebagai perangkat metodologis. Jika tentang ketidakadilan sosial atau marginalisasi pembangunan komunitas-komunitas adat tentu akan memilih jenis etnografis kritis.
5. Mengumpulkan informasi atau data dalam konteks di mana kelompok masyarakat yang diriset tersebut berada. Dalam hal ini, peneliti mulai melakukan kerja lapangan di tengah-tengah masyarakat yang diteliti.
6. Dari banyak sumber data dan informasi yang sudah dikumpulkan, diseleksi, dikategori, dan diabstraksi, peneliti menganalisis data-data tersebut untuk menyusun suatu deskripsi tentang masyarakat yang diriset, menggali tema-tema budaya yang ada, dan melakukan penafsiran secara menyeluruh untuk memperoleh makna kajian atas topik yang diriset.
7. Hasil akhir analisis adalah menyusun aturan atau teori substantif tentang bagaimanakah masyarakat yang diteliti tersebut menjaga eksistensinya, melangsungkan kehidupan dan kebudayaannya.

Berdasarkan uraian di atas, studi etnografi yang berawal untuk memahami masyarakat dan kebudayaannya dari sudut pandang mereka sendiri dan akan berakhir dengan ditemukannya

makna-makna kebudayaan yang menyelimuti kehidupan suatu masyarakat. Sistem makna kebudayaan tersebut merupakan basis yang menopang eksistensi suatu masyarakat. Etnografi adalah suatu upaya (metodis) untuk menggali dan mengungkapkan sistem makna tersebut. Pemahaman studi etnografi demikian sesuai dengan pendefinisian kebudayaan di kalangan antropolog kognitif sebagai “sistem pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar, digunakan orang untuk menginterpretasikan pengalaman (diri dan orang lain), dan melahirkan perilaku sosial (Spradley, 1997:5). Jika kebudayaan dipahami dalam aliran pemikiran Clifford Geertz sebagai “sistem simbolik/semiotik” struktural Perancis Levi-Strauss, atau ekologi dan materialime budaya dari Marvin Harris (Marzali, 1997:xxi) yang berbeda dengan pendefinisian kebudayaan menurut kalangan antropolog kognitif tentu saja tujuan utama studi etnografi akan berbeda-beda.

2.3 Etnografi Komunikasi

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa etnografi komunikasi merupakan kajian yang bersifat interdisipliner, yakni sintesa antara antropologi dan linguistik (bahasa sebagai bagian dari praktek komunikasi). Studi ini merupakan pengembangan dari studi etnografi berbicara/wicara (*ethnography of speaking*) yang mula-mula dikemukakan oleh antropolog Dell Hymes pada tahun 1962. Etnografi berbicara adalah kajian tentang situasi dan penggunaan serta pola-pola fungsi “berbicara” sebagai suatu kegiatan, misalnya mengkaji tindak tutur yang rutin, khusus, dan ritual. Perubahan istilah dari “etnografi berbicara” ke “etnografi komunikasi” (*ethnography of communication*) terjadi pada tahun 1964 karena Hymes beranggapan bahwa yang menjadi kerangka acuan untuk memberikan tempat bahasa dalam suatu kebudayaan

haruslah difokuskan pada komunikasi, bukan pada bahasa. Baik antropolog, maupun linguist telah mengabaikan fungsi strategis komunikasi dalam interaksi sosial manusia. Antropolog menempatkan bahasa sebagai pelengkap, yakni sarana untuk mengungkapkan topik kajiannya sedangkan linguist memperlakukan bahasa sebagai struktur yang abstrak. Keduanya alpa bahwa bahasa memiliki fungsi yang kompleks dalam interaksi antarmanusia, sehingga pemahaman bahasa dalam konteks komunikasi yang dapat mempertemukan kedua pihak dan menutup kekurangan persepsi mereka terhadap bahasa. Hymes mencoba mensintesakan antropologi dan linguistik ke dalam etnografi komunikasi (Saville-Troike, 1989:1-2; Ibrahim, 1994:259-261).

Etnografi komunikasi adalah kajian tentang peranan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimanakah bahasa dipergunakan dalam interaksi sosial pada masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya atau kajian tentang pola-pola komunikasi pada suatu komunitas tutur, proses-proses interaksi sosial yang berlangsung, dan pemaknaannya menurut sistem budaya yang berlaku. Studi etnografi komunikasi mengeksplorasi regulasi-regulasi penggunaan bahasa, bagaimanakah unit-unit komunikatif diorganisasikan dan dipandang dalam pengertian yang luas tentang “cara-cara berbicara”, serta bagaimanakah pola-pola itu saling berkaitan dalam suatu cara yang sistematis dengan makna dan menurunkan makna dari aspek-aspek kebudayaan yang lain (Saville-Troike, 1989:11-12; Ibrahim, 1994:10-11; Kuswarno, 2008:11).

Dalam suatu interaksi sosial dengan latar dan tujuan tertentu, pola-pola komunikasi yang terbentuk tidak hanya terjadi pada tataran individu, tetapi juga pada tataran kelompok atau komunitas dan masyarakat. Ini berarti “pola-pola komunikasi

tersebut” sudah menjadi “unsur budaya” dari masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, interaksi jual-beli di warung kampung yang menjual barang-barang kebutuhan konsumsi pokok manusia. Pola-pola interaksi sosialnya bersifat timbal-balik dan transaksinya diikat oleh norma yang menjadi kesepakatan kolektif: jika barang dibeli dan diterima oleh pembeli, maka pembeli wajib membayar harga barang tersebut secara langsung atau pada hari lain sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pola ini dipahami dan diterapkan oleh setiap individu yang akan membeli barang di warung tersebut dan warga masyarakat secara keseluruhan juga mengerti tentang pola-pola interaksi jual beli yang demikian. Karakteristik pola-pola interaksi jual beli tersebut sudah merupakan bagian dari kebudayaan ekonomi masyarakat kampung yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran normatif pola-pola interaksi jual-beli tersebut dapat menimbulkan masalah sosial. Dengan demikian, secara lebih rinci kajian etnografi komunikasi bermaksud untuk: (i) memformulasikan pola-pola interaksi komunikatif dan memaknainya; (ii) memahami proses-proses sosial interaktif beserta dialektika penafsirannya; dan (iii) menempatkan keseluruhan praktek komunikasi itu dalam konteks nilai-nilai budaya masyarakatnya.

Sebagai suatu studi antarbidang, etnografi komunikasi memandang bahasa (teks wacana percakapan) sebagai sarana/media interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat dan bukanlah sebuah “entitas yang otonom” yang terpisah dari masyarakat (berada di luar masyarakat/manusia), tetapi bahasa adalah sebuah realitas sosial yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Sebagai salah satu unsur kebudayaan, eksistensinya mempengaruhi atau dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial-budaya yang lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya, kajian etnografi

komunikasi senantiasa mempertimbangkan keberadaan nilai-nilai sosial-budaya yang berpengaruh terhadap perilaku tindak tutur masyarakat, seperti pada cara-cara berbicara secara verbal dan nonverbal, kesantunan, negosiasi, dan kerja sama. Aliran filsafat yang mendasari paradigma kajian etnografi komunikasi ini adalah fenomenologis dan bertolak belakang dengan positivisme. Dalam paradigma fenomenologis, tindakan berbahasa merupakan bagian dari pengalaman kesadaran penutur, kelanjutan dari pikiran dan perasaan penuturnya. Konstruksi tuturan atau wacana percakapan itu merupakan pintu masuk untuk memahami pikiran dan perasaan penuturnya.

Peristiwa komunikasi atau peristiwa interaksi sosial dalam kehidupan nyata masyarakat dipandang sebagai peristiwa dan praktek budaya karena faktor-faktor yang terlibat di dalamnya cukup kompleks. Tugas peneliti etnografi komunikasi adalah menelisik secara tuntas semua aspek yang menyokong terwujudnya praktek komunikasi sebagai teks sosial. Aspek-aspek tersebut adalah wacana interaksi sosial sebagai fakta kebahasaan, bagaimanakah proses-proses komunikasi berlangsung, simbol-simbol yang dipertukarkan dalam interaksi, pola-pola komunikasi yang terbentuk beserta maknanya, dan sistem budaya yang mendasari praktek komunikasi.

Peristiwa komunikatif merupakan praktek budaya dan peristiwa sosial berpola karena sudah sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, etnografi komunikasi dapat dilihat sebagai metode alternatif untuk memahami latar, proses, motif, dan tujuan komunikasi serta memaknai perilaku sosial suatu kelompok masyarakat dalam suatu kebudayaan yang sama dan sebagai hasil dari suatu kajian unsur budaya masyarakat. Melalui pemahaman terhadap pola-pola interaksi sosial, etnografi

komunikasi merupakan salah satu cara untuk memahami dan mengerti kebudayaan yang dimiliki oleh suatu komunitas/masyarakat.

Fokus kajian etnografi komunikasi adalah komunitas tutur (*speech community*). Komunitas tutur merupakan ruang sosial tempat berlangsungnya praktek komunikasi berpola yang terorganisir dalam suatu peristiwa komunikatif. Cara-cara dalam praktek komunikasi tersebut juga berinteraksi dengan komponen-komponen lainnya dari sistem budaya yang dimiliki oleh komunitas tutur tersebut. Subjek studi etnografi komunikasi adalah pengetahuan kolektif tentang kaidah-kaidah komunikasi dan interaksi sosial, serta pengetahuan dan kaidah budaya yang menjadi basis dari konteks dan substansi peristiwa komunikatif dan proses-proses interaksi sosial (Saville-Troike, 1989:2-3). Subjek studi tersebut harus terungkap sebagai bagian dari hasil akhir studi etnografi komunikasi.

Etnografi komunikasi merupakan salah satu disiplin yang menempatkan praktek berbahasa (*parole*) sebagai objek studinya. Disiplin lainnya yang juga mengkaji objek yang sama adalah pragmatik, analisis wacana kritis, dan sosiolinguistik mikro atau sosiolinguistik interaksional. Perbedaan aspek-aspek internal dari keempat disiplin tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Perbedaan Aspek-aspek Internal Disiplin Penggunaan Bahasa

No.	Aspek Pembeda	Etnografi Komunikasi	Pragmatik	Analisis Wacana Kritis	Sosiolinguistik Interaksional
1.	Definisi	Studi tentang peranan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya (Saville-Troike, 1989; Ibrahim, 1994; Kuswarno, 2008).	Studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar (<i>speech situations</i>) (Leech, 1993).	Studi tentang pemahaman makna tuturan dalam teks, konteks, dan situasi (Firth, 1957 dalam Darma, 2009; Zellig Harris, 1952 dalam Martono, 2015; Haryatmoko, 2016).	Studi tentang pemahaman bahasa sebagai sistem interaksi verbal antar penutur-penuturnya di dalam masyarakat (Appel 1976, dalam Suwito, 1983).
2.	Asal mula ilmu	Antropologi (1962-1964)	Linguistik (1963)	Linguistik (1952)	Sosiologi dan linguistik (1964)
3.	Basis teori dan konsep	Antropologi (sosiologi), linguistik, filsafat (bahasa), sosiolinguistik, dan komunikasi.	Linguistik, filsafat (bahasa), dan antropologi	Linguistik, sosiologi, politik, gender, dan filsafat (bahasa)	Linguistik, filsafat (bahasa), sosiologi, dan antropologi
4.	Unit dasar analisis	Motif subjektif/teks/kon-teks peristiwa tutur yang aktual dalam suatu komunitas tutur	Motif subjektif/teks/konteks peristiwa tutur yang aktual/tulis dalam suatu komunitas tutur	Motif subjektif/teks/konteks peristiwa tutur yang aktual/tulis dalam suatu komunitas tutur	Motif subjektif/teks/konteks peristiwa tutur yang aktual/tulis dalam suatu komunitas tutur
5.	Tujuan akhir studi	Penemuan pola-pola/prinsip-prinsip/kaidah-kaidah interaksi komunikatif, pemaknaannya, dan formulasi tema-tema budaya.	Pemahaman makna dan pesan tuturan (maksud) dari sudut pandang para pelaku interaksi.	Pemahaman makna dan pesan yang terkandung pada teks tuturan dalam kaitannya dengan relasi-relasi dominatif/hegemonik/diskriminatif di antara penuturnya/kelempok masyarakat.	Pemahaman makna dan pesan teks dalam kaitannya dengan identitas sosial penuturnya.

Dari keempat kajian di atas, studi etnografi komunikasi dan sosiolinguistik berasal dari para ahli antropologi dan sosiologi yang berusaha untuk memahami eksistensi bahasa lebih komprehensif daripada kajian linguistik struktural. Kajian pragmatik dan analisis wacana (kritis) berangkat dari pemikiran para ahli bahasa (linguis) yang merasakan bahwa kajian linguistik terlalu sempit untuk memahami bahasa sebagai sarana dan wadah aktivitas manusia. Para ahli dari keempat kajian di atas memiliki sikap akademik mendasar yang relatif sama, yakni bahwa mereka merasa tidak puas dengan spektrum, makna, dan manfaat kajian linguistik selama ini. Karena itu, berupaya untuk “menata ulang” kajian bahasa secara representatif dan holistik. Meskipun konstruksi epistemologis keempat disiplin tersebut memiliki unsur-unsur yang sama dan berbeda, unsur pembeda yang paling tegas, jelas, dan mudah diidentifikasi adalah “tujuan akhir studi” yang akan diperoleh peneliti. Setiap disiplin ilmu pengetahuan memiliki karakteristik (konsep, teori, metode, dan temuan akhir) kajian yang berbeda. Tidak boleh karakteristik kajian suatu disiplin dipaksakan penerapannya kepada disiplin yang lain, seperti disiplin pragmatik ke etnografi komunikasi. Berikut ini disajikan sejarah dari salah satu kajian bahasa antarbidang, yaitu pragmatik.

Sebagaimana dicatat oleh Leech (1993:1-2; lihat juga, Robins, 1967/1995) bahwa pragmatik lahir sebagai hasil dari “ekspansi linguistik”. Ruang kajian yang sempit bagi linguistik merupakan konsekuensi bawaan lahir dari disiplin ini karena menganut falsafah “positivisme” August Comte yang diadopsi oleh Ferdinand de Saussure dari paradigma fakta sosial sosiolog Emile Durkheim. Saussure memahami bahasa sehari-hari dalam dualisme konsep: *langue* dan *parole*. Sesuai dengan azas

positivisme, Saussure memahami objek kajian bahasa berada dalam konteks *langue*. Positivisme linguistik memandang bahasa sebagai fakta sosial. Pandangan ini menempatkan entitas bahasa terlepas dari kesadaran subjektif penutur.

Karena itu, sejak masa Saussure hingga Bloomfield pada tahun 1940-an, topik kajian linguistik tidak beranjak dari tema fonetik, fonemik, dan morfofonemik. Baru pada tahun 1950-an, Noam Chomsky memasukkan sintaksis sebagai bagian kajian linguistik dan tahun 1960-an, murid-murid Chomsky mengintegrasikan semantik ke dalam studi linguistik. Masuknya sintaksis dan semantik telah mengubah pandangan ahli linguistik Lakoff dan kawan-kawan bahwa studi linguistik tidak dapat lagi diisolasi dari aspek “penggunaan bahasa atau *parole*”. Sejak akhir tahun 1960-an tersebut, pragmatik “lahir” sebagai perluasan dari kajian linguistik, sehingga dapat dimaklumi jika pragmatik dianggap sebagai “subdisiplin linguistik” atau “anak kandung linguistik”. Spektrum kajian linguistik tidak lagi seperti ketika Saussure memetakan aspek ontologis dari linguistik yang berorientasi pada *langue* dan mengharamkan *parole* karena dianggapnya kurang objektif. Kelahiran pragmatik menandai proses penyatuan *langue* dan *parole* dalam studi bahasa. Proses kelahiran pragmatik ini agak mirip dengan kelahiran analisis wacana kritis, tetapi berbeda dengan kelahiran kajian etnografi komunikasi atau sosiolinguistik.

Meskipun demikian, studi tentang penggunaan bahasa masih membutuhkan konsep-konsep atau wawasan teoritis dari disiplin lain. Pragmatik membutuhkan buah pemikiran ahli-ahli filsafat bahasa, seperti teori tindak tutur dari J.L. Austin (1962) dan J.R. Searle (1969), serta maksim-maksim percakapan yang efektif dari H.P. Grice (1975). Selain itu, mengadopsi pengertian

konteks yang berasal dari ahli-ahli antropologi untuk memperkuat basis teoritis kajian pragmatik (Leech, 1993:3). Gejala demikian menggambarkan keterbatasan “modal konseptual” linguistik dan mengabarkan kepada kita semua bahwa perkembangan suatu ilmu pengetahuan membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lain. Prinsip saling-membantu dalam “kehidupan ilmu pengetahuan” juga terjadi dalam kajian etnografi komunikasi, analisis wacana kritis, dan sosiolinguistik.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa “perluasan objek studi linguistik”, seperti terjadi pada pragmatik dan analisis wacana kritis atau munculnya kajian interdisipliner dalam penggunaan bahasa, seperti etnografi komunikasi dan sosiolinguistik merupakan imbas dan respon dari perdebatan paradigmatis yang terjadi dalam ilmu-ilmu sosial, sejak akhir tahun 50-an sampai awal tahun 70-an. Salah satu disiplin ilmu sosial, yakni sosiologi merupakan disiplin yang sangat pesat perkembangan konsep-konsepnya, teori, dan metodenya, yang kemudian diadopsi oleh ilmu-ilmu sosial lainnya, termasuk dalam studi linguistik antarbidang.

Pada masa-masa mendatang, hasil-hasil kajian di bidang sosiologi, antropologi, dan filsafat (bahasa), akan semakin meningkatkan pengaruhnya terhadap kajian-kajian penggunaan bahasa (fungsional dan interaksional) dan pada sisi yang lain, kajian linguistik umum atau linguistik struktural akan semakin surut ke belakang karena dimensi ontologis dan epistemologisnya yang bersifat terbatas dan tertutup bagi perkembangan keilmuannya, serta nilai aksiologisnya yang sangat minimal bagi kehidupan masyarakat. Jika kecenderungan terus meningkat, hal ini merupakan indikasi akan berakhirnya “dominasi positivisme” dalam studi kebahasaan. Meskipun demikian, disiplin linguistik tetap harus diajarkan sebagai salah satu varian dari sekian pendekatan

yang digunakan untuk memahami eksistensi bahasa. Semua varian pendekatan kajian itu adalah sah secara metodologis dan tidak ada dikotomi, mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik. Pada dasarnya, studi linguistik hanya menempati “satu kamar” dalam rumah besar pendekatan dalam kajian kebahasaan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kajian antarbidang linguistik semakin berkembang adalah sebagai berikut. Pertama, terbuka terhadap konsep, teori, dan metode dari ilmu-ilmu lain yang bersifat memperkaya dimensi epistemologisnya. Kedua, manfaatnya lebih kongkret bagi pemecahan masalah-masalah sosial aktual. Kedua hal tersebut tidak terjadi pada kajian linguistik, yang secara epistemologis bersifat tertutup dari kontribusi konsep, teori, dan metode dari ilmu-ilmu lain. Secara aksiologis, kontribusi kajian linguistik terhadap kepentingan masyarakat sangat terbatas. Karakteristik demikian telah menghambat pengembangan kajian linguistik.

Menurut Suhardi (2005:217-218), dari sekian sub-bidang kajian linguistik yang “paling nyata sumbangsuhnya” bagi masyarakat adalah lesikografi atau perkamusan. Diakatakan “paling nyata sumbangsuhnya”, karena ahli-ahli bahasa (perkamusan) menangani penyusunan dan penerbitan kamus: ekabahasa, dwibahasa, peristilahan, disiplin ilmu, komunitas, dan sebagainya. Kalau semua bahasa daerah dan variasinya serta disiplin ilmu dan bidang-bidang kehidupan manusia dibuatkan kamusnya tentu kita mencatat produktivitas penerbitan kamus. Meskipun demikian, hasil kajian bahasa yang manfaatnya dirasakan oleh pengguna bahasa secara kongkret apakah hanya dalam bentuk kamus? Dari beberapa disiplin kajian penggunaan bahasa, studi etnografi komunikasi dan analisis wacana kritis merupakan studi yang perkembangannya cukup pesat dan hal ini menandakan

PENGANTAR ETNOGRAFI KOMUNIKASI

kalau kedua disiplin tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan secara akademis dan praktis, melebihi kontribusi studi linguistik struktural.

BAB III

DIMENSI-DIMENSI SOSIAL BAHASA

3.1 Fungsi Konstruktif-Destruktif Bahasa

Pengertian atau definisi dan fungsi-fungsi bahasa dari berbagai ahli cukup beragam. Menurut Kridalaksana (2005:3), bahasa merupakan suatu sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Namun, definisi bahasa yang banyak dipakai orang adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antarsesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama (Dardjowidjojo, 2014:16). Bahasa, makna, dan konteks-konteks situasi-kultural penggunaannya diperoleh manusia melalui proses pewarisan budaya dan digunakan sebagai sarana interaksi komunikatif dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan

eksistensial manusia. Dengan menggunakan bahasa sebagai media interaksi sosial, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi jembatan untuk pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungannya.

Ketika seseorang berbicara dengan orang lain, sesungguhnya keduanya tidak hanya mengoperasikan atau mengomunikasikan simbol-simbol bahasa dan maknanya semata, tetapi juga saling menyosialisasikan diri masing-masing secara timbal-balik, sehingga keduanya memperoleh pemahaman paripurna tentang makna dan maksud berinteraksi, selain mengenali sifat dan sikap pribadi masing-masing. Bahasa menjadi sarana budaya yang membudayakan para penuturnya sebagai makhluk sosial yang beradab, sehingga bahasa tidak semata-mata alat komunikasi untuk mempertukarkan pesan-pesan sederhana dari para penuturnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa mengemban banyak fungsi untuk menjembatani relasi dua dimensi manusia, yakni manusia dengan Tuhan-nya dan antara manusia dengan sesamanya. Rumusan sederhana linguist Andre Martinet (1987:22), melihat fungsi utama bahasa itu sebagai instrumen komunikasi untuk menciptakan pengertian bersama atau saling pengertian di antara mereka yang terlibat interaksi sosial. Kebutuhan permanen inilah yang menjadikan bahasa selalu dalam keadaan berfungsi. Selain itu, bahasa berperan untuk menunjang kerja pikiran, ekspresi diri, dan mengungkapkan estetika. Bagi Keraf (1977:15) terdapat empat fungsi bahasa, yaitu untuk menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi, sarana adaptasi dan integrasi sosial, serta untuk kepentingan kontrol sosial. Akan tetapi, menurut ahli linguistik Sudaryanto, fungsi komunikasi “bukanlah fungsi spesifik” dari bahasa. Seni, ritual tradisional, pakaian, dan gaya hidup juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi. Fungsi yang “bersifat khas

dan hakiki” dari bahasa adalah fungsi mengembangkan akal budi dan memelihara kerja sama (*Kompas*, 23 November 2014:13).

Menurut MAK Halliday (1972), bahasa memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual. Fungsi ini berkaitan dengan peranan bahasa untuk pengungkapan “isi”, pengungkapan pengalaman penutur tentang “dunia nyata”, termasuk “dunia dalam” dari kesadarannya sendiri. Fungsi interpersonal, berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, pengungkapan peranan-peranan sosial, termasuk peranan-peranan komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri. Fungsi tekstual, berkaitan dengan tugas bahasa membentuk berbagai mata rantai kebahasaan dan mata rantai unsur situasi yang memungkinkan digunakannya bahasa oleh para pemakainya (dalam Sudaryanto, 1990: 17-18).

Sesuai dengan karakteristik sifat-sifat manusia, kebutuhan hidupnya, dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa sebagai sarana ekspresi diri dan interaksi sosial, bahasa memiliki dua fungsi yang bersifat diametral, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi destruktif. Fungsi konstruktif bersifat kodrati-alamiah, sedangkan fungsi destruktif bersifat artifisial untuk memenuhi berbagai kebutuhan nafsu duniawi para penuturnya yang cenderung bersifat negatif. Sifat fungsi konstruktif bahasa tersebut karena pada dasarnya manusia yang hidup di dunia ini dan berbudaya memiliki tujuan mulia untuk menciptakan kehidupan bersama yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan.

Adapun fungsi-fungsi konstruktif bahasa itu adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban bagi kesejahteraan hidup manusia.

2. Mengawetkan ilmu pengetahuan dan melestarikan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dan memeliharanya untuk berbagai kepentingan manusia.
4. Meredakan ketegangan dan mengatasi kebuntuan dalam relasi-relasi sosial-budaya, ekonomi, hukum, dan politik.
5. Medium beradaptasi sosial dan berintegrasi dengan masyarakat.
6. Mempertahankan pendirian dan sikap individu dalam interaksi sosial untuk mencari suatu kebenaran.
7. Melepaskan atau membebaskan diri dari beban pikiran dan tekanan psikologis karena berbagai hal.
8. Mengekspresikan nilai-nilai religius dan estetika.
9. Membujuk, melarang, dan memerintahkan seseorang/kelompok untuk tidak melakukan sesuatu hal yang dapat merusak tatanan kehidupan.

Sebaliknya, fungsi destruktif bahasa adalah untuk: (a) mendukung agitasi politik dan menyebarkan fitnah/desas-desus/kebohongan publik dan kebencian yang dapat menimbulkan ketegangan sosial atau merugikan pihak-pihak tertentu; (b) memanipulasi fakta (realitas sosial) dan nilai, melanggar hukum, atau menyembunyikan kebenaran untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi/kelompok dan merugikan orang lain; (c) menistakan orang-orang lain dengan ungkapan-ungkapan yang tidak santun; (d) membenarkan pikiran, ucapan, dan sikap-sikap munafik dengan berlindung di balik kelemahan etika sosial, aturan hukum, dan ayat-ayat agama; serta (e) menyembunyikan niat jahat atau perilaku buruk dibalik jubah kesantunan berbahasa. Orang-orang yang demikian tidak menegakkan dan

memperjuangkan langgengnya nilai-nilai keutamaan dan kemuliaan dalam kehidupan, seperti kejujuran, kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan. Mereka menjauhkan hati nuraninya dari tindakan-tindakan sosialnya, cenderung bersikap serakah (*kemaruk*), menguasai dan memakan semua sumber daya yang ada di lingkungannya, materialistik, egoistik, dan duniawi, tidak pernah berpikir tentang kepentingan orang banyak. Padahal, tugas prinsip kita dalam kehidupan ini adalah menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai keutamaan dan kemuliaan tersebut.

Bahasa menjadi sarana dan wahana untuk menghasut, menipu, menghina, membenci, membohongi, dan sebagainya. Bahasa berada dalam pusaran permainan jiwa-jiwa yang destruktif. Di ruang-ruang peradilan, kita sering menyaksikan dengan telanjang mata, pikiran, dan nurani tentang kebenaran yang dimurtadkan dan kecurangan yang dituhankan. Permainan manipulatif bahasa dalam bentuk pembelaan hukum atau keputusan hakim dapat menjebloskan orang yang jujur ke dalam penjara atau sebaliknya, membebaskan pembunuh, bandar narkoba, teroris, maling, dan koruptor dari jerat hukum. Fungsi destruktif bahasa mengakibatkan kesengsaraan manusia, penderitaan batin yang berkepanjangan, saling mencurigai, konflik sosial, dan melestarikan kemunafikan massal.

Perang, resolusi konflik, dan perdamaian abadi adalah manifestasi dari fungsi destruktif dan konstruktif bahasa. Tidak sedikit orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi destruktif bahasa berubah mirip dengan “pribadi-pribadi bersih yang dilekati dengan simbol-simbol agamis, suka menggelar kegiatan ritual, santun, akademis, profesionalis, dan terhormat”. Sering pula ditemui dalam kehidupan sehari-hari, individu-individu yang menggunakan simbol-simbol religi yang bermotif untuk

menunjang kontestasi identitas diri sebagai “orang yang beriman dan berbudi baik”, padahal sesungguhnya hal itu untuk menutupi pribadi atau kelompoknya yang bermental buruk. Performansi diri ini merupakan “wacana, bahasa, simbol, atau kode (identitas)” yang disosialisasikan secara publik untuk memperoleh apresiasi positif dan legitimasi sosial. Dalam “bahasa politik”, hal seperti ini merupakan bentuk “pencitraan diri” yang artifisial, tidak berakar pada realitas objektif sehari-hari yang bersifat alamiah. Oleh sebab itu, penampilan diri yang bersifat agamis, seperti pejabat yang senang menggelar kegiatan berdoa massal dan memobilisasi simbol-simbol identitas agama, serta tutur sapa yang santun, dan sikap rendah hati pada seseorang atau suatu komunitas, bukanlah “jaminan paripurna” hadirnya pribadi-pribadi yang unggul secara batiniah, jujur, dan memiliki komitmen sosial.

Fungsi konstruktif bahasa berpotensi besar melahirkan kebudayaan adiluhung, mengerek kemajuan peradaban, keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi konstruktif bahasa dapat menyerbukkan kesuburan akal pikiran manusia dan menggali keunikan-keunikan yang ada dalam diri manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Fungsi ini yang mendorong terjadinya kreativitas dan inovasi pikiran manusia sebagai upaya mengembangkan kerja sama yang luas dan memeliharanya dengan baik demi membangun peradaban yang semakin berkualitas. Sebaliknya, fungsi destruktif bahasa hanya akan melahirkan kemandegan berpikir, disorientasi, superioritas diri tanpa kendali, insan manipulatif, dan sikap-sikap mekanis yang berdampak pada pembonsaian diri dan alienasi sosial terhadap keselarasan berkehidupan bersama. Karena itu, kita tidak bisa bermain-main dengan fungsi destruktif bahasa karena akibatnya sangat fatal bagi kelangsungan hidup manusia dan kebudayaannya.

Kehidupan manusia senantiasa berada dalam dialektika antara fungsi konstruktif dan destruktif bahasa yang membuat manusia terpenjara. Kedua fungsi tersebut merepresentasikan realitas dualisme kehidupan yang senantiasa hadir dalam tarikan ketegangan permanen eksistensi manusia sebagai individu dan makhluk sosial, meskipun harus disadari bahwa fungsi konstruktif bahasa telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan kebudayaan manusia di berbagai bidang. Hal demikian dapat kita saksikan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat modern. Karena itu, manusia harus memiliki resep-resep diri untuk mampu keluar dari kemelut dan perangkat fungsi destruktif bahasa dengan mengembalikan ke esensi jati diri sebagai khalifah di dunia yang memiliki tanggung jawab utama *memayu hayuning bawana* beserta semua isinya, dengan menumbuhsuburkan sikap senantiasa bersyukur secara ikhlas, dapat mengendalikan diri dari pragmatisme-materialistik (tidak *kemaruk*), berpikir positif, menyebarkan kedamaian, dan empati membantu sesama terhadap mereka yang memang membutuhkan bantuan.

3.2 Bahasa: Identitas Komunitas

Manusia adalah makhluk sosial. Seorang individu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan individu-individu yang lain. Kebutuhan untuk saling membantu menjadikan individu-individu tersebut harus hidup berkelompok atau dalam satuan-satuan sosial yang terintegrasi. Interaksi sosial di antara individu-individu itu merupakan sarana untuk bekerja sama dan melakukan pertukaran sumber daya dalam rangka menjaga kelangsungan kehidupan mereka. Dalam konteks interaksi dan komunikasi antarindividu

di dalam kesatuan sosial atau antarkelompok sosial, bahasa memainkan peranan sentral sebagai jembatan penyambung berbagai kepentingan masyarakat.

Salah satu bentuk kesatuan sosial yang relatif besar adalah masyarakat. Secara antropologis, masyarakat (*society*) merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu (kebudayaan) yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama sebagai suatu masyarakat (Koentjaraningrat, 2009: 118). Berdasarkan definisi ini ada beberapa unsur yang menandai keberadaan suatu masyarakat, yaitu sebagai berikut: (a) adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu sama lain dalam berbagai urusan kehidupan sehari-hari, (b) sistem interaksi sosial tersebut didasarkan pada adat-istiadat yang stabil dan kontinyu, serta (c) memiliki identitas sosial bersama. Unsur lain yang menjadi pelengkap tetapi juga penting adalah (d) kesejarahan geo-sosial, yang menjadi pembatas tempat dan sejarah asal-usul keberadaan suatu masyarakat. Sebagai contoh, suatu masyarakat yang menyebut dirinya sebagai “masyarakat Jember” tentu berbeda aspek geo-sosialnya dengan “masyarakat Yogyakarta” atau “masyarakat Palembang”. Jika individu atau suatu kelompok menyebut dirinya sebagai bagian dari warga “masyarakat Jember”, mereka tidak akan mau disebut oleh orang lain sebagai warga “masyarakat Malang” atau “masyarakat Pontianak”. Masyarakatlah melalui individu-individunya yang mendefinisikan dirinya dengan seperangkat ciri-ciri sosial-budaya untuk membedakan dirinya dengan orang lain.

Kesatuan sosial yang skalanya di bawah tataran masyarakat adalah komunitas (*community*). Komunitas diartikan sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan yang berinteraksi menurut sistem adat-istiadat,

serta terikat oleh suatu rasa identitas komunitas (Koentjaraningrat, 2009:119). Dalam pengertian yang sederhana, komunitas adalah “kesatuan sosial setempat”. Secara substantif, pengertian masyarakat dan komunitas tidak ada perbedaan. Unsur-unsur pembentuk komunitas sama dengan masyarakat. Yang berbeda dengan masyarakat adalah ukuran skala sosial dan batasan geografis, tempat komunitas berada. Dengan kriteria demikian, dalam suatu masyarakat dapat tersusun oleh beberapa komunitas dan sebuah komunitas juga dibentuk oleh sub-sub komunitas yang bertata tingkat.

Berdasarkan penjelasan pemikiran di atas, kita bisa merinci macam-macam komunitas yang membentuk masyarakat di sebuah desa pesisir, seperti komunitas nelayan, komunitas pedagang ikan, komunitas pembudi daya rumput laut, komunitas pesantren, dan komunitas pecinta lingkungan. Komunitas nelayan di sebuah desa pesisir terdiri atas: (a) sub-komunitas nelayan pemilik perahu dan alat tangkap serta (b) sub-komunitas nelayan buruh. Pembagian komunitas nelayan bisa juga menggunakan sudut pandang lain, seperti jenis alat tangkap yang dimiliki nelayan, sehingga terbagi menjadi: (a) sub-komunitas nelayan slerek (*purse seine*), (b) sub-komunitas nelayan jaring, dan (c) sub-komunitas nelayan panci-ngan. Berdasarkan komponen-komponen pembedanya, rincian pembagian komunitas bisa sampai ke skala (ukuran) terkecil dari aspek jumlah individu dalam suatu komunitas.

Contoh yang lain adalah komunitas pasar tradisional di suatu desa. Secara keseluruhan, orang-orang yang setiap hari terlibat dalam aktivitas jual-beli dapat disebut sebagai “komunitas pasar (tradisional)”. Dalam aktivitas sosial-ekonomi di pasar tersebut, interaksi jual-beli antara pedagang tahu-tempe dengan 1-2 orang konsumen juga disebut sebagai suatu komunitas atau

sub-komunitas pasar tradisional. Dalam perspektif penggunaan bahasa, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas jual-beli tempetahu tersebut disebut sebagai sebuah komunitas tutur (*speech community*). Dalam perspektif fungsional dan interaksional kajian bahasa, istilah “komunitas” lebih fleksibel daripada istilah “masyarakat” karena istilah “komunitas” dapat mereferensi suatu entitas sosial dari tingkat (jumlah) yang besar sampai dengan tingkat yang kecil atau merujuk gradasi komunitas secara fleksibel.

Setiap komunitas memiliki identitas sosial yang berbeda-beda. Identitas sosial menjadi ciri pembeda di antara berbagai komunitas yang ada di suatu masyarakat. Identitas sosial terbentuk karena faktor-faktor sejarah sosial, kondisi lingkungan, dan hubungan-hubungan genetis dengan kesatuan sosial yang lain. Identitas sosial berupa simbol-simbol, seperti adat-istiadat, bahasa, seni tradisi, pakaian, arsitektur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, dan sistem gender. Dalam hal ini, “bahasa” merupakan salah satu unsur identitas suatu komunitas. Bahasa komunitas juga menyimpan seperangkat simbol-simbol yang terkait dengan ciri-ciri identitas sosial tersebut. Di samping itu, bahasa berfungsi sebagai sarana interaksi sosial dan sarana ekspresi komunitas. Sebagai suatu identitas sosial, simbol-simbol bahasa yang dimiliki merupakan pencerminan dari karakteristik komunitas tersebut. Ciri-ciri kebahasaan lainnya dapat dilihat pada aspek dialektologis, struktur kata/kalimat, leksikon, dan semantiknya. Jadi, karakteristik bahasa berkaitan erat dengan identitas sosial komunitas penuturnya (Gumperz dan Cook-Gumperz, 1982: 1-3).

Sebagai contoh, komunitas tutur bahasa Indonesia yang berasal dari etnik Jawa, Madura, Bali, Batak, atau Palembang akan mudah dikenali identitas sosial yang terkait dengan asal-usul etniknya, seperti dari aspek: logat bicaranya, leksikon, dan struktur

kalimatnya. Demikian pula, jika dalam sebuah peristiwa tutur bahasa Jawa, hadir enam orang yang berasal dari daerah Jember, Osing Banyuwangi, Trenggalek, Surabaya, Tuban, dan Ngawi, maka kita akan mudah mengenali asal-usul mereka dari aspek dialektisnya, yaitu logat bicaranya, struktur kalimat, dan pilihan leksikal ketika bertutur. Dialek dan unsur-unsurnya merupakan penanda yang mudah diidentifikasi dalam kaitannya dengan penentuan identitas sosial individu atau sekelompok orang.

Hal yang sama juga berlaku pada tataran komunitas di tingkat lokal, seperti komunitas nelayan dan komunitas santri di sebuah desa. Sebagai salah satu identitas budaya, bahasa kedua komunitas mudah dikenali karena memiliki karakteristik yang relevan dengan identitas mereka, yaitu nelayan dan warga santri. Dalam praktek tindak tutur, nelayan akan cenderung menggunakan kosa kata yang lugas dan terkadang kasar, intonasinya agak keras, dan sikapnya lebih terbuka. Jika terkait dengan kehidupan keseharian mereka sebagai nelayan, kosa kata yang digunakan senantiasa terkait dengan hal-ihwal tentang laut, ikan, dan sumber daya modal usahanya. Demikian juga, warga santri. Dalam setiap peristiwa tutur yang dihadapinya, mereka akan cenderung menggunakan kosa-kata yang bersifat agamis, nada bicaranya datar, sikapnya lebih santun, dan seterusnya.

Berbagai unsur pembeda identitas sosial dan status sosial individu, seperti gender (seks) dan atau stratifikasi sosial, akan memancarkan ciri-ciri kebahasaan tersendiri ketika berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, dalam komunitas tutur bahasa Jawa, seorang ibu muda yang terpelajar bernama Mila dengan status ekonomi cukup kaya dan sedang berbicara dengan Bu Achmad, isteri tokoh agama yang dihormati di desanya, hubungan sosialnya tidak begitu akrab dan bukan kerabatnya, maka

Mila akan menggunakan ragam bahasa Jawa *krama* sebagai bentuk penghormatan sosial, bukan dengan Jawa *ngoko*. Pilihan penggunaan bahasa *krama* merupakan pencerminan dari status sosial yang disandang oleh Mila dan bahasa *krama* pun dapat menjadi “pintu masuk” untuk mengenali identitas sosial Mila. Aturan berbahasa demikian merupakan aturan sosial yang harus diikuti oleh setiap anggota komunitas tutur bahasa Jawa. Jika Mila melanggar aturan tersebut, ia akan menjadi sasaran cemoohan orang lain seperti, “Orang perempuan kok nggak tahu aturan? Kalau dia (Mila) nggak bisa menghargai dirinya sendiri, bagaimana orang lain bisa menghormatinya?”

Untuk menghindari kesalahan tafsir makna tuturan, pengetahuan dan pemahaman terhadap budaya komunitas sangat diperlukan. Kebudayaan komunitas akan mempengaruhi aspek semantik bahasa komunitas. Dalam kaitannya dengan studi etnografi komunikasi, pengetahuan dan pemahaman terhadap budaya komunitas akan membantu peneliti melakukan interpretasi pemaknaan terhadap setiap peristiwa interaksi komunikatif yang terjadi pada komunitas tersebut. Selain itu, berfungsi juga untuk mengidentifikasi pola-pola komunikasi yang terbentuk, tindakan-tindakan sosial bermakna yang menyertai komunikasi, dan konteks-konteks yang mempengaruhi karakteristik makna interaksi sosial.

Baik komunitas maupun bahasa komunitas akan seiring mengikuti perkembangan zaman sepanjang tersedia unsur-unsur yang mendukung. Kondisi demikian disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai komunitas telah mendorong perubahan sosial-budaya, peningkatan mobilitas sosial, dan pengembangan wawasan iptek. Kedua, keterbukaan komunitas berkembang

karena inovasi dan intensifnya interaksi sosial antarkelompok komunitas untuk membentuk tatanan sosial baru yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Ketiga, sebagai unsur budaya, bahasa juga ikut berkembang sebagai jawaban terhadap dinamika sosial pembangunan komunitas sehingga bahasa tersebut tetap fungsional untuk menjawab kemajuan masyarakat. Jika komunitas tidak berkembang lebih baik dan sistem bahasanya bersifat tertutup terhadap perubahan, komunitas dan bahasanya akan menghadapi situasi involutif (kemunduran), yang ditandai dengan keterbatasan simbol-simbol bahasa dan ekspresi kebahasaan yang miskin.

Dampak positif dari kecenderungan dinamika komunitas adalah warga komunitas semakin meningkatnya kualitas kehidupan komunitas dan menyadari bahwa perubahan adalah jalan untuk mencapai kemajuan. Karena itu, berbagai segi kehidupan budaya mereka haruslah menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan dan perubahan sosial. Sikap-sikap konservatif dalam pandangan hidup komunitas justru akan membuat komunitas tertinggal dari dinamika pembangunan. Proses dialektika antara bahasa dan komunitas pemiliknya terus berkembang sejalan dengan dinamika pembangunan. Baik komunitas maupun bahasanya terus beradaptasi dan meningkatkan fungsi sosio-komunikatifnya sehingga tidak tertinggal untuk berkontribusi terhadap kemajuan komunitas.

Namun demikian, bisa saja terjadi perkembangan yang bersifat negatif tentang bagaimanakah suatu komunitas kehilangan identitas bahasanya secara perlahan-lahan karena perubahan komposisi demografis-etnik dan perubahan sosial yang cepat dan berskala besar. Perbandingan demografi-etnik berkaitan dengan relasi mayoritas-minoritas etnik di suatu wilayah. Sebagai contoh,

di distrik Jember pada masa kolonial dihuni oleh sebagian besar komunitas Osing¹. Osing adalah sebutan penduduk pendatang dari Malang, Blitar, Ponorogo, Madiun, dan Yogyakarta (Jawa Mataraman) terhadap penduduk asli yang hidup di eks wilayah Kerajaan Blambangan pada era Kerajaan Majapahit. Wilayah keseluruhan Kerajaan Blambangan jika ditarik garis lurus adalah mulai dari Panarukan (masuk Kabupaten Situbondo) ke Puger, dan terus ke wilayah timur sampai dengan Banyuwangi. Kerajaan Blambangan dibagi menjadi dua, yaitu Blambangan Barat dan Blambangan Timur. Batas geografis Blambangan Barat adalah mulai dari Puger sampai dengan Kali Mayang dan mulai dari Kali Mayang ke timur sampai dengan Kota Banyuwangi termasuk wilayah Blambangan Timur.

Distrik Jember yang didirikan pada tahun 1920 adalah bagian dari wilayah Blambangan Barat. Sejak pertengahan abad 19, terjadi migrasi besar-besaran orang Madura dan Jawa Mataraman ke wilayah Jember dan sekitarnya sebagai tenaga kerja kasar di sektor perkebunan, sehingga terjadi perubahan komposisi penduduk secara signifikan. Pada masa awal abad-20, jumlah komunitas Osing masih cukup banyak dan berangsur-angsur

¹ Sebagian kecil penulis menyebutnya dengan istilah *Using* sebagai penyesuaian atas ejaan Belanda *Oesinger*, 'orang *Using*'. Penulisan yang betul adalah *Osing* karena: (a) sesuai dengan "pengucapan nyata" orang-orang Osing dalam kehidupan sehari-hari, (b) tidak terpengaruh konstruksi ejaan bahasa kolonial Belanda yang merupakan wujud dari "ideologi kolonisasi budaya", dan (c) dalam publikasi nasional/internasional lebih banyak dipakai istilah *Osing* daripada *Using*. Konstruksi "sak using-usinge" tidak bisa dijadikan alasan pembakuan penyebutan *Using* karena konstruksi itu berasal dari orang non-Osing (Jawa Kulon). Yang benar adalah "sak osing-osinge" menurut perspektif emik orang Osing. Fakta sosial lainnya, masyarakat Osing di Banyuwangi menyebut "anak Osing" dengan ungkapan "Lare Osing", diakronimkan menjadi *LarOs*, bukan "Lare Using" atau *LarUs*. Sudah saatnya, para akademisi memberikan masukan agar dalam dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi nama *Osing* yang harus dibakukan, bukan *Using*.

mulai tergeser oleh etnik Madura dan Jawa Mataraman. Seiring dengan akulturasi budaya dan perkawinan lintas etnik, komunitas Osing mengalami tiga perubahan identitas etnis, yaitu terasimilasi menjadi orang Madura, Jawa Jemberan (bahasa Jawa dialek Jember), dan Osing Kasar (Kusnadi, 2002). Orang Osing Kasar maksudnya orang-orang Osing yang dalam berbahasa Osing, unsur-unsur bahasanya (kosa kata dan logat) sudah terpengaruh banyak oleh bahasa Jawa Jemberan, sehingga karakteristik khas bahasa Osing yang ada sudah agak berbeda dengan bahasa Osing Baku di Banyuwangi. Dalam masa dua generasi ke depan, bahasa Osing Kasar ini akan punah dan terasimilasi ke dalam bahasa Jawa Jemberan. Akibat lanjutnya, komunitas Osing pun akan punah, sebagaimana sudah terjadi pada orang-orang Osing yang bermukim di Kampung Osing, suatu kawasan di depan Stasiun Kereta Api Kota Jember.

Kondisi seperti di atas, juga terjadi di Kabupaten Situbondo yang sekarang didominasi oleh etnik Madura. Ketika masa kolonial, suku bangsa Jawa, Melayu, dan Mandar pernah menjadi penduduk asli yang jumlahnya signifikan di Kabupaten Situbondo. Akan tetapi, migrasi orang-orang Madura dari Pamekasan-Sumenep ke daerah Situbondo telah mengubah perimbangan jumlah penduduk. Melalui proses sosial yang panjang akhirnya etnik Madura menjadi etnik dominan di Situbondo. Digunakannya bentuk-bentuk sapaan dan nama-nama Jawa bagi orang-orang Madura di Situbondo merupakan petunjuk bahwa pada masa lalu orang Jawa dan bahasanya telah mengambil peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Situbondo. Sekarang, kelompok-kelompok etnik minoritas yang masuk ke Situbondo akan berubah menjadi “orang Madura” karena terserap ke dalam kebudayaan dominan (*dominance culture*) Madura.

3.3 Variasi Bahasa

Variasi bahasa (*language variety*) atau disebut juga “ragam bahasa” dibagi menjadi dua, yaitu variasi bahasa yang terbentuk karena faktor internal bahasa (variasi internal atau variasi sistemik) dan ragam bahasa yang terbentuk karena faktor eksternal bahasa atau variasi eksternal (Nababan, 1984:13-17). Variasi internal adalah variasi bahasa yang terbentuk karena proses-proses gramatika (fonologis, morfologis, atau sintaktis) yang terjadi di dalam suatu bahasa. Proses-proses gramatika tersebut melahirkan kaidah-kaidah struktural bahasa yang menjadi penciri khas bahasa yang bersangkutan. Misalnya, dalam bidang fonologi bahasa Inggris, fonem /p/ jika didahului dengan /s/ dalam kata *speak*, tidak diucapkan dengan hembusan nafas yang kuat (“aspirasi”), sedangkan /p/ dalam kata *peak* dilafalkan dengan aspirasi [p^h]. Dalam bidang morfologi bahasa Indonesia, morfem /ber-/ memiliki variasi morfofonemis: /ber-/ , /bel-/ , dan /be-/ , jika diikuti dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem /m/ “bermalam”, /a/ “belajar”, dan /k/ “bekerja”. Di bidang sintaksis, suatu makna tertentu dapat diungkapkan dengan variasi struktur sintaktis yang berbeda, misalnya: “Besok pagi, Amir pergi ke Medan (Kw-S-P-Kt) atau Amir pergi ke Medan besok pagi (S-P-Kt-Kw)”. Variasi sintaktis ini akan lebih beragam jika dimasukkan variasi-variasi struktur bahasa Indonesia yang bersifat dialektis geografis. Variasi demikian disebut juga sebagai “variasi linguistik”.

Secara fungsional dan interaksional, variasi bahasa atau ragam bahasa (variasi eksternal) merupakan entitas bahasa yang terjadi karena keniscayaan sosial. Bahasa digunakan manusia dalam ranah sosial yang beragam dan bahasa tidak berada di dalam ruang hampa sosial. Sebagai salah satu produk kebudayaan, bahasa memiliki “keunikan” tersendiri. Keunikan tersebut terkait dengan

posisi dan fungsi strategis bahasa sebagai sarana interaksi sosial antarsesama dan penentu perkembangan kebudayaan manusia. Peran demikian tidak dimiliki oleh unsur-unsur kebudayaan yang lain.

Variasi bahasa terjadi pada tataran *parole*, yakni ketika bahasa itu diucapkan dalam interaksi sosial sehari-hari. Terbentuknya variasi bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor: penutur atau pelibat tutur dan latar belakang sosialnya, keperluan pemakaian bahasa, dan konteks-konteks yang menyertai tuturan. Faktor penutur dan latar belakang sosialnya mencakup aspek-aspek: kualitas tingkat hubungan sosial antarpemuter akrab atau berjarak, perbedaan stratifikasi sosial penutur, serta identitas dan status sosial penutur. Faktor keperluan pemakaian bahasa berkaitan dengan: pengembangan ilmu pengetahuan, kotbah keagamaan, transaksi ekonomi, pidato kenegaraan, peminangan gadis, rembug keluarga besar, rapat pembangunan desa, meminta bantuan/pertolongan, persidangan di lembaga peradilan, penyebaran informasi publik, dan sebagainya. Faktor konteks tuturan meliputi aspek-aspek: sarana tuturan berupa lisan atau tulis, suasana interaksi sosial yang bersifat formal atau informal, interaksi langsung atau tidak langsung melalui media komunikasi, dan topik yang dibicarakan bersifat penting atau biasa saja.

Secara umum, faktor-faktor tersebut merupakan aspek aspek bahasa yang bersifat sangat kompleks. Pilihan atas sebuah ragam bahasa sebagai media interaksi sosial sering menggambarkan manifestasi sekaligus dari ketiga faktor di atas. Misalnya, Amir berbicara dengan Rohim menggunakan bahasa Jawa *krama inggil* (tingkat tutur halus), sedangkan Rohim menggunakan ragam *ngoko* (tingkat tutur kasar/biasa). Dari posisi Amir sebagai penutur (dan latar belakangnya) dalam hubungan oposisional

dengan Rohim dapat diidentifikasi sebagai berikut: berjarak sosial/kurang akrab, kemampuan ekonominya rendah, dan orang biasa; dari aspek keperluan pemakaian bahasa adalah: meminta bantuan dana untuk pembangunan jalan kampung; dan konteks tuturan: bahasa lisan dengan interaksi langsung.

Penggunaan ragam *krama inggil* atau ragam apa pun selalu menyimpan motif-motif tindakan sosial, baik yang berorientasi pada kepentingan individu, maupun kelompok. Bagi Amir, penggunaan (pilihan ragam) bahasa *krama inggil* tidak sekedar sebagai bentuk penghormatan terhadap Rohim tetapi juga untuk memuluskan kemudahan memperoleh bantuan dana dari Rohim. Sebaliknya, bagi Rohim dengan menggunakan ragam ngoko kepada Amir dan ia benar-benar memberikan sumbangan dana pembangunan jalan, peristiwa tutur ini akan memperkuat posisi sosial Rohim sebagai “orang yang dihormati dan diperhitungkan” di lingkungannya. Keseluruhan peristiwa tutur tersebut bagi kedua belah pihak, yaitu Amir dan Rohim merupakan sarana pengesah (legitimasi) dari struktur sosial yang sudah terbangun (*status quo*) di lingkungan masyarakatnya. Karena itu, tata tingkat berbahasa dalam suatu masyarakat merupakan sarana budaya yang berkontribusi menjaga keteraturan sosial.

Ragam tingkat tutur dalam bahasa Jawa sangat kaya mencapai sekitar 13 ragam (Sudaryanto, 1989:98-101). Keragaman tingkat tutur tersebut berkaitan dengan kedudukan Yogyakarta sebagai pusat kraton Jawa yang ketat dalam memberlakukan etika sosial bagi masyarakatnya. Jika pada masa lalu, etika tingkat tutur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan warga masyarakatnya yang masih bersifat tradisional-agraris. Struktur sosial masyarakat agraris yang terkadang feodalistik sangat

adaptif terhadap stratifikasi sosial yang rumit. Akan tetapi, ketika suatu masyarakat bertransformasi menjadi masyarakat modern (pascatradisional) karena pembangunan dan kemajuan zaman, nilai-nilai etika sosial yang ada juga akan bergeser dan berubah. Masyarakat modern yang berbasis ekonomi pada sektor jasa dan perdagangan, yang kemudian diikuti dengan mobilisasi vertikal yang menjamah semua lapisan sosial, maka akan menampilkan wajah baru masyarakat yang lebih egaliter, toleran, dan demokratis. Situasi sosial yang demikian tidak akan mengakrabi etika sosial yang rumit dan feodalistik, sehingga tingkat tutur bahasa yang rumit akan berubah menjadi lebih sederhana.

Ragam bahasa timbul ketika bahasa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ragam bahasa adalah konsekuensi dari kompleksitas dialektika unsur-unsur kehidupan masyarakat. Ciri-ciri lingual suatu ragam bahasa dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri sosial masyarakat penuturnya. Sebagai contoh adalah ragam bahasa jurnalistik, yang dipakai dalam kegiatan kewartawanan dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas, baik melalui media cetak, maupun elektronik. Ciri-ciri lingual ragam bahasa jurnalistik adalah: lugas, tepat makna, hemat kata, faktual-deno-tatif, menarik perhatian, dan struktur kalimat sederhana-cermat (Chaer, 2010a:49-93).

Ciri-ciri lingual ragam jurnalistik di atas terkait dengan ciri-ciri sosial pembaca media massa, yaitu: efisien waktu baca, mudah memahami, dan informasi yang diperoleh bersifat padat-berisi. Pembaca surat kabar/majalah berasal dari kelas menengah ke atas, dengan tingkat kesibukan yang tinggi, mereka hanya memiliki waktu yang terbatas untuk membaca surat kabar. Mereka lebih mengutamakan berita-berita yang penting atau terkait dengan profesinya, mudah dipahami, dan sarat informasi.

Karena kebutuhan pembaca yang demikian, bahasa dan materi tulisan berita harus diselaraskan dengan kepentingan mereka. Apabila hal ini diabaikan oleh para pengelola surat kabar/majalah, sehingga materi dan bahasa berita ditulis sembarangan, pembaca akan mencari surat kabar lain yang lebih baik.

Dari segi penutur dan latar belakang sosial budayanya, serta pemanfaatannya, ragam bahasa memiliki hubungan erat dengan identitas komunitas. Bahasa menjadi salah satu penanda identitas budaya komunitas atau komunitas tutur (*speech community*). Misalnya, komunitas petani tradisional di pedesaan Jawa. Anggota-anggota komunitas memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa secara praktis dalam konteks berbagai kepentingan sosial. Praktek bahasa dalam setiap kepentingan dan konteks yang berbeda-beda akan menampilkan ciri-ciri lingual yang spesifik. Misalnya, komunitas nelayan yang tinggal dan hidup di sebuah desa dengan matapencaharian utama menangkap ikan laut. Ragam bahasa yang mereka gunakan akan berbeda dengan komunitas petani yang ada di desa tersebut. Di dalam komunitas nelayan, anggota-anggota komunitasnya juga akan mempraktekkan ragam bahasa yang berbeda jika mereka bertransaksi di pasar ikan, interaksi komunikatif dalam kegiatan menangkap ikan, atau belajar-mengajar mengaji di langgar. Jadi, ragam bahasa akan muncul dalam setiap arena sosial yang menjadi tempat berlangsungnya interaksi sosial.

Dalam studi etnografi komunikasi, pemahaman terhadap ragam bahasa, pesan yang dipertukarkan atau makna-makna yang menyertainya, serta konteks sosial-budaya yang menjadi ruang penggunaan ragam bahasa, sangat membantu pemaknaan interaksi komunikatif atau pola-pola percakapan yang terjadi. Dengan pemahaman yang baik diharapkan memberikan bekal

pengetahuan yang memadai bagi para etnografer untuk melaksanakan analisis interaksi komunikatif yang komprehensif terhadap ragam bahasa yang digunakan.

3.4 Struktur Sosial dan Pilihan Bahasa

Interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari merupakan rajutan yang menjadi basis keberadaan dan keberlanjutan hidup “masyarakat”. Bahasa dan unsur-unsur pendukungnya adalah salah satu sarana yang menjembatani anggota-anggota masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain. Dengan peranan tersebut, bahasa merupakan unsur budaya yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup entitas masyarakat. Siklus demikian akan berlangsung secara terus-menerus sepanjang “eksistensi masyarakat” tetap ada.

Interaksi antarwarga masyarakat dapat terjadi dalam berbagai ruang sosial, ranah/ arena sosial, atau situasi sosial. Setiap warga masyarakat adalah makhluk yang dinamis. Dalam interaksinya dengan dunia di sekitarnya, ia dapat memasuki berbagai situasi interaksi sosial setiap hari. Dorongan memasuki bermacam-macam situasi sosial tersebut untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Konsekuensinya, ia mengalami perubahan posisi sosial dan peranannya dalam berbagai situasi sosial tersebut. Perubahan tersebut berimplikasi pada perubahan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh individu-individu ketika harus berpindah-pindah dari satu situasi sosial ke situasi sosial yang lain. Misalnya, Amin yang sudah berumah tangga berposisi sebagai suami dan kepala keluarga dengan hak dan kewajiban tertentu. Ketika di kantor, Amin adalah birokrat rendahan yang harus tunduk oleh perintah atasannya. Di masyarakat, Amin adalah seorang ustad yang sering memberi

ceramah keagamaan kepada warga masyarakat, sehingga ia sangat dimormati. Hak dan kewajiban Amin di kantor atau sebagai tokoh masyarakat sangat berbeda dengan posisinya sebagai kepala keluarga. Perubahan posisi dan peranan sosial, serta hak dan kewajiban dalam sistem interaksi sosial Amin akan terus berubah-ubah jika ia memasuki berbagai ruang sosial.

Uraian di atas untuk menggambarkan dinamika individu dalam arena sosial atau situasi sosial yang berbeda, yang kemudian membentuk suatu struktur sosial. Dalam hal ini, struktur sosial diartikan sebagai pola-pola tentang hak dan kewajiban para pelaku dalam suatu sistem interaksi yang terwujud dari rangkaian hubungan sosial yang relatif stabil dalam suatu jangka waktu tertentu. Pengertian hak dan kewajiban para pelaku dikaitkan dengan masing-masing status (posisi) dan peranan sosial para pelaku. Status dan peranan bersumber pada sistem penggolongan yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, dan yang berlaku menurut masing-masing pranata dan situasi-situasi sosial di mana interaksi sosial itu terwujud (Suparlan, 1986:90). Struktur sosial dapat ditemukan dalam berbagai arena sosial atau pranata sosial masyarakat.

Dalam setiap arena dan situasi sosial yang dimasuki oleh individu, pengaturan status dan peranan sosial, hak dan kewajibannya didasarkan pada sistem norma yang berlaku di masyarakat dan di arena sosial tersebut. Sistem norma akan mengikat dan mendasari perilaku kebahasaan individu-individu yang berinteraksi sosial dalam suatu arena atau situasi sosial tertentu. Jika pada jam 07.00, seorang individu berada di keluarga, pukul 08.00 sudah masuk kantor pemerintah, dan pukul 15.00 menjadi pelatih sepak bola, maka telah terikat oleh sistem normatif struktur sosial di ketiga ranah tersebut dengan status

dan peranan sosial, hak dan kewajiban yang berbeda. Ketiga situasi sosial menghadirkan struktur-struktur sosial yang berbeda. Setiap orang telah belajar dari pengalaman orang-orang lain agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial baru, yang dimasukinya. Jika gagal beradaptasi, seseorang akan menghadapi kesulitan berinteraksi untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya atau terkucilkan secara sosial (*social exclusion*).

Sebagaimana uraian di atas, perubahan arena sosial yang dimasuki oleh individu membawa implikasi pada perubahan status dan peranan orang-orang yang ada di dalamnya. Perubahan demikian berpengaruh terhadap pola-pola berbahasa yang terjadi di antara mereka. Pola-pola berbahasa yang berbeda karena tuntutan penyesuaian terhadap arena sosial yang berbeda ditandai juga oleh perubahan norma-norma berbahasa, variasi bahasa, atau pilihan bahasa. Dalam setiap arena sosial tersebut berlaku aturan-aturan berbahasa yang berbeda-beda. Artinya, dalam aktivitas berbahasa pada setiap struktur sosial akan ditandai pula oleh pemakaian bentuk-bentuk lingual, pola-pola berbahasa, dan norma berbahasa tertentu. Dalam studi etnografi komunikasi, pemahaman terhadap hal-hal tersebut secara komprehensif sangat diperlukan khususnya untuk kepentingan analisis data-data percakapan. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang struktur sosial dan hal-hal lain yang terkait, merupakan pengetahuan dasariah yang sangat penting serta harus dikuasai dan dimengerti oleh seorang etnografer komunikasi.

Untuk memperjelas terjadinya perubahan norma-norma berbahasa, variasi bahasa, dan pilihan bahasa karena individu-individu memasuki struktur sosial yang berbeda-beda bisa kita lihat pada kasus interaksi komunikatif di ranah keluarga, pasar tradisional, dan di kampus (perguruan tinggi). Kita ambil contoh

perilaku bahasa seorang individu bernama Anjani (20 tahun), yang berstatus sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, dan mahasiswi Universitas Jember. Di keluarganya, Anjani adalah anak yang baik dan terdidik dalam kesantunan etika Jawa. Orangtuanya mendidik Anjani dan adik-adiknya dalam suasana yang terbuka, normatif, dan egaliter. Meskipun dalam suasana kehidupan keluarga yang relatif “demokratis”, Anjani tetap menerapkan pola-pola perilaku berbahasa yang santun kepada orangtuanya, meskipun yang dipilihnya adalah variasi bahasa “ngoko”. Etika Jawa tetap menjadi standar normatif dalam berinteraksi dengan keluarganya. Penggunaan variasi tingkat tutur “krama” atau variasi bahasa Indonesia informal sangat jarang dilakukan ketika berkomunikasi dengan orangtuanya.

Selain dalam kehidupan keluarga, Anjani sering pada pagi hari diminta oleh ibunya berbelanja barang-barang konsumsi di pasar tradisional. Ia memasuki ranah sosial dan struktur sosial yang berbeda dengan keluarga. Status dan peranan sosial Anjani dalam transaksi ekonomi di pasar tradisional berubah. Ia berstatus sebagai pembeli yang harus berhadapan dengan penjual ketika melakukan transaksi suatu barang. Selama bertransaksi hingga terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan dalam jual-beli barang, Anjani terikat oleh aturan-aturan berbahasa yang berlaku. Biasanya, ia menggunakan variasi bahasa Jawa “krama” atau variasi bahasa Indonesia informal dalam berinteraksi dengan penjual barang. Anjani merasa kurang akrab dengan penjual yang rata-rata usianya lebih tua dari Anjani, sehingga ia tidak menggunakan bahasa Jawa “ngoko”. Pola-pola berbahasa yang diterapkan oleh Anjani karena situasi sosial yang mempengaruhi timbulnya tuturan tersebut berbeda dengan yang terjadi di keluarganya.

Ketika Anjani sedang mengikuti perkuliahan dan berada di lingkungan kampus perguruan tinggi, ia memasuki arena sosial yang berbeda dengan di keluarga dan pasar tradisional. Di kampus, status Anjani adalah “mahasiswa” dengan peran sosial yang sesuai hak dan kewajibannya. Status sosial dan peranan ini sangat berbeda dengan status di keluarga sebagai “anak” atau di pasar tradisional sebagai “pembeli”. Karena harus mengikuti perkuliahan dalam suasana formal, Anjani sering menggunakan variasi bahasa Indonesia standar. Di kelas, ia adalah mahasiswa yang harus berhadapan dengan seorang dosen. Ketika di luar kelas, Anjani bergaul dengan sesama mahasiswa dalam posisi setara dan sering menggunakan bahasa Indonesia ragam informal dan variasi bahasa Jawa “ngoko” untuk menjaga nilai keintelektualan dan kebersamaan dengan para mahasiswa yang lain. Pilihan bahasa (*language choice*) dan pola-pola berbahasa demikian bersifat situasional dengan kondisi lingkungan akademis, tempat Anjani menempuh pendidikan tinggi.

Dalam proses interaksi sosial tersebut, pilihan bahasa dapat berupa penggunaan suatu bahasa atau variasi secara penuh dan dalam bentuk alih kode (*code switching*) yang sempurna, serta bukan dalam bentuk campur kode atau *code mixing* (Sumarsono dan Partana, 2004:200-204). Pilihan bahasa adalah tindakan memilih salah satu di antara bahasa-bahasa yang ada untuk kepentingan interaksi sosial berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus, sehingga proses komunikasi berlangsung efektif dan efisien. Karena itu, pilihan bahasa akan terjadi dalam masyarakat yang multibahasa, baik dalam pengertian kode (bahasa) maupun variasi/ragam bahasa. Dalam pengertian kode bahasa, konteks masyarakat yang mendasarinya adalah masyarakat bilingual atau multilingual. Artinya, dalam interaksi sosial

antarwarga masyarakat tersebut, beberapa bahasa yang berbeda dipergunakan dalam fungsi-fungsi yang berbeda pula. Dalam pengertian variasi bahasa, konteks masyarakat yang mendasarinya adalah bahwa masyarakat yang bersangkutan memahami adanya beberapa variasi dalam satu bahasa sesuai dengan kebutuhan penggunaannya dan karakteristik sosial-budaya masyarakat yang memilihnya.

Berdasarkan uraian di atas faktor utama yang menyebabkan terjadi tindak pilihan bahasa atau variasi bahasa dalam interaksi masyarakat bilingual atau multilingual adalah arena sosial dan struktur sosial yang menjadi tempat dan referensi interaksi sosial. Faktor-faktor yang lain adalah karakteristik tujuan interaksi, kualitas hibungan antarpelaku interaksi, dan suasana interaksi. Faktor-faktor tersebut sering bersinergi dan bukan faktor tunggal yang mendominasi atas timbulnya praktek pilihan bahasa. Dalam penelitian etnografi komunikasi, seorang etnografer harus dapat memahami faktor-faktor kontributif yang mendasari keputusan individu melakukan tindakan pilihan bahasa ketika berinteraksi sosial dengan pihak lainnya. Pada dasarnya, pilihan bahasa dimaksudkan untuk menciptakan interaksi sosial yang komunikatif. Dalam masyarakat bilingual atau multilingual, gejala pilihan bahasa merupakan hal yang wajar dan senantiasa terjadi sampai kapan pun.

BAB IV

RUANG SOSIAL KOMUNIKASI

4.1 Pranata: Ruang Interaksi Sosial

Pada dasarnya manusia adalah makhluk bernalar yang ber-sifat sosial. Sebagai makhluk bernalar, manusia memiliki kemampuan berkreasi untuk menciptakan kebudayaan yang dapat membantu dirinya mengatasi berbagai keterbatasan yang dibawanya sejak lahir dan melakoni kehidupan di dunia bersama orang-orang lain. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia tidak dapat “berdikari” mengatasi semua hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Ia membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang-orang lain di lingkungannya. Kebudayaan yang diciptakan manusia merupakan perangkat atau sarana untuk beradaptasi dan berinteraksi sosial antarsesama dalam rangka memenuhi kebutuhan individual atau kepentingan bersama.

Pranata (*institution*) atau lembaga (*institute*) merupakan salah satu unsur kebudayaan yang diciptakan oleh manusia untuk menopang kelangsungan hidup dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Secara antropologis, pranata didefinisikan sebagai sistem norma yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat; sedangkan lembaga adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas (pranata) tersebut (Koentjaraningrat, 2009:133-135). Misalnya, Universitas Jember merupakan lembaga/badan/organisasi yang menyelenggarakan kegiatan (pranata) pendidikan tinggi.

Nilai penting dari fungsi institusi sosial adalah (a) memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah sosial, terutama yang menyangkut upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia; (b) menjaga keteraturan dan integrasi sosial; dan (c) memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yakni pengawasan terhadap perilaku anggota-anggota masyarakat. Apabila kita akan mempelajari suatu kebudayaan masyarakat, pemahaman terhadap fungsi-fungsi dari institusi-institusi sosial yang ada pada masyarakat tersebut sangat penting (Soekanto, 2007:173).

Unsur terpenting dalam suatu pranata adalah stabilitas dan pelembagaan (*institutionalized*) norma-norma sosial yang dimilikinya. Suatu norma kita anggap telah melembaga, jika norma tersebut diketahui, dipahami/dimengerti, ditaati implementasinya, dan dihargai atau dihormati secara sosial (Soekanto, 2007:177). Pelanggaran terhadap sistem normatif yang sudah mapan ini akan menjadikan seseorang mendapat sanksi sosial atau sanksi

hukum sesuai dengan konvensi yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Jika suatu pranata memperoleh perhatian dan pembelaan yang serius dari masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa pranata itu benar-benar memberi manfaat yang besar dalam kehidupan masyarakatnya. Sikap masyarakat yang demikian akan menjamin suatu pranata bertahan dalam jangka panjang untuk melayani kebutuhan warga masyarakat.

Para ahli sosiologi dan antropologi sosial mengelompokkan berbagai jenis pranata menjadi delapan, yaitu: (1) pranata kekerabatan dan domestik, seperti perkawinan, pengasuhan anak, dan pembagian harta waris; (2) pranata ekonomi, seperti koperasi simpan-pinjam, toko serba ada, dan jual-beli di pasar tradisional; (3) pranata pendidikan, seperti pendidikan tinggi, diklat pemberdayaan, penataran Pancasila; dan pendidikan anti radikalisme agama; (4) pranata (pengetahuan) keilmiahan, seperti metodologi ilmiah, aktivitas penelitian lapangan, dan seminar hasil riset; (5) pranata estetika dan rekreasi, seperti seni lukis, seni peran, olahraga, dan wisata arsitektur; (6) pranata religius, seperti kenduri, slametan bersih desa, mantra, dan ilmu perdukunan; (7) pranata politik, seperti partai politik, demokrasi, dan eksekutif (pemerintah); dan (8) pranata somatik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan fisik dan kenyamanan hidup manusia, seperti praktek dokter, salon kecantikan, dan senam kebugaran (Koentjaraningrat, 2009:135-136). Penggolongan delapan pranata ini tidak menutup kemungkinan masih belum mencakup jenis-jenis pranata yang lain, seperti pranata komunikasi massa yang terdiri atas pers, telepon atau *hand phone*, dan media sosial.

Banyak sedikitnya pranata dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi tahap perkembangan, tingkat kemajuan, dan kebutuhan masyarakat tersebut. Pada masyarakat tradisional

dan homogen jumlah pranata sangat terbatas jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat perkotaan yang sudah modern. Ketika suatu masyarakat sudah berkembang pada tahap yang kompleks, jumlah pranata yang dimiliki juga sangat beragam. Artinya, keragaman pranata merupakan cerminan dari kekompleksan masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pranata juga ikut berkembang. Jika pada tahun 1990-an, kita belum mengenal pranata *mini market*, yakni *Indomaret* dan *Alfamart* atau penjualan daring sekarang pranata seperti ini sudah menjamur.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang akan memasuki sejumlah pranata sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena kewajiban yang harus dijalaninya. Seorang ibu rumah tangga sejak bangun tidur pada pagi hari hingga tidur malam untuk istirahat, ia telah memasuki berbagai jenis pranata sosial. Setelah bangun tidur dan memberesi urusan rumah tangga (pranata domestik), ia pergi ke pasar tradisional untuk belanja kebutuhan konsumsi hari itu (pranata ekonomi) dan memasaknya. Setelah itu, ia mengikuti kegiatan kursus menjahit (pranata pendidikan) sampai siang hari dan sore hari, memandikan anak-anaknya (pranata domestik). Pada malam hari, ia mengikuti pengajian rutin “salawatan” (pranata religius) dan berakhir ketika akan istirahat malam. Hidup manusia setiap hari adalah melintas di antara beragam pranata sosial sebagai konsekuensi atas jati dirinya sebagai manusia kreatif, makhluk sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam.

Di dalam suatu pranata senantiasa terdapat aktivitas interaksi sosial antarindividu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Pranata adalah ruang sosial untuk berinteraksi. Sebagai contoh, A berbelanja di suatu toko (prancangan) yang

menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari di Kampung Tegal Boto. A mendatangi sebuah toko kebutuhan pokok (pracangan) milik B. A dan B terlibat tawar-menawar tentang harga barang yang akan dibeli. Setelah keduanya sepakat atas harga barang, A memberikan uang pembelian kepada B dan B menyerahkan barang yang dibeli kepada A. Interaksi sosial merupakan cara untuk mencapai pertukaran sumber daya (uang dan barang) antara A dan B atas dasar kesepakatan. Sistem interaksi sosial dan norma yang mengaturnya sudah sangat mantap dan dijalankan oleh siapa saja yang akan berbelanja di toko B tersebut.

Norma-norma berbelanja atau bertransaksi di toko tersebut memiliki daya ikat yang kuat bagi warga masyarakat yang akan membeli barang kebutuhan pokok. Norma-norma itu akan menjamin warga memperoleh pasokan kebutuhan barang dari toko secara berkelanjutan. Jika norma-norma jual-beli dilanggar oleh salah satu pihak, seperti pembeli C tidak melunasi utang pembayaran atau sengaja mengemplang utangnya, maka yang rugi adalah pemilik toko B dan pembeli tersebut. Pemilik toko akan kesulitan memutar roda usahanya karena modalnya berkurang dan C tidak dapat lagi berbelanja di toko tersebut karena mentalnya tidak dapat dipercaya. Apabila sampai terjadi toko tersebut tutup karena banyak pembeli yang lain tidak melunasi utang-utangnya, maka yang dirugikan adalah semua warga yang bergantung pemenuhan kebutuhan hidupnya dari toko B tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat di kampung-kampung, baik di pedesaan, maupun perkotaan, sering kita temukan toko/warung yang semula ramai dan berkembang, kemudian mundur, bangkrut, dan tutup. Setelah diselidiki ternyata kebangkrutan tersebut terjadi karena banyak pembeli atau pelanggan yang memiliki banyak utang kepada pemilik toko/warung dan tidak

membayar sesuai aturan sosial yang berlaku. Modal usaha pemilik warung berpindah ke pembeli yang mengemplang utang. Akibatnya, merugikan pemilik toko/warung karena ia tidak dapat melanjutkan usahanya. Pembeli yang bermental “pengemplang” ini telah mendistorsi nilai-nilai kejujuran, kerja sama (ekonomi), dan kebersamaan (saling membantu) dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak banyak dari pembeli pengemplang ini yang merasa malu atas perilakunya yang demikian, tetapi terkadang sering kita temukan mereka itu bersikap *ndablek*, *nggak mau tau*, atau *abai sosial* seperti tidak terjadi apa-apa.

Dalam aktivitas interaksi sosial di suatu pranata, apalagi jika interaksi tersebut berkaitan dengan transaksi barang, jasa, uang, atau utang-piutang, maka dimensi kultural yang menjadi “penjamin” keberlanjutan interaksi dan kerja sama sosial tersebut adalah “kejujuran” atau *trust*. Jika ketidakjujuran terjadi pada salah satu pihak atau kedua pihak, hal ini akan merugikan salah satu atau kedua pihak dan mungkin akan berimplikasi akibatnya pada banyak orang. Karena itu, dalam suatu masyarakat yang semakin kompleks perkembangannya, semakin menguatnya gaya hidup borjuis bersemayam dalam hati sanubari setiap manusia, dan ketika agama atau etika sosial berkurang “otoritasnya” mengendalikan jiwa-jiwa materialistik-kapitalistik, “kejujuran” merupakan barang yang langka dan mahal harganya. Ketidakjujuran dalam hal apa saja dapat melanda siapa pun, termasuk kalangan kaum cerdas pandai di lingkungan dunia pendidikan atau kaum religius di lembaga keagamaan.

Selain dimensi kejujuran, upaya menjaga keberlangsungan hidup suatu pranata harus memperhatikan “tanggung jawab sosial” setiap individu. Banyak pranata dalam bentuk kearifan lokal yang kemudian harus hilang dari kehidupan masyarakat

karena sebagian warga masyarakat tidak memiliki tanggung jawab sosial terhadap keberlanjutan pranata. Ketiadaan tanggung jawab sosial tersebut biasanya disebabkan oleh sikap egoisme karena menganggap pranata sebagai penghambat akses keserakahan mereka terhadap sumber daya. Meskipun jumlah mereka kecil, tetapi jika memiliki kemampuan sumber daya sosial, ekonomi, dan politik yang berlebih, mereka akan mampu menggusur suatu pranata sosial, yang sejatinya pranata tersebut sangat dibutuhkan dan telah memberi manfaat nyata bagi kelangsungan hidup banyak orang. Kehancuran dan kepunahan suatu pranata merupakan tindakan mengubur salah satu ruang interaksi sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat, sehingga dapat mengganggu sebagian pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

4.2 Kesantunan Berbahasa

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu terlibat dalam interaksi sosial dengan siapa pun sesuai dengan kepentingan yang akan dicapainya. Interaksi sosial tersebut tidak hanya dalam konteks mendekatkan diri secara fisik antarindividu tetapi juga mempergunakan sarana bahasa sebagai penyampai maksud dan informasi yang dipandang perlu, bekerja sama, dan mempererat relasi sosial. Bahasa menjadi tulang-punggung agar interaksi sosial atau komunikasi lintas individu berlangsung secara efektif, optimal, produktif, dan respektif. Maksud interaksi sosial kebahasaan secara efektif adalah tepat maksud dan informasi dalam pikiran partisipan; optimal berarti informasi yang disampaikan dan diterima partisipan lengkap dan utuh; produktif artinya bahwa bahasa itu mampu menghasilkan banyak gagasan dan informasi; dan respektif berarti interaksi sosial tersebut berlangsung dalam suasana saling menghargai di antara partisipan (pihak-pihak yang terlibat interaksi sosial).

Ciri respektif dalam interaksi sosial kebahasaan di atas berkaitan erat dengan etika atau kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa tidak hanya ditandai oleh pilihan simbol, kata, atau ungkapan yang digunakan, tetapi juga didasari oleh maksud hati yang baik atau jiwa-jiwa yang berprasangka positif. Kesantunan berbahasa yang demikian dapat membangun sikap, pikiran, atau tindakan yang bisa dipercaya oleh partisipan. Kesantunan berbahasa merupakan sarana yang mampu menciptakan kerja sama yang baik di antara partisipan. Dalam banyak aspek, kesantunan berbahasa berakar pada sistem nilai, norma, atau etika sosial yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pemilik bahasa. Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Tindakan berbahasa merupakan salah satu contoh dari praktek budaya. Jika orang Jawa bertutur sapa dengan orang Jawa lainnya, ia sedang mempraktekkan budaya Jawa. Artinya, bahasa yang dipraktekkan orang Jawa adalah sebagian dari manifestasi budaya Jawa.

Standar nilai kesantunan dalam berbahasa harus diukur berdasarkan parameter budaya yang dimiliki partisipan. Kita tidak mungkin mengukur kesantunan berbahasa masyarakat Madura berdasarkan kriteria kebudayaan Jawa atau sebaliknya, karena hal demikian termasuk etnosentrisme yang harus dihindari dalam interaksi sosial masyarakat majemuk. Jika seseorang melakukan tindak berbahasa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianutnya, seperti menggunakan ungkapan-ungkapan yang kasar, tidak sopan, dan diujarkan dengan suara keras-keras, berarti ada hal-hal yang menyebabkannya, seperti karena suasana hati yang sedang marah atau jengkel, tidak pernah belajar etika dan salah pergaulan, serta karena baru belajar bahasa yang diujarkan tersebut sebagai bahasa kedua atau ketiga. Ketiga hal itu berpotensi menimbulkan ketidaksantunan dalam berbahasa.

Bagi warga yang “normal pikirannya” (*waras*), ia mesti mengikuti aturan-aturan kebudayaan yang direferensinya meskipun dalam kesederhanaan. Ada sikap preventif yang selalu dijaga oleh setiap orang yang merasa memiliki budaya, yaitu jangan sampai orang lain menilai “saru” atas ungkapan berbahasa yang diujarkannya. Penilaian “saru” tersebut tidak hanya mereferensi pada “ujaran berbahasanya”, tetapi juga identitas dan martabatnya sebagai manusia yang tidak berbudaya. Dalam masyarakat Jawa dikenal ungkapan “nggak njawani” untuk mereferensi orang-orang Jawa yang tidak mempraktekkan nilai-nilai kejawaan sebagaimana mestinya dalam berperilaku atau berbahasa. Contoh sikap “gak njawani” tersebut sebagai berikut: orang Jawa yang berusia 20-an tahun memilih dan menggunakan ragam bahasa Jawa ngoko ketika bercakap-cakap dengan orang yang sudah tua berusia 50-an tahun, padahal keduanya baru kenal ketika berpergian naik kereta dan duduk berhadapan.

Gejala lain yang pernah disaksikan oleh penulis adalah ketidaksantunan berbahasa murid-murid kelas tiga di suatu sekolah dasar di Kota Jember yang bercakap-cakap menggunakan bahasa Jawa *ngoko* dengan salah seorang guru olah raga ketika pelajaran olah raga berlangsung di luar kelas. Guru juga melayani dengan baik perbincangan dengan murid-muridnya itu. Pada umumnya, anak-anak sekolah di Kota Jember jarang (mungkin tidak pernah) diajari ragam bahasa Jawa krama oleh orang tuanya di rumah dan ragam tersebut harus digunakan jika berbicara dengan orang-orang tua, orang yang dihormati, atau orang yang baru dikenalnya. Kebanyakan orang tua mengajari anak-anaknya agar mampu berbahasa Indonesia, sehingga bahasa daerah diabaikan. Selain itu, di sekolah mungkin anak-anak tidak diberi tahu tentang situasi-situasi sosial yang mengharuskan anak-anak

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti ketika pelajaran olah raga berlangsung. Karena ketidaktahuan etika, norma, dan konteks situasional penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, murid-murid kelas empat di sebuah sekolah dasar di Kota Jember berbahasa Jawa *ngoko* dengan gurugurunya. Artinya, kekurangantun berbahasa murid-murid tersebut karena ketidaktahuan dan kekurangmampuan berbahasa secara tepat sesuai dengan konteks situasional. Karena berbahasa mencerminkan nilai-nilai budaya dan kepribadian seseorang, sebaiknya pengajaran dan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang baik dan benar harus dilakukan.

Kesantunan berbahasa tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan kata (diksi), ungkapan, simbol bahasa, dan intonasi ujaran, tetapi juga harus memperhatikan kualitas relasi sosial antartpartisipasi, hubungan subjek-objek, kemitraan dan kebersamaan, atau sAminng menghargai. Kita perhatikan ujaran kalimat-kalimat di bawah ini, yang memohon nasabah bank tidak merokok di ruang tunggu pelayanan.

1. Pak, dilarang merokok di ruang ini, bandel nih!
2. Dilarang merokok di ruang ini Pak, tuh aturannya!
3. Mohon dengan hormat Pak jangan merokok di ruang ini!
4. Mohon maaf Pak, rokoknya dimatikan dulu karena ruangan ini ber-AC!
5. Mohon perkenan Pak tidak merokok di ruangan ini untuk menjaga kenyamanan bersama!

Kalimat 1-2 tergolong kalimat yang kurang santun karena diksi yang kurang baik dan menempatkan nasabah dalam posisi “objek” yang dipersalahkan. Kalimat 3 merupakan kalimat yang agak santun karena mengajak nasabah untuk mengerti peman-

faatan ruang publik. Kalimat 4-5 diksi dan struktur kalimatnya lebih luwes dan enak didengar nasabah, apalagi jika disampaikan dengan intonasi yang pelan. Selain itu, nasabah diletakkan dalam posisi “subjek” untuk memperoleh pemahaman bersama dengan petugas yang mengingatkan tentang pentingnya menjaga kenyamanan dan kebersamaan dengan nasabah-nasabah lain. Kalimat 4-5 tidak “terkesan mendesak” nasabah untuk menghentikan aktivitas merokoknya. Kalimat-kalimat yang bermakna “peringatan” jika disampaikan dalam struktur kalimat yang pendek, seperti “Dilarang merokok!” terkesan tegas tanpa kompromi, fokus pada objek, dan kasar jika dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang relatif panjang dengan menekankan pada aspek “pengertian bersama” seperti kalimat 4-5.

Kesantunan dalam berbahasa Indonesia ditentukan oleh diksi yang relevan, kinesik yang mendukung, intonasi yang datar dan merendah, serta tempo yang lambat atau sedang. Jika hal-hal ini tidak dipraktekkan dan terjadi hal yang sebaliknya, maka kesantunan berbahasa tidak akan terwujud. Meskipun bahasa tidak mengenal sistem tingkat tutur, beberapa bentuk lingual yang bersinonim memiliki tata tingkat makna, dari yang halus (santun) sampai dengan yang kasar (kurang santun). Misalnya, kata *korupsi* memiliki tingkat makna yang kasar daripada frase *menyalahgunakan wewenang*. Kadang kala, kesantunan berbahasa Indonesia ditandai dengan memasukkan unsur-unsur bahasa daerah ke dalam tuturan (*campur kode*), seperti dalam kalimat, “Apakah Bapak jadi *tindak* ke Surabaya hari ini?”. Dalam bahasa Jawa kata *tindak* adalah substitusi dari kata *pergi*.

Kesantunan dalam berbahasa Indonesia berbeda dengan sistem tingkat tutur yang biasanya ditemukan dalam bahasa daerah. Kesantunan berbahasa Indonesia tidak dikaitkan dengan

status penutur dalam sistem interaksi sosial, sedangkan sistem tingkat tutur merupakan bagian dan alat legitimasi sosial terhadap status dan peranan penutur dalam struktur sosial. Kesantunan berbahasa Indonesia berlaku secara umum untuk semua pelaku tutur. Aspek yang disebut sebagai “etika dan kesantunan bahasa” dalam sistem tingkat tutur sebenarnya bukanlah “hal yang utama” tetapi merupakan “implikasi” dari penggunaan tingkat tutur. Aspek terpenting dari penggunaan tingkat tutur adalah legitimasi sosial terhadap kompleksitas relasi-relasi kuasa dalam masyarakat, stratifikasi sosial, dan menggambarkan tingkat penguasaan sumber daya politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Sistem tingkat tutur juga menggambarkan relasi-relasi kuasa yang tidak adil dalam suatu komunitas tutur, seperti terjadi di sebuah lembaga pendidikan keagamaan tradisional.

Dalam kajiannya tentang kesantunan berbahasa, Chaer (2010b:109-113) mengajukan sejumlah prinsip yang harus dipenuhi dan dihindari agar ujaran yang diungkapkan mencerminkan kesantunan berbahasa. Tujuh norma-norma interaksi kebahasaan yang tidak boleh dilakukan oleh penutur terhadap lawan tutur karena dapat menyinggung perasaannya adalah sebagai berikut: (a) jangan memermalukan lawan tutur, (b) jangan menyombongkan diri, membanggakan diri, atau memuji diri di hadapan lawan tutur, (c) jangan menghina atau menjelek-jelekkan milik orang lain sehingga orang tersebut merasa tidak senang dan marah, (d) jangan menunjukkan perasaan senang terhadap misibah yang dialami orang lain, (e) jangan menyatakan ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan dengan lawan tutur, (f) jangan menggunakan kalimat langsung untuk menyuruh atau menolak suatu permintaan dari lawan tutur, dan (g) jangan memaksa lawan tutur untuk melakukan sesuatu.

Selain ketentuan normatif di atas, yang harus dilakukan oleh penutur untuk menciptakan kesantunan berbahasa adalah sebagai berikut: (a) buatlah lawan tutur merasa senang berbicara dengan Anda, (b) berilah pujian kepada lawan tutur, (c) tunjukkan persetujuan kepada lawan tutur, (d) bersikaplah rendah hati terhadap lawan tutur, (e) berilah simpati kepada lawan tutur, (f) gunakanlah diksi yang secara sosial-budaya terasa lebih santun, (g) gunakanlah kata sapaan dan kata ganti (pengganti kata ganti) yang sesuai dengan identitas sosial penutur dan lawan tutur, (h) pergunakanlah kata “maaf” jika harus menyebutkan kata-kata yang dianggap tabu (seperti menyebutkan alat kelamin, cacat tubuh pada seseorang, dan perbuatan buruk yang pernah dilakukan seseorang), (i) gunakanlah kalimat tidak langsung kepada lawan tutur jika penutur akan menyuruh atau meminta bantuan, (j) gunakanlah kalimat “berputar-putar” dalam menolak suatu suruhan, ajakan, atau permintaan, (k) gunakanlah kata “maaf” jika ada hal-hal yang kurang baik pada diri penutur disertai dengan penjelasan yang santun, dan (l) gunakanlah kata “mohon” untuk meminta bantuan/pertolongan kepada lawan tutur tanpa kesan memaksa. Norma-norma tuturan yang santun tersebut juga harus disertai dengan sikap dan perilaku yang santun ketika kita bercakap-cakap, seperti di antaranya: (a) memberikan perhatian penuh ketika lawan tutur berbicara, (b) jangan mudah menyela (menginterupsi) ketika lawan tutur sedang berbicara, serta (c) jangan memutus percakapan yang belum selesai, terus meninggalkan lawan tutur tanpa pemberitahuan yang jelas (Chaer, 2010b:113-119).

Kesantunan berbahasa juga ditandai dengan logika percakapan yang jelas dan logis, sehingga menghasilkan interaksi komunikatif yang efektif. Artinya, dalam pikiran setiap partisipan

harus memiliki pemahaman informasi yang sama sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada perselisihan sosial dan kegagalan kerja sama. Dalam hal ini, Grice (1975) memperkenalkan prinsip-prinsip (maksim) kerja sama yang harus dipenuhi oleh partisipan percakapan, yaitu maksim kuantitas (*maxim of quantity*), maksim kualitas (*maxim quality*), maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan maksim cara (*maxim of manner*). Masing-masing maksim akan diuraikan sebagai berikut (Chaer, 2010b:34-38).

1. Maksim kuantitas menghendaki setiap partisipan tutur memberikan kontribusi yang secukupnya saja atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan tutur, sehingga tidak berlebihan. Misalnya, Amin berkata, “Tadi pagi Pak pergi ke Surabaya”, bukan “Tadi pagi sebelum jam 8 Pak sudah pergi ke Surabaya”. Frase “sebelum jam 8” tidak diperlukan karena pengertian “pagi” sudah menunjuk waktu sebelum jam 10.
2. Maksim kualitas menghendaki agar setiap partisipan tutur mengatakan hal yang sebenarnya, sesuai dengan data dan fakta, tidak boleh memanipulasi kebenaran. Misalnya, Amin bertanya pada Asim, “Dimana ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan?”; Asim menjawab, “Makassar pak!”.
3. Maksim relevansi mengharuskan setiap partisipan tutur memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah atau subjek tuturan. Misalnya, Amin bertanya pada Asim, “Kamu makan apa? Ini ada rawon atau soto ayam...”; jawab Asim, “Soto ayam saja!”. Jika jawaban Asim demikian, “Apa tidak ada rokok gudang garam?”, jelas tidak ada relevansinya dengan pertanyaan Amin tersebut.
4. Maksim cara menghendaki partisipan tutur berbicara secara langsung, logis, tidak kabur, tidak ambigu (multiinterpretasi

makna), tidak berlebihan, dan runtut. Misalnya, Amin bertanya pada Asim, “Kamu suka baca buku apa? Novel atau buku ilmiah?”; Jawab Asim, “Buku ilmiah, untuk melatih berpikir logis.”. Kalau Asim menjawab demikian, “Gak mesti kadang saya baca novel, juga buku ilmiah. Dua-dua menyenangkan. Tapi saya sering baca buku-buku ilmiah di kampus dan kalau di sekolah buku novel” merupakan pelanggaran terhadap maksim cara, yakni maknanya kabur dan ambigu.

Jika terjadi pelanggaran dalam manifestasi maksim-maksim percakapan tersebut berarti ada faktor-faktor penyebab yang harus diungkapkan dan dijelaskan. Misalnya saja, percakapan antara penjual (A) dan pembeli (B) ikan laut di pasar tradisional sebagai bentuk dari pelanggaran maksim relevansi.

A : Ikannya mbak, ini masih segar.

B : Berapa bu, harga tongkol 1 kg?

A : Rp 20.000 saja mbak.

B : Gak boleh kurang bu, Rp 10.000

A : [menggelengkan kepala]

B : Rp 10.500 bu.

A : [menggelengkan kepala] Sembilan belas dah..

B : Rp 11.000 kalau boleh.

A : Suami sampean suruh tangkap ikan di laut!

[dengan nada dan mimik muka yang kurang bersahabat]

B : [tanpa pamit, pergi ke pedagang lain]

Aktivitas tawar-menawar sampai pada tindak tutur ke-8 masih bersifat relevan, tetapi pada tindak tutur ke-9 menjadi lain karena penjual ikan menjawab tawaran pembeli yang tuturannya tidak sesuai dengan harapan pembeli. Jika demikian, tuturan A

“Suami *sampian* suruh tangkap ikan di laut!” memiliki makna yang berbeda, yakni sebagai bentuk kekesalan A karena tawaran B menurut A terlalu murah, sehingga makna tuturan tersebut untuk menyindir B yang tidak tahu bagaimana sulitnya mencari ikan di laut. B meninggalkan A tanpa pamit pergi ke pedagang ikan yang lain dan sikap demikian mencerminkan kalau B kurang menyukai perkataan A. Meskipun sering terjadi dalam interaksi komunikatif sehari-hari, tuturan A tersebut menyalahi maksim relevansi sehingga tidak produktif untuk kepentingan transaksi ekonomi dan terkesan kurang santun berbahasa. Oleh sebab itu, jika dalam suatu interaksi kebahasaan terjadi pelanggaran terhadap maksim-maksim percakapan berarti ada “sesuatu hal” yang menjadi sebab terjadinya pelanggaran maksim-maksim percakapan.

Jika dalam interaksi percakapan tersebut digunakan kalimat-kalimat tidak langsung atau kalimat-kalimat simbolik dan masing-masing pelaku interaksi dapat memahami dengan baik maknanya, hal demikian tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap maksim-maksim kerja sama. Kegiatan interaksi sosial dari awal hingga akhir tetap lancar dan produktif. Apalagi, masing-masing pelaku tutur memiliki sistem budaya yang sama, sehingga memudahkan pemaknaan tuturan timbal-balik di antara mereka.

4.3 Komponen-komponen Komunikasi

Dalam kehidupan sehari-hari manusia terlibat pada beragam aktivitas yang memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial secara sengaja. Interaksi sosial tersebut melahirkan praktek komunikasi, yakni pertukaran simbol dan pesan untuk saling dipahami dan berbagi pengetahuan bersama. Dari aspek keterlibatan pelaku, komunikasi adalah interaksi sosial antara

individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antarkelompok, dan antara individu/kelompok dengan massa untuk berbagai keperluan hidup. Dari segi media penyaluran pesan, praktek komunikasi bersifat verbal dan verbal atau gabungan verbal-nonverbal. Dalam kajian komunikasi terdapat dua madzab pemahaman terhadap aktivitas komunikasi. Pertama, komunikasi diartikan sebagai transmisi pesan dan kedua, komunikasi sebagai aktivitas yang memproduksi dan mempertukarkan makna di antara individu-individu atau kelompok yang terlibat praktek komunikasi (Fiske, 2012: 2-4). Etnografi komunikasi lebih berkaitan dengan madzab yang kedua.

Perilaku, perbuatan, atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan manusia, ada yang harus melibatkan orang-orang lain dan ada pula yang hanya dilakukan seorang diri. Pertama, aktivitas yang bersifat komunikatif dan kedua, aktivitas nonkomunikatif (Suwito, 1983:11-13). Aktivitas yang dapat dilakukan sendiri (nonkomunikatif) terdapat dalam pernyataan berikut: (1) “Amin membaca koran *Kompas* setiap hari”. Aktivitas yang melibatkan orang lain untuk memberikan tanggapan dapat dilihat dalam pernyataan: (2) “Asmat mendiskusikan kenakalan para pejabat dengan Hasan”. Pada kalimat (1), Amin tidak membutuhkan teman bicara. Ia melakukan pekerjaan membaca tersebut untuk menyerap dan memahami sendiri informasi yang dalam surat kabar *Kompas*. Karena perbuatan Amin tersebut tidak memerlukan tanggapan/jawaban dari orang lain, aktivitas *nonkomunikatif*.

Sebaliknya, pada kalimat (2) terdapat dua pelaku interaksi sosial, yaitu Asmat sebagai komunikator dan Hasan sebagai komunikan, ada masalah yang dibicarakan, dan ada sarana yang digunakan. Masing-masing aspek ini berperan integratif untuk mendukung proses komunikasi dan interaksi sosial di antara

Asmat dan Hasan. Dalam peristiwa interaksi timbal-balik tersebut, pada suatu saat tertentu Asmat bertindak sebagai komunikator dan pada saat berikutnya Hasan sebagai komunikan. Hal yang sama juga akan dialami Hasan sebagai komunikator. Peranan yang bergantian dapat dilihat dalam percakapan timbal-balik di antara dua orang atau lebih. Tindakan timbal-balik yang dilakukan oleh Asmat dan Hasan termasuk aktivitas *komunikatif*. Sekurang-kurangnya, ciri-ciri yang menandai aktivitas komunikatif adalah, (1) pelaku interaksi paling sedikit 2 orang, (2) terjadi percakapan timbal-balik, (3) ada tujuan bersama atau individu yang akan dicapai, dan (4) didasari norma-norma sosial-budaya sebagai penutur bahasa yang digunakan. Ciri-ciri ini mempermudah mereka memahami makna perilaku komunikatif yang dilakukan. Diagram 1 menggambarkan perilaku komunikasi antarindividu (Harapan dan Ahmad, 2014:15).

Berdasarkan diagram 1, praktek komunikasi dimulai ketika sumber (komunikator) bermaksud untuk berinteraksi sosial dengan pihak lain, yaitu penerima (komunikan). Gagasan dalam pikiran komunikator diubah menjadi pesan melalui proses *encoding*, yaitu proses mengubah gagasan menjadi pesan dalam bentuk simbol-simbol yang umum berupa bahasa, tanda, gambar, dan seterusnya sehingga dapat dipahami oleh penerima. Pesan merupakan hal-hal yang bersifat verbal dan atau non-verbal yang mewakili pikiran, perasaan, keinginan, atau maksud komunikator. Saluran atau media (*channel*) adalah sarana/wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesan kepada penerima (*receiver*). Penerima adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Penerima pesan menafsirkan dan menerjemahkan seperangkat simbol yang diterimanya dari komunikator menjadi gagasan yang dapat dipahaminya. Proses

demikian disebut *decoding*. Efek (*effect*) adalah apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut (Harapan dan Ahmad, 2014:16).

Diagram 1. Proses Komunikasi Antarindividu

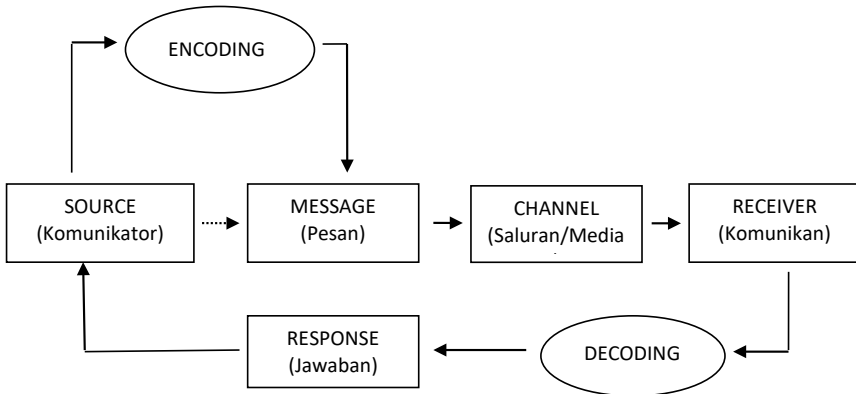


Diagram di atas menunjukkan unsur-unsur pokok dan “praktek dasar” dari aktivitas komunikasi. Menurut antropolog Dell Hymes yang juga ahli bahasa (Ibrahim, 1994:208-209; Chaer dan Agustina, 2004:47-49), praktek komunikasi dalam semua aktivitas masyarakat memiliki komponen-komponen yang lebih kompleks, lebih dari unsur-unsur yang membangun “praktek dasar” komunikasi seperti di atas. Komponen-komponen komunikasi dari suatu peristiwa komunikatif atau peristiwa tutur yang umum disingkat SPEAKING adalah sebagai berikut².

² Komponen-komponen komunikasi (*Speaking*) ini sering disebut juga sebagai *konteks*. Konteks mencakup konteks situasional dan konteks budaya. Konteks situasional meliputi unsur-unsur *setting and scene*, *participant*, *act sequences*, *key*, *instrumentalities*, dan *genre*; sedangkan konteks budaya meliputi *norm of social interaction* dan *norm of interpretation*. Unsur *ends* (*purpose* dan *goals*) sebenarnya tidak dapat dimasukkan ke dalam konteks karena unsur *ends* terkait dengan motif subjektif penutur/partisipan, yang ada di dalam diri penutur sedangkan konteks berada di luar diri penutur. Konteks disebut pula sebagai aspek objektif dari suatu peristiwa komunikatif. Kategorisasi yang dibuat Hymes tentang konteks tersebut tidak sesuai dengan sifat bidimensi (dimensi *subjektif*

PENGANTAR ETNOGRAFI KOMUNIKASI

1. *Setting and scene*. *Setting* adalah tempat dan waktu berlangsungnya suatu peristiwa komunikatif, sedangkan *scene* mengacu pada situasi tempat dan waktu yang mempengaruhi situasi psikologis perbincangan. Situasi fisik dan nonfisik dari lingkungan dan tempat terjadinya suatu peristiwa komunikatif akan berpengaruh terhadap karakteristik atau gaya komunikasi. Misalnya, *setting* dan *scene* peristiwa komunikatif di lapangan sepak bola dengan di rumah sakit jelas berbeda.
2. *Participant* adalah orang-orang yang terlibat dalam peristiwa komunikatif beserta identitas sosialnya, seperti jenis kelamin, asal etnik, status sosial, aliran politik, dan relasinya dengan partisipan yang lain.
3. *Ends (purpose and goal)* atau tujuan adalah sesuatu hal atau hasil yang akan dicapai setelah berakhirnya peristiwa komunikatif atau interaksi sosial antarpartisipan.
4. *Act Sequences* atau urutan tindak yaitu rangkaian tindak komunikatif atau tindak tutur yang dilakukan oleh para partisipan dalam suatu peristiwa tutur mulai dari awal hingga berakhirnya peristiwa komunikatif tersebut.
5. *Key (tone or spirit of act)* adalah nada suara, gerak tubuh, dan isyarat ketika berujar, seperti keras atau datar dalam interaksi sosial serta cara-cara mengungkapkan gagasan kepada lawan tutur, seperti dengan serius, mengejek, sarkastik, sombong, atau lucu.

dan *objektif*) dari data penelitian kualitatif fenomenologis atau dengan perspektif Max Weber tentang makna subjektif dari suatu tindakan sosial. Revisi terhadap pemikiran Hymes dipandang perlu untuk menempatkan kembali subjek sebagai pembentuk realitas sosial melalui tindakan komunikatif yang diperbuatnya. Kategori *Speaking* yang dibuat oleh Hymes telah menegaskan posisi subjek dalam interaksi komunikatif. Hal inilah yang merupakan kelemahan mendasar dari pemikiran Hymes tentang *Speaking*.

6. *Instrumentalities* berkaitan dengan sarana atau kode yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada partisipan, seperti dengan bahasa lisan atau bahasa tulis, gambar, atau tanda-tanda, serta jenis ragamnya, seperti dialek atau register.
7. *Norms of Interaction and Interpretation*. *Norms of Interaction* adalah norma-norma yang mengatur pergantian melakukan tindak tutur di antara para partisipan dalam suatu peristiwa komunikatif. Biasanya dalam masyarakat lokal atau masyarakat tradisional pengaturan interaksi sosial ini didasarkan nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, dalam suatu peristiwa tutur memberikan kesempatan menyampaikan pendapat kepada partisipan yang dianggap lebih tua usianya, daripada partisipan generasi yang lebih muda atau kaum perempuan. *Norms of Interpretation* adalah norma-norma penafsiran terhadap makna tuturan, sikap bertutur, dan nada tuturan yang bersumber dari nilai-nilai budaya yang dimiliki secara bersama oleh para partisipan peristiwa komunikatif. Norma interpretasi merupakan pengetahuan umum warga yang dapat digunakan untuk memahami makna-makna tindak tutur atau tindak komunikatif. Misalnya, ujaran tidak langsung bermakna ketidaksetujuan seseorang kepada pendapat orang lain; ujaran yang keras dan jelas bermakna ketegasan atau kesungguhan penutur dalam mempertahankan kebenaran pendapatnya; dan ujaran kritik terhadap seseorang yang dilakukan di depan publik bermakna penghinaan terhadap harga diri orang lain.
8. *Genre* atau tipe peristiwa komunikatif, seperti lelucon, cerita, ceramah, puisi, salam, perkuliahan, atau tindak percakapan timbal-balik.

Menurut Hymes, suatu interaksi sosial antarindividu atau antara individu dan kelompok dapat disebut sebagai “suatu peristiwa komunikatif” jika dalam interaksi sosial tersebut terkandung komponen-komponen komunikasi di atas. Analisis terhadap suatu peristiwa komunikatif dimulai dengan mendeskripsikan komponen-komponen yang membentuknya dan berakhir dengan memformulasikan makna-makna yang terkandung dari suatu peristiwa komunikatif. Jika suatu peristiwa komunikatif tidak memenuhi komponen-komponen komunikasi, makna peristiwa komunikatif itu akan sulit dieksplorasi dan diformulasi secara komprehensif.

4.4 Dampak Komunikasi Mikro

Dengan memperhatikan komponen-komponen komunikasi di atas, aktivitas komunikasi merupakan suatu proses sosial yang bertujuan untuk mencapai kepentingan tertentu yang dinegosiasikan secara bersama. Aktivitas komunikasi disebut sebagai proses sosial karena: (a) terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui bersama, mulai dari (penutur) menyampaikan gagasan kepada lawan tutur dengan sarana bahasa, simbol-simbol, tanda-tanda, gambar-gambar, dan sebagainya, (b) lawan tutur menerima dan mengolah pesan hingga merespon pesan, serta (c) terbangunnya pengertian bersama terhadap hal-hal yang dikomunikasikan antara kedua belah pihak. Aktivitas yang bersifat bertahap dan melibatkan ketiga komponen merupakan syarat terwujudnya proses sosial dalam aktivitas komunikasi.

Kesepakatan bersama yang diperoleh setelah melalui proses komunikasi merupakan dasar untuk mengeksekusi suatu kepentingan atau menjadi modal bagi berlanjutnya aktivitas komunikasi di antara mereka yang terlibat interaksi sosial.

Komunikasi merupakan media yang efektif untuk menciptakan dinamika kehidupan masyarakat, mengembangkan saling pengertian, dan mengatasi masalah kemasyarakatan. Semuanya ini adalah konsekuensi dari jati diri manusia sebagai makhluk sosial, yang senantiasa dituntut untuk melakukan interaksi sosial dalam rangka menjaga kelangsungan hidup masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari dan berdasarkan kuantitas pihak-pihak yang terlibat interaksi sosial, praktek komunikasi dibagi menjadi komunikasi: antarindividu, individu dengan kelompok, antarkelompok, dan komunikasi massa. Praktek komunikasi yang terakhir ini tidak menjadi objek kajian etnografi komunikasi karena bersifat makro. Selain itu, ditinjau dari aspek intensitas peran pelibat interaksi sosial dalam pertukaran pesan, praktek komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi searah (*one-way communication*) dan komunikasi dua arah secara timbal-balik (*two-way communication*). Komunikasi searah terjadi jika yang aktif menyampaikan pesan dari awal hingga akhir interaksi sosial dilakukan oleh salah satu pihak (komunikator), sedangkan pihak yang lain (penerima pesan) bersifat pasif. Sebaliknya, komunikasi dua arah terbentuk jika semua pihak yang terlibat interaksi bertindak aktif secara timbal-balik menyampaikan pesan (Wexley dan Yuki, 2003:72).

Menurut hemat penulis, dilihat dari aspek intensitas peran partisipasi pelaku interaksi dalam pertukaran pesan, praktek komunikasi dibagi menjadi tiga, yaitu komunikasi satu arah, komunikasi dialogis, dan komunikasi kompleks. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang salah satu partisipannya mengambil peran utama dalam interaksi sosial, sedangkan partisipan yang lain bersifat diam/pasif, misalnya, dalam khotbah Jumat di masjid atau ceramah umum keagamaan. Komunikasi dialogis adalah

komunikasi yang partisipannya terlibat saling mempertukarkan pesan. Komunikasi dialogis memiliki gradasi, yakni komunikasi dialogis penuh, seperti praktek komunikasi jual-beli di pasar tradisional dan komunikasi dialogis minimalis, seperti praktek komunikasi di pasar modern atau di pertandingan olah raga. Komunikasi kompleks adalah komunikasi yang partisipannya, yaitu komunikator tidak hanya terlibat interaksi komunikatif dengan komunikan secara dialogis, tetapi di internal komunikan juga terjadi interaksi timbal balik tentang pesan yang dipertukarkan. Praktek komunikasi kompleks dapat dilihat dalam kegiatan seminar/diskusi atau praktikum di laboratorium.

Seorang individu membutuhkan komunikasi dan selalu terlibat dalam aktivitas komunikasi karena ia adalah unsur dasar pembentuk identitas manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu, komunikasi merupakan jembatan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Dalam zaman modern ini ragam kebutuhan manusia sudah sangat kompleks. Tingkat kemajuan teknologi informasi yang semakin spektakuler dan efisien telah membantu kemudahan setiap orang untuk menjAminn interaksi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia mencakup kebutuhan memenuhi konsumsi biososial, yakni pangan, sandang, dan papan; kebutuhan aktualisasi diri; dan kebutuhan kerja sama.

Aktivitas komunikasi mengandaikan adanya pertukaran sumber daya di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya secara seimbang. Sumberdaya merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan diperoleh melalui negosiasi sosial dalam praktek komunikasi. Wujud sumber daya bisa kongkret, seperti uang, barang, dan jasa, tetapi juga

abstrak, seperti janji, jaminan, dan harapan. Jika suatu aktivitas komunikasi tidak menimbulkan pertukaran sumberdaya secara seimbang, maka komunikasi menjadi timpang yang berimplikasi pada salah satu pihak yang terlibat komunikasi tidak memperoleh hal-hal yang diinginkan, sehingga dapat berdampak pada ketidakberlanjutan kerja sama di antara mereka.

Dalam suatu struktur masyarakat yang semakin kompleks, aktivitas komunikasi yang akan menjembatani interaksi sosial antarorang untuk membangun kerja sama merupakan perekat sosial dari struktur masyarakat tersebut. Biasanya, struktur masyarakat yang semakin kompleks memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan berpotensi membuka ruang-ruang konflik sosial. Hal ini dikarenakan oleh tingkat persaingan hidup yang tinggi, egoisme yang terus meningkat karena orientasi hidup materi Aminsme, dan perjuangan agresif untuk mewujudkan kepentingan diri dan kelompok (*jama'ah*). Dalam konteks demikian, aktivitas komunikasi tidak hanya secara eksklusif merupakan urusan orang per orang, juga bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sempit manusia, seperti konsumsi dan papan, tetapi secara sosial merupakan pilar-pilar yang bisa memperkokoh eksistensi masyarakat secara keseluruhan serta menjadi sarana untuk mengantisipasi konflik sosial dan persaingan tidak sehat yang terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat.

Kita ambil contoh misalnya tentang kedudukan dan peran pasar tradisional di kota yang terus bergerak menjadi kota modern atau kota metropolitan atau megapolitan (Kusnadi, 1995:4). Pasar tradisional perkotaan menjadi ruang sosial yang memfasilitasi orang-orang kota untuk berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui interaksi sosial langsung secara bertatap muka dan timbal-balik, mereka akan

saling mengenali diri dan orang lain, membangun kebersamaan, saling pengertian, dan mengembangkan kerukunan sosial. Pasar tradisional berfungsi untuk mengikis sikap-sikap egois, antikemanusiaan, ketidakpedulian sosial, dan materialistik dalam kehidupan sehari-hari orang-orang kota.

Pasar tradisional di daerah konflik etnik, seperti di Kota Ambon, juga mengambil fungsi yang sama sebagai perekat integrasi sosial yang terkoyak. Konflik berbasis agama yang telah merusak integrasi sosial mengakibatkan masyarakat terbelah menurut garis identitas agama masing-masing. Pranata dan nilai-nilai budaya lokal, seperti *pela-gandong* di Maluku tidak mampu menjadi perekat integrasi sosial. Pada akhirnya, pasar tradisional yang berperan menyatukan berbagai orang dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda dalam aktivitas komunikatif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan akan sumber daya pangan yang mampu terpenuhi oleh pasar tradisional telah mengundang orang-orang yang berbeda agama, keyakinan, dan tradisi bersatu dalam aktivitas komunikasi pasar. Mereka bertegur sapa, berkomunikasi, dan bertransaksi ekonomi melakukan pertukaran sumber daya sehingga praktek-praktek sosial berdampak pada terbangunnya kembali sikap saling percaya dan bersatupadu menciptakan ruang perdamaian.

Pasar tradisional di kota atau di daerah konflik merupakan “oase sosial” yang berfungsi untuk menurunkan tensi egoisme diri, sikap materialistik, dendam sosial, dan menjadi tempat menciptakan resolusi konflik sosial, perdamaian, dan kerukunan. Hal-hal demikian merupakan dampak dari pengaruh aktivitas komunikasi antarorang yang beragam latar belakang budayanya dan kepentingan sosialnya. Aktivitas komunikasi sehari-hari dalam berbagai kepentingan, ruang sosial, dan ragam situasional-

kontekstual menimbulkan dampak yang besar terhadap penataan ulang stabilitas kehidupan masyarakat atau untuk menjaga integrasi sosial sehingga memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia.

Aktivitas komunikasi sehari-hari di tingkat mikro, seperti di pasar tradisional ternyata berdampak besar pada skala makro masyarakat. Praktek komunikasi di tingkat mikro adalah peristiwa komunikatif dalam skala terbatas, seperti interaksi komunikatif di dalam keluarga, transaksi jual-beli di pasar tradisional, dan berobat di dokter praktek. Praktek komunikasi mikro meluas dalam keseluruhan aktivitas masyarakat. Meskipun demikian, aktivitas komunikasi di tingkat mikro bersifat dasar dalam tata hubungan sosial kehidupan bermasyarakat. Rangkaian jaringan dari aktivitas-aktivitas komunikasi mikro merupakan fondasi dari eksistensi masyarakat. Praktek komunikasi di tingkat dasar inilah yang menciptakan masyarakat, memelihara kesatuan sosial, kerja sama, dan menggerakkan dinamika masyarakat secara makro.

BAB V

PRAKTEK KOMUNIKASI SEHARI-HARI SEBAGAI REALITAS SOSIAL

5.1 Gejala “Gunung Es Komunikasi”

Dalam kehidupan manusia sehari-hari dan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat sering performansi yang dihasilkan dan tampak oleh pancaindera tidaklah merepresentasikan makna fakta-fakta atau peristiwa sosial yang sesungguhnya secara utuh. Setiap peristiwa sosial selalu mengandung unsur-unsur yang “manifest” dan yang “laten”. Yang terlihat/nyata (*manifest*) adalah hal-hal fisik dan yang tidak tampak adalah hal-hal yang tersembunyi (*latency*). Hasil pencerapan pancaindera dan fakta-fakta sosial yang tampak itu hanya menjadi “pintu masuk” untuk memahami dunia maknawi dari suatu peristiwa sosial. Pemahaman terhadap dunia maknawi itu tidak terlepas dari

referensi sistem nilai yang menjadi ruang bagi berlangsungnya suatu peristiwa sosial. Dalam perspektif antropologi-simbolik, fakta-fakta sosial budaya memiliki kompleksitas makna yang berfungsi untuk menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan perspektif di atas, kita akan lihat suatu peristiwa sosial “Upacara Peringatan Hari Nasional” yang dilaksanakan oleh sebuah instansi pemerintah kabupaten. Dalam “ruang sosial” kegiatan upacara yang berlangsung di alun-alun kota, tempat hadir peserta upacara sudah dikapling-kapling sesuai dengan status dan peranan peserta. Unsur-unsur pimpinan kabupaten, seperti bupati, sekretaris daerah, kabag, kepala/sekretaris/kabid dinas/badan, dan seterusnya menempati ruang di depan yang berhadapan langsung dengan peserta upacara. Tempat mereka diberi tenda perlindungan dari terik matahari dan hujan. Peserta upacara dikelompokkan dalam puluhan barisan yang masing-masing barisan mencerminkan identitas sosialnya, yaitu kepala desa, camat, pegawai setiap dinas/badan, guru dan murid sekolah, komunitas adat, ormas pemuda dan keagamaan, dan seterusnya. Mereka menempati ruang terbuka tanpa tenda pelindung dari panas matahari atau hujan. Komandan upacara dijabat oleh petugas militer.

Sesuai dengan penjelasan pembawa acara sebelum upacara dimulai, kita akan menyaksikan prosesi upacara dari awal hingga selesai. Upacara dimulai dengan penyiapan barisan, bupati sebagai inspektur upacara menuju podium yang sudah disiapkan dan diberi tenda perlindungan dari terik matahari, serta laporan komandan upacara. Selanjutnya, dilakukan penghormatan kolektif terhadap inspektur upacara, pengibaran bendera, dan menyanyikan lagu kebangsaan, pembacaan dasar negara, dan pembukaan undang-undang dasar, sambutan inspektur upacara, dan berakhir ditutup

Bab V: Praktek Komunikasi Sehari-Hari sebagai Realitas Sosial

dengan doa. Upacara selesai dan dibubarkan. Keseluruhan proses upacara merupakan interaksi sosial yang sistemik, teratur, dan wujud dari praktek kehidupan bernegara.

Meskipun kegiatan upacara pada hari kemerdekaan itu berlangsung dalam waktu 60 menit tetapi makna yang terkandung dalam peristiwa upacara itu sangat kompleks. Upacara itu adalah kontestasi simbolik kekuasaan dengan beragam relasi sosial politiknya. Selama kegiatan upacara berlangsung kita menyaksikan hal-hal manifest yang dapat ditangkap oleh pancaindera kita, seperti tempat duduk unsur-unsur pimpinan kabupaten, barisan peserta upacara yang kepanasan, kegiatan-kegiatan petugas upacara, penghormatan bendera, peserta menyanyikan lagu kebangsaan, pembacaan dasar negara, pembacaan Preambul UUD 1945, serta penyampaian doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan disertai harapan agar Tuhan memberi kesejahteraan lahir batin kepada seluruh rakyat Indonesia.

Bagi kita semua yang dulu pernah bersekolah dan kuliah, upacara pada hari-hari nasional, termasuk upacara 17 agustusan, merupakan upaya sistematis untuk memperkuat sikap-sikap nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Pemahaman makna upacara yang demikian merupakan pengetahuan yang umum bisa diterima oleh semua pihak. Namun demikian, makna upacara tersebut lebih dari sekedar untuk menanamkan sikap nasionalisme kepada warga bangsa. Makna upacara pada sisi-sisi lain dari peristiwa sosial tersebut masih banyak. Keragaman interpretasi makna upacara dapat terjadi karena upacara sebagai teks sosial yang otonom berpotensi mengundang pemaknaan yang beragam pula. Meskipun demikian, dalam proses interpretasi makna upacara harus memperhatikan konteks peristiwa dan tautan substansi dengan teks-teks yang lain.

Sebagai teks sosial, upacara memperingati hari-hari nasional menggambarkan dan mengukuhkan relasi-relasi kuasa, memelihara batas-batas kelas sosial, dan dominasi sosial antara elite dan rakyat, antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Dalam peristiwa upacara tersebut, bupati dan jajaran pemimpin daerah sebagai “elite sosial” berada di tempat yang nyaman, ada tempat duduk dan tenda pelindung; sedangkan peserta upacara sebagai representasi “golongan rakyat biasa” berada di tempat yang panas, harus berdiri terus dari awal hingga selesai upacara dan terkadang ada peserta yang “semput” karena kepanasan atau terkadang kesurupan makhluk astral yang merasa terganggu oleh kegiatan upacara yang sarat oleh “ketimpangan relasi dan perlakuan sosial”. Peristiwa “semput” dianggap hal biasa, bahkan cenderung “dinikmati” oleh seluruh peserta upacara karena peristiwa tersebut dimaknai sebagai “pengorbanan rakyat” untuk menopang struktur makna upacara. Tempat elite dan rakyat dalam upacara itu menurut tafsir negara sebagai penanggung jawab upacara sudah sesuai tentang kedudukan dan peran kedua pihak. Karena itu, tempat-tempat peserta upacara dan perlakuan berbeda kepada mereka memiliki makna simbolik yang dalam.

Dengan struktur pemahaman seperti di atas, kita tidak heran kalau dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan, rakyat harus selalu kalah dan berkorban untuk negara atau elite, serta pada sisi lain, pemimpin selalu merasa benar. Misalnya dalam dua kasus berikut. Pertama, pembebasan tanah rakyat untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, bendungan, atau gedung-gedung pemerintah/swasta, rakyat selalu menerima “ganti rugi” sebagai hal wajar, bagian dari konsepsi “jer basuki mawa bewa” dan bukanlah “ganti untung”, yakni besaran uang yang diterima menguntungkan pemilik tanah. Kedua, jika seorang bupati selama

menjabat dan menjalankan kekuasaan tidak berhasil membangun daerahnya, sumberdaya alam rusak, rakyatnya tetap miskin, dan praktek korupsi marak, maka sang bupati tidak pernah dianggap melakukan “kejahatan kepemimpinan” dan diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan amanah kuasa yang dia terima dari rakyat. Meskipun gagal memimpin, bupati tetap dianggap benar dan justru yang dinilai salah adalah rakyatnya, seperti kurang berpartisipasi dalam pembangunan, kurang melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan bupati, dan alasan-alasan artifisial lainnya.

Selain tafsir makna di atas, upacara sebagai teks sosial merupakan cara negara (pemerintah kabupaten) menjaga keteraturan politik dan kepatuhan sosial rakyat kepada elite sosial politik. Praktek upacara menjadi pengokoh struktur sosial-politik yang sudah mapan dan upaya antisipatif terhadap “pikiran dan tindakan *liyan*” yang dilakukan rakyat keluar dari struktur yang ada. Artinya, rakyat diajak untuk bertindak teratur, menghormati pemimpinnya, dan menerima segala sesuatu yang ada secara ikhlas dan tidak bertindak macam-macam yang dapat merugikan kepentingan negara c.q. pemerintah. Upacara merupakan medium menjaga kebersamaan dan kerukunan sosial dalam rangka memperkokoh “manunggaling” rakyat (*kawula*) dan elite sosial (*raja*). Karena kompleksitas makna, reproduksi upacara akan terus berlangsung karena nyata-nyata lebih memberi banyak keuntungan kepada negara dan elite sosial daripada kepada rakyat. Pada masa Orde Baru, praktek upacara bendera sangat intensif karena sesuai dengan watak politik hegemoni rezim tersebut.

Aktivitas, praktek, atau peristiwa komunikasi sesungguhnya merupakan teks sosial yang sama dengan kegiatan upacara di atas. Teks interaksi sosial komunikatif tersebut mengandung unsur-

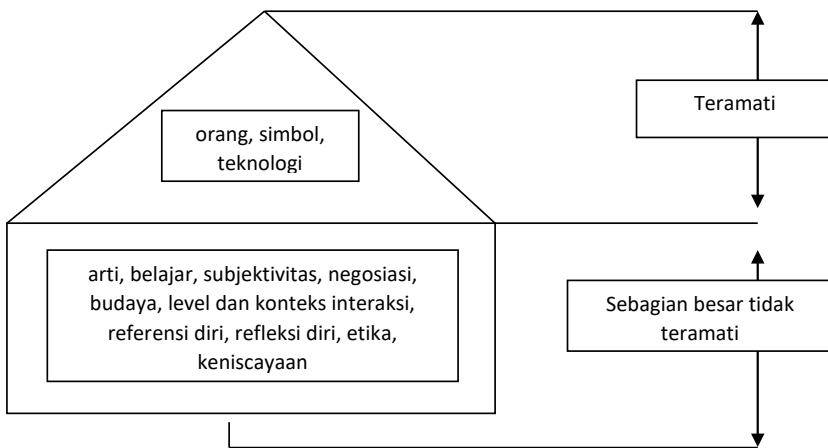
unsur yang manifest dan yang maknawi. Jika kita mengamati dari tiga orang yang sedang berdiskusi tentang strategi membasmi terorisme berbasis ideologi radikalisme agama, pancaindera kita akan mencerap hal-hal seperti: tiga orang yang sedang berbicara satu sama lain, simbol-simbol yang dipergunakan, dan teknologi informasi yang menunjang diskusi tersebut. Orang, simbol, dan teknologi merupakan tiga hal yang secara empirik bisa kita amati. Padahal, dalam diskusi tentu saja ada hal-hal lain yang tidak bisa teramati, seperti makna-makna yang dipertukarkan dan disempurnakan selama diskusi berlangsung, subjektivitas, dan lain-lain. Yang tampak dari praktek komunikasi tersebut adalah “hal-hal yang di atas”, sedangkan “hal-hal yang di bawah” tidak menampakkan. Gambaran interaksi sosial yang demikian oleh Ruben dan Stewart (2013:79-80) disebut sebagai fenomena “gunung es komunikasi”.

Dalam perspektif gunung es komunikasi, aspek-aspek yang terlihat dari komunikasi manusia adalah sebagai berikut. Pertama adalah *orang*, yaitu individu yang bertindak sebagai pengirim dan atau penerima pesan. Kategori ini mencakup: juru bicara yang berbicara kepada orang lain, kelompok, atau organisasi; individu yang terlibat dalam penulisan/penciptaan dan pengiriman pesan; dan individu-individu yang menerima pesan dalam situasi komunikasi, baik sebagai pendengar, pembaca, atau pengamat. Kedua adalah *simbol*, yaitu karakter, huruf, angka, kata-kata/ungkapan (bahasa), benda, orang, atau tindakan. Simbol merupakan sifat sosial kita dan kapasitas dalam berkomunikasi secara simbolik merupakan keunggulan manusia. Simbol-simbol mewakili benda atau ide tentang sebuah benda. Kita memiliki kemampuan berkomunikasi yang unik karena kita dapat membuat dan menggunakan simbol dan bahasa simbolis, sehingga melebihi

Bab V: Praktek Komunikasi Sehari-Hari sebagai Realitas Sosial

mahluk-mahluk lainnya. Ketiga adalah *teknologi*, yang menjadi sarana manusia untuk menetapkan simbol dan maknanya, mengumpulkan dan mengirimkan informasi ke berbagai pihak atau dari satu generasi ke generasi lainnya, melalui beragam cara, seperti percetakan, perekaman, atau penayangan secara luas. Berkat teknologi informasi yang semakin canggih, dialog jarak jauh dapat dilakukan dengan baik dan informasi tentang suatu peristiwa sosial di suatu wilayah geografis dalam waktu singkat sudah dapat disebarakan ke seluruh dunia (Ruben dan Stewart, 2013:80-87).

Diagram 2. Gunung Es Komunikasi



Sumber: Rubin dan Stewart (2013:80)

Aspek-aspek komunikasi manusia yang tidak terlihat adalah sebagai berikut. Pertama, *makna* yang melekat dalam suatu simbol. Kata “meja” merupakan simbol dari suatu benda dan suatu rangkaian terpadu dari fonem: m-e-j-a yang tidak bermakna; makna kata “meja” itu kita ciptakan, disosialisasikan, digunakan penutur, dan diwariskan. Hanya penutur yang paham mampu memaknai kata “meja”. Mereka yang tidak paham karena

tidak mengerti kosa kata bahasa Indonesia, maka ia tidak mampu mengenali makna kata “meja”. Tempat makna meja adalah “di kepala para penutur bahasa Indonesia”.

Kedua, *pembelajaran* adalah cara yang ditempuh manusia sebagai makhluk simbolik untuk memahami pesan-pesan dan informasi yang sampai kepadanya melalui proses interpretasi, sehingga ia dapat merespons dengan baik. Orang dapat membaca, menulis, dan berhitung melalui pembelajaran di sekolah. Namun sebagian besar pengetahuan kita diperoleh dari pengalaman yang kaya. Aktivitas komunikasi memuat “proses pembelajaran” yang bermanfaat bagi individu partisipan dalam mengakumulasi pengetahuannya.

Ketiga, *subjektivitas* adalah pengalaman dan pengetahuan yang tidak selalu sama dari setiap individu sehingga hal ini mempengaruhi hasil penafsiran mereka terhadap pesan-pesan simbolik yang diterimanya. Tafsir makna sesuatu hal bersifat subjektif dan pemahaman bersama dapat tercipta melalui interaksi sosial atau aktivitas komunikasi.

Keempat, *negosiasi* adalah kemampuan kita dalam memahami makna simbol-simbol yang bersifat subjektif secara prosedural melalui interaksi sosial sehingga terjadi kecocokan makna dan pemahaman bersama. Negosiasi adalah proses pemaknaan intersubjektif secara dialektis di antara partisipan komunikasi.

Kelima, *budaya* yaitu sistem pengetahuan bersama yang tercipta karena aktivitas komunikasi. Interaksi antarsubjek menghasilkan pemahaman bersama atas simbol dan maknanya, yang kemudian menjadi referensi bersama dalam berperilaku dan mengkoordinasikan makna tindakan-tindakan sosial. Karakteristik budaya yang terbentuk dapat bersifat individualistik atau kolektif sesuai dengan sejarah sosial dan falsafah suatu masyarakat.

Bab V: Praktek Komunikasi Sehari-Hari sebagai Realitas Sosial

Keenam, *konteks dan tingkat interaksi*. Komunikasi beroperasi dalam berbagai konteks kepentingan dan berbagai tingkatan interaksi, seperti antarindividu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Relasi sosial yang kompleks tersebut akan berdampak terhadap cara kita berpikir dan merasa, serta cara-cara kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi manusia adalah jaringan yang menyatukan dan memberikan pengertian dari berbagai bentuk dan tingkat aktivitas manusia.

Ketujuh, *referensi diri* adalah bahwa makna simbol-simbol yang digunakan subjek (individu) dalam interaksi sosial selalu mencerminkan pengalaman kolektif (masyarakat). Individu adalah bagian dari masyarakat dan posisi demikian menciptakan ruang bahwa komunikasi antarmanusia adalah sangat mengacu pada pengalaman kehidupan diri sendiri yang bersifat otobiografis.

Kedelapan, *refleksivitas diri* atau kesadaran diri merupakan bagian dari kemampuan diri yang menjadi inti komunikasi. Melalui komunikasi, kita belajar berbagai hal dari orang lain dalam rangka pendewasaan diri dan pembelajaran sosial tentang bagaimana kita berpikir, berbicara, dan bertindak secara tepat dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Kesembilan, *etika* adalah dasar untuk membangun komunikasi yang tepat, produktif, dan berhasil guna. Karena itu, sikap-sikap partisipan yang dapat berperan membangun etika komunikasi adalah: dialogis, menghargai keragaman pendapat dan ketidaksepakatan, introspeksi diri, dan kejujuran yang kontekstual.

Kesepuluh, *keniscayaan* yaitu kepastian yang tidak boleh dihindari atau diabaikan bahwa sepanjang hidup kita sebagai manusia akan selalu terlibat komunikasi dengan siapa pun, kapan, di mana, dan dalam kepentingan apa pun. Komunikasi selalu terjadi karena praktek komunikasi adalah suatu institusi

sosial, pesan-pesan dikemas dan diproses sebaik mungkin. Jika terjadi “kegagalan komunikasi”, persoalannya tidak terletak pada kelemahan pengiriman pesan dan penerimaannya, tetapi sebaliknya adalah dari perbedaan interpretasi pesan, harapan, maksud, atau hasilnya (Ruben dan Stewart, 2013:87-97).

Kesepuluh aspek tersebut masih bisa ditambah satu lagi, yaitu *kepentingan* dalam berbagai dimensinya yang “tertimbun” dalam praktek interaksi komunikatif. Aktivitas komunikasi apa pun selalu menegosiasikan kepentingan di antara para partisipan, dari kepentingan yang sangat sederhana sampai dengan yang kompleks. Sosiolog Berger dan Kellner (1985:5) menjelaskan bahwa “.. di bawah bangunan yang nampak dalam dunia manusia ini, ada struktur kepentingan dan kekuatan tersembunyi. Yang *manifest* tersebut bukanlah merupakan seluruh ceritera; ada yang *latency* yang harus dipelajari. Atau dalam ungkapan yang sederhana, *dunia bukanlah sebagaimana nampaknya*”. Fenomena komunikasi “gunung es” hanya untuk menggambarkan bahwa gejala-gejala yang tampak ke permukaan dalam aktivitas komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita, bukanlah representasi dari realitas sosial yang sesungguhnya.

5.2 Kompetensi Komunikatif

Dell Hymes membedakan antara kemampuan/kompetensi bahasa (*linguistic competence*) dari kemampuan komunikatif (*communicative competence*). Pendapat ini didukung oleh John J. Gumperz yang mengemukakan bahwa, “Kalau kemampuan bahasa meliputi kesanggupan pembicara menghasilkan kalimat-kalimat yang benar, sedangkan kemampuan komunikatif memerikan kesanggupannya untuk memilih – dari sekian banyak ungkapan yang benar secara tatabahasa yang dimilikinya – bentuk-bentuk

yang mencerminkan dengan tepat norma-norma yang berlaku dalam interaksi sosial tertentu” (Suhardi,2009:23). Kemampuan komunikatif lebih dari sekedar kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa merupakan usur dalam kemampuan komunikatif.

Kemampuan komunikatif yang dimiliki oleh seorang penutur atau komunitas tutur diperoleh melalui proses belajar bahasa dan budaya yang berkelanjutan, yakni sepanjang hidup individu sebagai bagian dari komunitas tutur suatu bahasa. Kompetensi komunikatif yang dimiliki oleh individu dapat menggambarkan pemahaman yang bersangkutan terhadap esensi-esensi dalam kebudayaan masyarakatnya. Dalam kehidupan masyarakat, belajar bahasa dan budaya, yang dilanjutkan dengan melatih diri untuk berinteraksi sosial atau berkomunikasi dengan orang lain merupakan kewajiban yang harus dilalui oleh individu-individu, sejak kecil hingga mencapai kematangan diri sebagai warga masyarakat yang berbudaya. Individu-individu belajar dan memperoleh pengetahuan kompetensi komunikatif dari interaksi sosial di dalam keluarga, pranata-pranata sosial di masyarakat, dan di sekolah. Lingkungan interaksi sosial terdekat dari individu memberikan kontribusi besar terhadap penguasaan kompetensi komunikatif.

Kompetensi komunikatif yang dimiliki oleh individu dan dapat digunakannya secara tepat untuk berinteraksi sosial sehari-hari merupakan penanda keberhasilan bagi seseorang dalam hal bersosialisasi, beradaptasi, dan bekerja sama dengan warga masyarakat lainnya. Individu-individu yang kurang mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan warga masyarakat di lingkungannya berarti ia mengalami gangguan kejiwaan dan adaptasi sosial. Masyarakat adalah ruang sosial yang luas untuk berekspresi diri, mengembangkan kedewasaan berpikir, dan

memperluas wawasan sosial budaya. Kompetensi komunikatif merupakan jembatan untuk mencapai ketiga hal tersebut.

Apabila Ferdinand de Saussure membedakan antara *langue* dan *parole*, dan Chomsky menyebut *competence* dan *performance*, Hymes tidak menyebut secara eksplisit perbedaan antara bahasa sebagai “sistem” dan tutur sebagai “keterampilan”. Ia hanya menyebut adanya kompetensi komunikatif yang kira-kira merupakan konvergensi dari kedua pengertian tersebut. Kompetensi komunikatif adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh penutur beserta ketrampilan mengungkapkannya sesuai dengan fungsi, situasi, dan norma-norma pemakaian berdasarkan konteks sosial-budayanya (Suwito, 1983: 19). Menurut Saville-Troike (1989: 21-22; Ibrahim, 1994:26), kompetensi komunikatif tidak hanya melibatkan penguasaan aspek kebahasaan tetapi juga hal-hal apa saja yang akan dikatakan kepada siapa dan bagaimanakah mengatakannya secara benar sesuai dengan konteks situasinya. Kompetensi komunikatif berkaitan dengan pengetahuan sosial dan kebudayaan yang dimiliki penutur untuk membantu mereka menggunakan dan menginterpretasikan makna dari bentuk-bentuk linguistik yang dikomunikasikan.

Dengan demikian, pemerolehan kompetensi komunikatif mensyaratkan adanya: (1) penguasaan struktural bahasa yang benar, (2) keterampilan memilih dan menggunakan (mengkomunikasikan) bentuk-bentuk linguistik yang sesuai dengan konteks situasinya, (3) menyesuaikan ungkapan tutur dengan tingkah lakunya, dan (4) tidak hanya menginterpretasi makna referensial tetapi harus mempertimbangkan norma sosial-budaya dan nilai efektifnya. Aspek-aspek ini harus diterapkan secara integral dalam proses berbahasa karena saling terkait dan saling menunjang. Pada dasarnya, kompetensi komunikatif semacam ini dimiliki oleh

setiap anggota komunitas tutur dan menjadi milik seluruh warga masyarakat. Baik secara perseorangan/individu maupun pada tataran komunitas, pemilikan kompetensi komunikatif seperti ini disebut *verbal repertoire* (Suwito, 1983: 19).

Pemilikan *verbal repertoire* pada tataran individu dan masyarakat bersifat timbal-balik. *Verbal repertoire* individual adalah keseluruhan alat-alat verbal yang dikuasai oleh setiap penutur, pemilihan bentuk-bentuk lingual, dan norma-norma penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks, fungsi, dan situasinya. *Verbal repertoire* masyarakat adalah keseluruhan alat-alat verbal yang ada di dalam suatu komunitas tutur, pemilihan bentuk-bentuk lingual atau variasi, dan norma-norma penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks, fungsi, dan situasinya. *Verbal repertoire* setiap penutur ditentukan oleh masyarakat di mana ia merupakan anggotanya, sedangkan *verbal repertoire* suatu komunitas tutur terbentuk karena himpunan *verbal repertoire* seluruh penutur di dalam komunitas itu (Suwito, 1983:19-20).

Kompetensi komunikatif yang dioperasikan dalam suatu interaksi sosial merupakan peristiwa kompleks yang melibatkan beberapa unsur pengetahuan sebagai pembentuknya (Saville-Troike, 1989: 24; Ibrahim, 1994:31-32). Bagi seorang penutur, untuk bisa melakukan tindakan komunikatif yang efektif, ia harus memiliki tiga kategori pengetahuan, yaitu (1) pengetahuan linguistik (*linguistic knowledge*), (2) keterampilan interaksi (*interaction skill*), dan (3) pengetahuan kebudayaan (*cultural knowledge*).

Pengetahuan linguistik mencakup: (a) elemen-elemen verbal, (b) elemen-elemen nonverbal, (c) pola elemen-elemen dalam peristiwa tutur tertentu, (d) rentang variasi yang mungkin (dalam semua elemen dan pengorganisasian elemen-elemen tersebut), dan (e) makna variasi-variasi dalam situasi tertentu. Keterampilan

interaksi meliputi: (a) persepsi ciri-ciri penting dalam situasi komunikatif, (b) seleksi dan interpretasi bentuk-bentuk lingual yang tepat untuk situasi, peran, dan hubungan tertentu (kaidah untuk penggunaan ujaran), (c) norma-norma interaksi dan interpretasi, serta (d) strategi untuk mencapai tujuan. Pengetahuan kebudayaan berupa pemahaman terhadap: (a) struktur sosial, (b) nilai dan sikap, (c) peta atau skema kognitif, dan (d) proses enkulturasi, yakni transmisi dalam semua pengetahuan dan keterampilan.

Praktek kompetensi komunikatif dalam interaksi sosial kebahasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat yang memiliki bahasa yang sama dapat berimplikasi pada tiga hal. Pertama, aktivitas komunikasi dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat, karena masing-masing partisipan memahami penerapan kompetensi komunikatif secara benar. Kedua, aktivitas komunikasi yang sedikit terganggu karena salah satu partisipan kurang memahami penerapan kompetensi komunikatif secara baik dan benar, sesuai dengan konteksnya. Misalnya saja, ketika Amin membesuk Asmat yang sakit keras di rumah sakit. Pada saat berbincang, Asmat bertanya kepada Amin, “Apakah penyakit jantung saya ini bisa sembuh Min?” Amin menjawab, “Wah kalau dilihat kondisimu, penyakitmu ini gawat, berat sembuhnya!”. Meskipun urusan sakit, sembuh, dan mati adalah urusan Tuhan YME, pernyataan Amin tersebut “kurang tepat” jika diucapkan di hadapan orang yang sedang sakit parah karena dapat menimbulkan *shock* pada pasien. Seharusnya, Amin menjawab: “Ya, Insha Allah sembuh, ayo kita bareng-bareng berdoa kepada Allah Swt. mudah-mudahan sampean cepat sembuh dan pulang ke rumah”. Ungkapan demikian lebih efektif meredakan kegelisahan yang bersarang dalam sanubari Asmat.

Bab V: Praktek Komunikasi Sehari-Hari sebagai Realitas Sosial

Apakah pernyataan Amin tersebut ada yang salah? Dari segi etika komunikasi tentu “tidak salah”. Ditambah lagi, mungkin Amin sudah memiliki informasi yang banyak tentang riwayat penyakit jantung yang diderita oleh Asmat dan kemungkinan akibat yang fatal. Apalagi, salah satu aspek yang dianggap penting dalam etika komunikasi adalah “kejujuran” untuk menyatakan sesuatu secara faktual (Ruben dan Stewart, 2013:96-97). Yang kurang dipahami oleh Amin adalah konteks perbincangan karena berkaitan dengan “kondisi sakit parah dan harapan untuk sembuh”, serta pilihan bentuk-bentuk lingual yang bermakna kurang “empati terhadap kondisi pasien”, seperti kata-kata: “gawat, berat sembuhnya”. Dalam konteks demikian, Amin tidak dapat menerapkan kompetensi komunikatif yang baik dalam berinteraksi dengan Asmat.

Jika dibandingkan dengan struktur masyarakat yang masih relatif homogen dari aspek kebudayaan, praktek kompetensi komunikatif dalam interaksi sosial pada masyarakat yang kompleks dan berada dalam situasi transisional atau yang didera konflik sosial memiliki potensi untuk menciptakan hambatan kerja sama, kekecewaan, kegelisahan, atau saling curiga. Masyarakat kompleks ditandai dengan beragamnya komunitas beserta identitas etnikinya, sehingga masing-masing komunitas memiliki kompetensi komunikatif yang tidak mudah disinergikan. Demikian juga, di masyarakat yang sedang dilanda konflik antarkomunitas yang berlatar belakang faktor-faktor etnisitas, seperti asal-usul etnik, agama, tradisi, dan bahasa. Komunitas-komunitas tersebut akan cenderung memperkuat identitas ikatan sosiokulturalnya untuk memperoleh rasa aman secara sosial. Sikap saling curiga tertanam kuat dalam perasaan mereka ketika berinteraksi dengan warga dari komunitas yang berbeda. Kondisi-kondisi sosial demikian

dan masih belum mantapnya “budaya kota” yang menjadi pusat referensi sosial, hal-hal ini dapat menyulitkan penerapan kompetensi komunikatif secara benar dan tepat ketika berinteraksi sosial dengan partisipan yang berbeda-beda latar belakang sosial budayanya. Potensi kesalahpahaman dalam berkomunikasi sangat mungkin terjadi.

Pemahaman yang baik terhadap kompetensi komunikatif masyarakat merupakan tantangan bagi seorang peneliti etnografi komunikasi. Perolehan pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh peneliti untuk beradaptasi dengan masyarakat yang ditelitinya dan bermanfaat memahami makna interaksi sosial masyarakat. Dalam hal ini, prioritas yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah memahami lebih awal kebudayaan masyarakat yang diteliti secara umum. Dengan cara demikian, tugas-tugas riset dapat dijalankan secara efektif karena baik penutur, maupun peneliti dapat bersinergi untuk menciptakan pemahaman bersama terhadap praktek-praktek komunikasi yang terjadi di berbagai pranata masyarakat.

5.3 Struktur Praktek Komunikasi

Praktek komunikasi merupakan interaksi sosial yang bersifat umum. Menurut Hymes (1972), struktur aktivitas komunikasi suatu komunitas tutur terdiri atas aspek-aspek yang saling berkaitan, yaitu situasi komunikatif, peristiwa komunikatif, dan tindak komunikatif. Ketiga aspek ini selalu ada dalam setiap aktivitas komunikasi. Ketiga aspek tersebut merupakan unit-unit dasar analisis etnografi komunikasi (Saville-Troike, 1989: 26-27; Ibrahim, 1994:35-38). Oleh sebab itu, pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ketiga satuan aktivitas komunikasi tersebut akan membantu kita memahami pola-pola komunikasi,

proses-proses, dan makna yang terungkap dalam interaksi sosial di antara para partisipan.

5.3.1 Situasi Komunikatif

Situasi komunikatif adalah suasana yang terefleksi atau terpantul dari konteks lingkungan yang menjadi tempat berlangsungnya suatu peristiwa komunikatif. Situasi komunikatif memiliki ciri-ciri: menempati suatu ruang wilayah tertentu, peristiwa komunikatif dengan tujuan tertentu, penataan artefak-artefak yang spesifik, identitas pelaku, waktu, dan norma-norma interaksi tertentu yang menunjang berlangsungnya suatu aktivitas komunikasi. Situasi komunikatif selalu terkait dengan keberadaan suatu pranata sosial. Secara sosiologis, setiap orang memiliki kecenderungan mendefinisikan suatu situasi sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Definisi situasi ini menjadi referensi tindakan sosial atau tindakan kebahasaan. Misalnya, situasi komunikatif dalam pembelajaran di kelas tentu berbeda dengan situasi komunikatif di ruang pengadilan yang sedang mengadili seorang teroris atau situasi komunikatif di rumah sakit, tempat para pasien akan berkonsultasi dan berobat ke dokter.

Suatu situasi komunikatif lebih ditentukan oleh karakteristik aktivitas interaksi sosial, tidak semata-mata oleh karakteristik tempat dan unsur-unsur pendukungnya. Situasi komunikatif pembelajaran di kelas akan berakhir ketika kegiatan pembelajaran sudah selesai, guru dan anak pulang ke rumah. Setelah itu, di tempat yang sama bisa berlangsung situasi komunikatif yang baru jika kelas itu digunakan untuk kegiatan rapat para guru atau menjadi tempat berlatih seni tari siswa-siswa kelas empat. Perubahan situasional terjadi karena perubahan status pranata sosial, dari pranata pembelajaran kelas ke pranata rapat guru, dan

berganti lagi menjadi pranata pelatihan seni tari.

Jadi, dalam satu tempat atau “ruang wilayah” berlangsungnya aktivitas manusia memungkinkan hadirnya beragam situasi komunikatif karena sangat bergantung pada karakteristik dan tujuan interaksi sosial yang terjadi. Situasi komunikatif selalu mengandaikan adanya situasi sosial karena situasi komunikatif adalah unsur yang melekat pada situasi sosial.

5.3.2 Peristiwa Komunikatif

Peristiwa komunikatif adalah unsur yang melekat pada peristiwa sosial. Peristiwa komunikatif adalah peristiwa interaksi sosial kebahasaan atau interaksi linguistik di antara partisipan tutur dengan tujuan, tempat, waktu, dan dalam situasi tutur tertentu (Chaer dan Agustina, 2004: 47). Jadi, interaksi yang berlangsung antara seorang guru bahasa Indonesia dengan murid-muridnya dalam kegiatan pembelajaran di ruang kelas pada waktu tertentu adalah sebuah peristiwa komunikatif. Demikian juga, seorang mahasiswa yang sedang berkonsultasi tentang pilihan topik skripsinya dengan dosen pembimbing hingga tujuan tercapai adalah sebuah peristiwa komunikatif. Sebuah peristiwa komunikatif dinyatakan berakhir apabila terdapat perubahan pada aspek: partisipan utama, relasi status dan peranan di antara partisipan, serta fokus dan tujuan pembicaraan. Perubahan pada ketiga aspek menandai selesainya aktivitas interaksi dari suatu peristiwa komunikatif.

5.3.3 Tindak Komunikatif

Tindak komunikatif (*communicative act*) adalah pernyataan yang disampaikan partisipan sebagai bagian dari keseluruhan pernyataan yang dihasilkan atau terjadi dalam suatu interaksi

sosial komunikatif. Pada umumnya, tindak komunikatif bersifat konterminus dengan fungsi interaksi tunggal, seperti pernyataan referensial, permohonan, atau perintah, dan dapat bersifat verbal atau nonverbal. Artinya, dalam suatu interaksi sosial, fungsi komunikatif bisa beragam, tidak tunggal (fungsi direktif saja) dan disampaikan secara verbal dan nonverbal, tidak verbal semata. Misalnya, tentang permohonan, tidak saja mengambil bentuk verbal, seperti “Saya ingin rokok,” “Apakah kamu punya rokok?,” atau “Boleh minta rokoknya?”. Pernyataan demikian juga bisa disampaikan dengan memicingkan alis mata dan wajah tampak “meminta”, atau dengan “desahan panjang”. Dalam konteks peristiwa komunikatif, bahkan “diam” bisa merupakan tindak komunikatif konvensional dan bisa untuk bertanya, berjanji, menolak, memperingatkan, menghina, memohon, atau memerintah. Misalnya, seseorang bisa mengucapkan kata-kata tanpa mengatakan sesuatu atau seseorang bisa mengatakan sesuatu tanpa mengucapkan kata-kata. Perilaku yang sama bisa berupa tindak komunikatif atau tidak dalam suatu komunitas tutur yang berbeda (Saville-Troike, 1989: 28; Ibrahim, 1994:38).

Menurut Saville-Troike (1989: 28; Ibrahim, 1994:38-39), konsepsi tindak tutur (*speech act*) Austin merupakan dasar yang diperluas dalam *tindak komunikatif* pada studi etnografi komunikasi. Perluasan pengertian ini karena Hymes (1964) memahami bahwa praktek “komunikasi” lebih kompleks dari sekedar “tuturan atau ujaran” dengan daya-daya dan jenis tuturannya. Perbedaan konsepsional antara Austin dan Hymes terjadi karena perbedaan latar akademik mereka, yang kemudian mempengaruhi cara pandang keduanya dalam memahami interaksi kebahasaan. Menurut Hymes, ada aspek konteks antropologis yang harus diperhatikan dalam setiap peristiwa tutur dan aspek

ini diabaikan oleh Austin yang lebih menekankan aspek logika bahasa. Dalam perkembangan mutakhir, teori tindak tutur Austin sudah diperbarui secara komprehensif oleh sosiolog-filosof Jurgen Habermas dalam teori “tindakan komunikatif” yang diperkaya dengan memasukkan teori-teori sosial (Habermas, 2012a dan 2012b). Dengan demikian, teori “tindak tutur” mengalami transformasi akademis menjadi teori “tindak komunikatif” Hymes dan teori “tindakan komunikatif” Habermas.

Dalam kaitannya dengan teori tindak tutur J.L. Austin, setiap tuturan performatif senantiasa mengandung tiga daya, yaitu daya lokusi, illokusi, dan daya perlokusi dalam setiap tindak tutur. Menurut Austin, mengucapkan sesuatu adalah melakukan sesuatu, dan bahasa atau tutur dapat dipakai untuk membuat kejadian karena kebanyakan ujaran yang merupakan tindak tutur mempunyai daya-daya. Daya lokusi suatu ujaran adalah makna dasar dan referensi (makna yang diacu) oleh ujaran itu; daya illokusi adalah daya yang ditimbulkan oleh penggunaannya sebagai perintah, ejekan, keluhan, janji, pujian, dan sebagainya. Jadi, dalam hal tertentu, daya illokusi itu merupakan fungsi tindak tutur yang *inherent* (padu) dalam tuturan (Sumarsono dan Partana, 2004:323).

Daya perlokusi adalah hasil atau efek ujaran terhadap pendengarnya, baik yang nyata maupun yang diharapkan. Marmo Soemarmo (1988) memberikan contoh dan ilustrasi berikut. Seseorang datang ke rumah temannya dan di sana ia berujar, “Rumahmu bersih sekali”. Lokusi kalimat itu menggambarkan keadaan rumah yang dimiliki pendengarnya, yaitu keadaan yang bersih sekali. Dari sudut illokusi, ucapan itu merupakan *pujian*, kalau keadaan rumah itu memang benar-benar bersih. Jika keadaannya justru kotor, ucapan itu menjadi *ejekan*.

Kalau illokusinya adalah pujian, perlokusinya dapat membuat pendengarnya gembira, diwujudkan dengan kalimat tanggapan seperti “Terima kasih.” atau ”Ah, rumah tua.”, dan sebagainya. Kalau illokusi berupa ejekan, perlokusinya adalah membuat pendengar malu, terhina, atau marah. Ujaran yang disampaikan oleh pendengar mungkin begini: “Maaf Pak, belum sempat nyapu” (Sumarsono dan Partana, 2004:323-324).

Pada hakikatnya, setiap tindak tutur itu bermaksud untuk: (a) *mengungkapkan* sesuatu hal, (b) *melakukan* sesuatu tindakan, dan (c) *mempengaruhi mitra tutur* atau *pihak lain*. Sebagai contoh adalah tindak tutur makian sebagai berikut “Dasar anak tolol, begitu saja tidak becus!”. Ungkapan ini dilontarkan oleh seorang ayah (penutur) kepada anak laki-laknya (mitra tutur/petutur) yang melakukan suatu kesalahan. Melalui tindak tutur makian itu, sang ayah bermaksud: (a) *mengungkapkan* sesuatu hal bahwa anaknya bodoh dan tidak mampu (*tindak lokusi*); (b) *melakukan tindakan* tertentu, yaitu *merendahkan* (menghina) martabat anaknya sebagai anak yang bodoh dan tidak mampu (*tindak illokusi*); dan (c) *mempengaruhi* kejiwaan anak itu, sehingga anaknya menjadi rendah diri dan merasa serba salah (*tindak perlokusi*) atau bahkan kalau terlalu sering menerima makian seperti itu seorang anak bisa menjadi sungguh merasa bodoh meskipun sebenarnya dia anak yang pandai (Baryadi, 2012:38-39).

Selain hal di atas, J.R. Searle (1969) membagi fungsi tindak tutur ke dalam lima kategori, yaitu tindak tutur representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif (dalam Dardjowidjojo, 2014:94-96). Tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang menyatakan suatu keadaan di dunia. Misalnya, “Fakultas Ilmu Budaya Unej memiliki empat program studi”. Dari segi penutur, kalimat tersebut merupakan pernyataan yang benar. Tindak

tutur direktif adalah tindak tutur yang dilakukan penutur dengan tujuan agar penanggap tutur melakukan sesuatu hal. Contoh, “Ayo diminum tehnya!” atau “Kalau ke Surabaya, jangan lupa mampir ke rumah pamanmu!”. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengharapkan agar penutur/pembicara melakukan suatu tindakan. Kata-kata *berjanji*, *bersumpah*, dan *bertekad* termasuk penanda penting tindak tutur komisif. Misalnya, “Saya bersumpah untuk mengkritik keras pemimpin yang otoriter itu!” Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dipakai oleh penutur (pembicara) untuk menyatakan keadaan psikologisnya mengenai sesuatu hal, misalnya menyatakan rasa terima kasih, bela sungkawa, ucapan selamat, dan mengumpat. Misalnya, “Selamat ya, sudah dilantik jadi dekan karbitan” atau “Mohon maaf Bu, saya tidak bisa hadir dalam pelantikan pemimpin yang sektarian itu!”. Tindak tutur deklaratif adalah tindak tutur yang menyatakan adanya suatu keadaan baru, yang muncul oleh karena ujaran itu. Contoh, “Dengan ini, saya (bupati) berhentikan Saudara sebagai PNS mulai hari ini”. Untuk melakukan tindakan tersebut, pelaku harus memiliki wewenang (sebagai bupati) dan tanpa wewenang, kalimat tersebut tidak mempunyai nilai. Syarat seperti ini harus ada dan disebut sebagai syarat kelayakan (*felicity condition*).

Suatu tindak komunikatif tidak hanya dirangsang oleh adanya tindak ujar verbal atau gerakan nonverbal (kinesik) dari partisipan interaksi (penutur) yang kemudian direspons balik oleh partisipan lain (lawan tutur), tetapi juga penggunaan unsur-unsur selain simbol bahasa yang mengundang tindakan responsif dapat kita sebut sebagai tindak komunikatif. Seorang pengemudi mobil yang membunyikan klakson karena akan mendahului (*menyAminp*) pengemudi sepeda motor di depannya dan kemudian, pengemudi sepeda motor bergeser ke kiri untuk memberi ruang

bagi pengemudi mobil mendahului dirinya, hal demikian dapat pula disebut sebagai “tindak komunikatif”. Demikian juga, ketika seorang jamaah tanpa disuruh-suruh, ia mencopot sepatu atau sandal saat akan masuk ke tempat peribadatan, maka tindakan tersebut tergolong tindak komunikatif. Tindakan itu dimaknai sebagai bentuk penghargaan jamaah terhadap tempat suci keagamaan. Tindak komunikatif memiliki ciri-ciri spesifik, seperti adanya interaksi timbal-balik, menggunakan simbol dalam arti luas sebagai sarana interaksi, dan adanya tindakan bermotif.

Dari ketiga aspek aktivitas komunikasi di atas, tindak komunikatif merupakan hal yang esensial karena berkaitan langsung dengan proses pertukaran simbol dan makna, serta pemahaman bersama di antara partisipan terhadap topik yang dibicarakan. Dengan demikian, tindak komunikatif merupakan unit dasar analisis yang kontribusinya signifikan untuk memahami keseluruhan makna dalam aktivitas komunikasi.

5.4 Komunikasi sebagai Realitas Sosial

Georg Simmel (Johnson, 1988:257-258) adalah seorang sosiolog yang melihat masyarakat sebagai konstruksi yang tersusun oleh kompleksitas interaksi sosial timbal-balik di antara individu, anggota-anggota masyarakat. Interaksi sosial ini terus berproses secara terus-menerus dan menjadikan individu-individu saling berhubungan, saling mempengaruhi sehingga menjadi basis dari konstruksi masyarakat dan keberlanjutannya. Individu-individu yang terpisah satu sama lain, tidak saling berhubungan, dan tidak bertegur sapa, tentu saja tidak akan “membentuk suatu masyarakat”. Masyarakat adalah produk dari suatu bentukan interaksi sosial. Dengan demikian, masyarakat atau juga komunitas merupakan “entitas yang aktif”, yang senantiasa menjadi ruang

bagi berlangsungnya interaksi sosial di antara individu-individu anggotanya.

Interaksi sosial dan komunikasi memiliki hubungan fungsional yang saling terkait, yaitu interaksi sosial merupakan substansi dari praktek komunikasi atau aktivitas komunikasi selalu memuat adanya interaksi sosial. Aktivitas komunikasi selalu mengandaikan adanya interaksi sosial. Karena itu, suatu aktivitas komunikasi dengan tujuan tertentu, dari awal hingga akhir dalam suatu komunitas tutur, merupakan sebuah proses sosial. Kincaid dan Schramm (1987:95) memahami komunikasi sebagai proses sosial, yakni “serangkaian peristiwa atau tindakan selama beberapa waktu dan menuju ke suatu hasil tertentu”. Komunikasi sebagai proses sosial ditandai oleh beberapa hal, yaitu: (a) proses komunikasi yang berlangsung sekurang-kurangnya melibatkan dua orang atau lebih, (b) partisipan (penutur-lawan tutur) saling berinteraksi dan bertukar pikiran dalam rangka menafsirkan dan memaknai pesan-pesan yang dikomunikasikan secara timbal-balik, dan (c) memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai pada akhir aktivitas komunikasi.

Dalam aktivitas komunikasi, tujuan merupakan hal penting yang menarik individu-individu untuk saling berinteraksi. Tujuan tersebut berkaitan dengan berbagai hal yang melingkupi atau yang menjadi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Orang-orang berinteraksi sosial dalam transaksi jual-beli di pasar tradisional karena mereka membutuhkan barang-barang konsumsi sehari-hari. Hal yang sama juga terjadi dalam kegiatan pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan kebencanaan. Semua interaksi sosial tersebut selalu terkait dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena kebutuhan hidup harus terpenuhi setiap hari, komunikasi dan interaksi sosial yang

peristiwa sosial yang akan terus berlangsung.

Melalui interaksi komunikatif, kebutuhan hidup kita dipertemukan dengan kebutuhan hidup orang lain atau terjadi pertukaran kepentingan. Bagi pedagang-pedagang di pasar tradisional, mereka menjual barang untuk memperoleh penghasilan dan “memenuhi kewajiban” menyediakan barang-barang konsumsi untuk masyarakat dan bagi pembeli, mereka dapat memperoleh barang secara mudah dan murah. Dua kepentingan yang berbeda dan kepentingan tersebut terkait dengan kebutuhan hidup kedua belah pihak telah menjadi pendorong terjadinya interaksi sosial dan aktivitas komunikasi di pasar tradisional.

Praktek komunikasi tidak semata-mata sebagai “peristiwa sosial atau kejadian sosial” biasa seperti dalam pengertian umum orang-orang awam. Praktek komunikasi merupakan sebuah “realitas sosial” (kenyataan sosial), yang berisi fakta-fakta sosial komunikatif dan tafsir subjektif atas praktek komunikasi tersebut. Jika kita mengamati praktek komunikasi dua orang laki dan perempuan yang berbelanja di minimarket, seperti *IndoMaret*, kita akan mengetahui seorang lelaki sedang memilih roti, minuman kemasan, dan rokok dan seorang perempuan mengambil gula, sabun mandi, dan pasta gigi, terus keduanya membawa barang-barang tersebut ke kasir untuk dibayar. Selesai transaksi kedua orang keluar dari *IndoMaret* dan bergegas pulang ke rumah masing-masing. Peristiwa sosial transaksi begitu cepat berlalu, singkat, dan efisien, tanpa tawar-menawar seperti halnya di pasar tradisional. Rangkaian aktivitas berbelanja kedua orang tersebut merupakan fakta-fakta sosial yang benar-benar terjadi, objektif, dan apa adanya.

Fakta-fakta sosial di atas akan menjadi sebuah “realitas sosial” jika kita memberikan tafsir dan makna atas fakta sosial

tersebut. Misalnya, pola-pola dan karakteristik transaksi yang cepat dan efisien di *IndoMaret* itu merupakan kebutuhan fungsional dari sebagian masyarakat kita yang tidak lagi memiliki waktu, kesempatan, dan tenaga yang cukup untuk bertawar-menawar karena kondisi kehidupan masyarakat kita yang semakin kapitalistik. Contoh lain, pertemuan Amal dengan Pak Gimman di kantor desa. Amal langsung menjabat tangan Pak Gimman dengan *salim* (cium tangan) dan berbicara dengan menggunakan tingkat tutur *krama inggil* (ragam bahasa tinggi). Pak Gimman menimpali pembicaraan dengan Amal menggunakan tingkat tutur *ngoko* (ragam bahasa rendah). Tafsir atas fakta sosial tentang pertemuan dua orang itu adalah bahwa Amal sangat menghormati Pak Gimman karena mungkin beliau adalah guru mengaji ketika Amal masih sekolah dasar atau seorang tokoh masyarakat di kampungnya yang sangat dihormati. Dengan demikian, realitas sosial merupakan integrasi antara fakta sosial dan hasil tafsir atas fakta sosial tersebut (Jacky, 2015:32-35).

Contoh praktek komunikasi lainnya dalam kaitan dengan realitas sosial dapat kita lihat pada transaksi jual-beli antara penjual kue dan pembelinya di pasar tradisional. Ibu Minah adalah penjual kue yang sudah lama berjualan di pasar tradisional. Seperti biasanya, ketika menawarkan dagangannya kepada calon pembeli yang lalu-lalang di depannya, terus ada seorang pembeli perempuan muda, sebut saja Ovilia, menghampiri dagangan Ibu Minah. Ovi baru pertama kali membeli kue-kue pada Ibu Minah, meskipun setiap akhir pekan ia berbelanja di pasar itu. Setelah bertanya harga dan tawar-menawar, akhirnya Ovi membeli 3 jenis kue masing-masing 5 buah, sehingga jumlah kue yang dibeli Ovi sebanyak 15 biji, dengan harga Rp 30.000,00. Sebelum kue dibungkus, Ibu Minah memberi tambahan 2 kue lagi kepada Ovi

sebagai *embuh* dan Ovi menerima bungkus kue itu dengan mengucapkan, “Terima kasih bu!”.

Transaksi jual-beli kue di atas, dari awal hingga akhir, merupakan suatu proses sosial dan menggambarkan terjadinya fakta-fakta sosial. Fakta-fakta sosial demikian tidak secara otomatis berubah menjadi realitas sosial jika kita tidak memberikan tafsir sosial terhadap fakta-fakta sosial tersebut. Kita dapat memberikan tafsir atas peristiwa transaksi tersebut bahwa pemberian tambahan (*bonus*) dua kue kepada Ovi merupakan bagian dari strategi Ibu Minah untuk menjadikan Ovi sebagai calon pembeli langganan, untuk mendekatkan hubungan sosio-emosional antara penjual dan pembeli, dan membangun kepedulian bersama, apalagi Ovi baru sekali membeli kue kepada Ibu Minah, sehingga kelak dapat memberikan keuntungan ekonomi pada Ibu Minah secara berkelanjutan. Tafsir demikian tidak hanya satu karena fakta-fakta sosial bersifat multitafsir.

Dalam studi etnografi komunikasi, fakta-fakta sosial harus ditransformasikan menjadi realitas sosial karena sesuai dengan pencapaian tujuan akhir studi etnografi komunikasi. Namun demikian, hasil penafsiran dan pemaknaan suatu fakta sosial interaksi komunikatif harus bersumber dari perspektif partisipan (*emik*). Dalam perspektif fenomenologis, suatu realitas sosial, seperti praktek komunikasi tidaklah bersifat *tunggal*, tetapi bersifat *jamak* atau *ganda*, yang memuat dimensi subjektif dan objektif dari partisipan aktivitas komunikasi (Zeitlin, 1995:221; Jacky, 2015:145-146). Dimensi objektif berkaitan dengan ujaran kebahasaan yang diproduksi oleh alat ucap individu-individu yang terlibat interaksi sosial disertai kinesik dan unsur-unsur suprasegmental, sedangkan dimensi subjektif berkaitan dengan motif-motif subjektif, maksud pribadi, nilai-nilai, dan kepentingan

yang tersembunyi dibalik ujaran-ujaran kebahasaan secara nyata dari para pelibat interaksi sosial tersebut. Hal demikian sama dengan ketika kita memahami suatu ujaran kebahasaan seseorang melalui perspektif teori tindak tutur yang di dalamnya mengandung unsur lokusi, illokusi, dan perlokusi. Unsur illokusi dan perlokusi tidak mudah diprediksi maknanya karena berada di dalam pikiran, hati, dan maksud pengujarnya. Oleh sebab itu, suatu peristiwa komunikatif tidak hanya memproduksi tindak kebahasaan dan melakukan pertukaran pesan-pesan objektif antarpener, tetapi juga menjadi ruang untuk mewujudkan motif-motif subjektif para pelaku peristiwa komunikatif.

BAB VI

SUDUT PANDANG MEMAHAMI KAJIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI

6.1 Komunitas T tutur: Subjek Kajian

Salah satu faktor yang ikut menentukan kelangsungan hidup suatu masyarakat adalah interaksi sosial, yang kemudian menjadi basis pembentukan suatu komunitas tutur (*speech community*). Anggota-anggota suatu komunitas tutur memiliki kemampuan komunikatif berinteraksi di antara mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik tujuan individual maupun tujuan bersama. Suatu komunitas tutur memiliki seperangkat identitas untuk membedakan diri dengan komunitas yang lain dan menjunjung tinggi norma-norma yang mengatur interaksi sosial di antara anggota-anggotanya.

Misalnya, suatu kelompok sosial disebut sebagai komunitas Jawa atau komunitas Aceh karena mereka memiliki sejumlah identitas budaya yang berbeda dan salah satu identitas tersebut adalah bahasa, yakni bahasa Jawa atau bahasa Aceh. Bahasa Jawa memiliki sistem linguistik yang berbeda dengan bahasa Aceh. Sebagai contoh, jika ada dua-tiga orang Aceh yang hidup di kalangan orang Jawa, tentu orang Aceh ini tidak dapat berkomunikasi dengan orang Jawa jika mereka tidak menguasai bahasa Jawa. Sebaliknya, orang-orang Jawa yang hidup di lingkungan komunitas Aceh tidak akan berkomunikasi dengan baik kalau tidak menguasai bahasa Aceh. Mereka bisa berkomunikasi kalau mereka menggunakan bahasa Indonesia atau telah menjadi penutur bilingual, sehingga interaksi sosial bisa berjalan dengan baik.

Namun demikian, jika di Aceh, orang-orang Aceh tersebut akan berkomunikasi sewajarnya dengan sesama warga Aceh karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Aceh, yang sudah mereka kuasi dengan baik. Penguasaan ini mencakup aspek gramatika, pola-pola berbahasa, penggunaan diksi dan bentuk-bentuk lingual yang sesuai dengan situasi, dan norma-norma sosial-budaya komunikasi. Demikian juga, bagi orang Jawa Jember. Ia akan lebih leluasa berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa di lingkungannya karena menguasai berbagai aspek bahasa tersebut, baik aspek linguistik, maupun aspek nonlinguistik.

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota-anggota masyarakat dapat berbahasa secara timbal-balik karena mereka memiliki sistem bahasa yang sama, seperti orang Jawa di antara masyarakat Jawa atau orang Aceh di antara masyarakat Aceh. Pada dasarnya, komunitas tutur itu terbentuk karena adanya saling pengertian (*mutual intelligibility*), terutama karena adanya kesamaan dalam kode-kode linguistik dan sikap

sosial-budaya terhadap bahasa yang dimilikinya (Alwasilah, 1985: 43). Keseluruhan orang-orang tersebut merupakan suatu komunitas tutur yang berbeda identitas sosial budayanya.

Untuk menentukan keanggotaan seseorang dalam komunitas tutur, sikap subjektif budaya terhadap bahasa sangat penting diperhatikan karena berkaitan dengan sejarah sosial, kebanggaan budaya, politik, dan identitas kolektif. Misalnya, walaupun bahasa Osing di Banyuwangi secara linguistik merupakan salah satu dialek geografi bahasa Jawa, tetapi orang-orang Osing tidak mau eksistensi bahasa Osing yang dimilikinya sebagai bagian dari bahasa Jawa. Mereka beranggapan bahwa bahasa Osing adalah bahasa yang berbeda dari bahasa Jawa sehingga mereka merasa tidak menjadi bagian dari komunitas tutur bahasa Jawa. Perspektif kedua ini secara sosiolinguistik dianggap benar.

Sikap subjektif yang sama juga diberikan kepada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan bahasa Brunei. Meskipun di antara ketiga penutur bahasa tersebut bisa saling berkomunikasi, tetapi identitas atau penamaan bahasa nasional masing-masing tetap berbeda, sesuai dengan nama negara. Orang Malaysia tentu tidak mau disebut sebagai anggota komunitas tutur bahasa Indonesia atau bahasa Brunei, meskipun ketiga bahasa bersumber dari asal-usul bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu Riau. Orang-orang Riau dapat disebut sebagai anggota dari komunitas tutur bahasa Melayu dan bahasa Indonesia karena Riau sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Dengan demikian, kesamaan asal-usul tidak dapat dijadikan identitas sebagai satu komunitas tutur karena harus diperhitungkan juga identitas politik setiap penutur yang berbeda-beda asal negaranya.

Komunitas tutur merupakan konsep yang fleksibel/lentur dan aktif. Konsep ini bisa digunakan untuk menyebut skala

kesatuan sosial yang luas atau besar atau kecil yang menggunakan bentuk bahasa yang sama dan memiliki penilaian yang sama dalam pemakaian bahasanya. Dalam pengertian seperti ini, setiap kelompok sosial yang terbentuk karena kesamaan tempat, jenis kelamin, lapangan pekerjaan, yang menggunakan bahasa yang sama, memiliki penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasanya, dapat dianggap sebagai *komunitas tutur*. Penyebutan yang sama juga diberikan pada kelompok penutur bahasa dan domain sosial, seperti lingkungan rumah tangga, sekolah, dan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan masalah ini, Fishman (1975) berpendapat bahwa salah satu penentu identitas komunitas tutur adalah jika anggota-anggotanya minimal mengenal satu variasi tutur beserta norma-norma yang mendasari pemakaiannya (dalam Suwito, 1983:20).

Fleksibilitas referensi komunitas tutur berkaitan dengan pengertian “komunitas (*community*) dan masyarakat (*society*)” yang berbeda. Meskipun secara sosiologis kedua konsep tersebut memiliki pengertian yang sama, tetapi secara antropologis komunitas memiliki arti yang spesifik, yakni sebagai kesatuan sosial “setempat”. Dalam sebuah masyarakat desa akan ditemukan sejumlah komunitas sosial, seperti komunitas pedagang pasar, komunitas pesantren, komunitas pendidikan, komunitas seniman, komunitas tukang becak, dan sebagainya. Jika hal ini dikaitkan dengan tindak tutur atau tindak komunikatif, dua atau lima orang yang sedang terlibat transaksi jual-beli sudah dapat disebut sebagai “suatu komunitas tutur”. Demikian juga, jamaah pengajian rutin yang sedang berdiskusi tentang arti penting “kesalehan sosial” dalam masyarakat yang semakin egoistik dan korup dapat disebut sebagai suatu komunitas tutur. Secara antropologis, jumlah anggota-anggota komunitas tutur bersifat relatif, bisa sedikit atau

cukup banyak. Karena itu, penggunaan konsep komunitas tutur lebih fleksibel atau lentur sesuai dengan kondisi realitas sosial daripada konsep “masyarakat tutur”.

Selain sifat kelenturan tersebut, konsep komunitas tutur sebenarnya lebih ditujukan pada aktivitas komunikasi atau interaksi sosial antarpartisipan atau antarpenuhur yang sedang berlangsung. Artinya, para partisipan itu sedang berinteraksi atau bertutur sapa secara timbal-balik dalam suatu percakapan. Jika suatu peristiwa percakapan berlangsung dengan baik berarti para partisipan sudah memahami dengan baik pula perihal pertukaran simbol dan maknanya, norma-norma penggunaan bahasa, interaksi, dan interpretasi, serta kebersamaan yang tercipta di antara partisipan pada saat aktivitas interaksi sosial. Kunci pokok memahami komunitas tutur dalam konteks interaksi sosial secara aktif adalah tersepakatinya “pemahaman bersama” atas aspek-aspek yang menjadi fokus pembicaraan di antara partisipan, sehingga interaksi tersebut bersifat produktif.

Komunitas tutur merupakan subjek kajian etnografi komunikasi, sedangkan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya merupakan objek analisis etnografi komunikasi. Jadi, sifat dari komunitas tutur yang menjadi subjek kajian etnografi komunikasi adalah komunitas tutur aktif atau komunitas tutur yang “sedang bekerja”, bukan komunitas tutur yang bersifat pasif atau dalam keadaan “diam”, tidak beraktivitas sosial. Komunitas tutur yang bersifat pasif tidak dapat diidentifikasi proses dan makna-makna interaksi di antara anggota-anggotanya, sebab makna tercipta melalui proses interaksi sosial yang bersifat kontinyu.

Sebaliknya, dalam komunitas tutur yang bersifat aktif dan sedang bekerja, interaksi sosial yang berlangsung menandai adanya proses pertukaran simbol (verbal-nonverbal), pemaknaan

melalui aktivitas encoding dan decoding informasi, penciptaan pemahaman yang sama, dan berakhir dengan kesepakatan bersama yang berupa setuju atau tidak atas hal-hal yang menjadi topik interaksi. Seorang etnografer dengan metode etnografinya akan mengeksplorasi peristiwa komunikatif tersebut secara maknawi dan memformulasi prinsip-prinsip budaya yang mendasari interaksi sosial partisipan. Hanya komunitas tutur aktif yang dapat memberikan umpan balik kepada peneliti etnografi komunikasi untuk melakukan tafsir dan memaknai interaksi sosial yang terjadi.

Komunitas tutur yang menjadi subjek kajian adalah komunitas tutur yang mempraktekkan bahasa dalam pengertian sehari-hari dan digunakan oleh individu-individu yang normal secara sosio-psikologis. Kelompok-kelompok sosial yang anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang abnormal (tuna rungu, bisu, autis atau idiot) tidak dapat dijadikan subjek kajian etnografi komunikasi. Bahasa tubuh atau bahasa sandi yang mereka gunakan untuk interaksi sosial adalah bahasa rekayasa dan mudah diprediksi maknanya, termasuk aturan-aturan penggunaannya. Simbol dan makna bahasa mereka sudah memiliki “pedoman baku” sehingga tidak memerlukan tafsir dan pemaknaan yang *njlimet*. Barangkali dalam kaitan dengan hal ini perlu diperhatikan pernyataan Sudaryanto (1983:22) tentang tipe bahasa yang menjadi objek kajian linguistik, “Linguistik hanya menyelidiki bahasa orang-orang normal, yakni normal berbahasa atau normal dalam menggunakan bahasa. Bahasa orang-orang yang tidak normal atau lebih tepatnya bahasa yang abnormal, menjadi objek studi ilmu lain, seperti neurolinguistik, patologi linguistik, atau apasiologi”. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa bahasa orang-orang abnormal *bukanlah* objek studi etnografi komunikasi.

Bahasa orang-orang yang abnormal sangat kering makna karena minim kreativitas dan produk sebuah kapasitas intelektual (IQ) yang sangat terbatas. Selain itu, tema-tema budaya yang harus dieksplorasi dengan pendekatan emik dan metode standar dalam pengumpulan data riset etnografi tidak dapat dijalankan secara normal. Tema-tema budaya yang ditemukan (kalaupun ada dan bisa diperoleh) diperkirakan bersifat monoton dan dangkal maknanya. Dengan perspektif demikian, contoh kajian etnografi komunikasi yang ditujukan kepada anak-anak abnormal (tuna rungu) di sekolah luar biasa (Kuswarno, 2008:75-156) merupakan contoh pilihan topik yang tidak tepat. Hal ini disebabkan oleh kekurangoptimalan anak-anak abnormal sebagai subjek kajian yang karena keterbatasan daya intelektualnya tidak akan memberikan kontribusi kepada peneliti untuk mencapai tujuan akhir dari studi etnografi komunikasi, yakni perumusan dan penemuan tema-tema budaya.

6.2 Bounded Communicative Event

Komunitas tutur merupakan basis sosial berlangsungnya berbagai macam kepentingan peristiwa komunikatif. Menurut Dell Hymes (1972), sebuah peristiwa komunikatif harus memenuhi delapan komponen yang biasanya disingkat dengan SPEAKING, yaitu *Setting and scene*, *Participants*, *Ends (purpose and goal)*, *Act sequences*, *Key (tone or spirit of act)*, *Instrumentalities*, *Norms of interaction and interpretation*, dan *Genre*. Adanya syarat-syarat demikian menunjukkan bahwa suatu peristiwa komunikatif merupakan gejala sosial yang kompleks. Komponen-komponen komunikatif tersebut dalam rumusan Fishman dapat disederhanakan ke dalam “who speak, what language, to whom, when, and what end” (Chaer dan Agustina, 2004:49).

Kedelapan komponen merupakan pembatas terhadap suatu peristiwa sosial yang disebut sebagai “peristiwa komunikatif”. Dengan kata lain, suatu peristiwa komunikatif adalah peristiwa yang ter(di)batasi. Suatu interaksi sosial yang berlangsung secara tiba-tiba, sambil lalu, atau sekedaranya tidak secara otomatis disebut sebagai peristiwa komunikatif. Misalnya, ketika di Jalan Kalimantan, depan Kampus Universitas Jember terjadi tabrakan antara pengendara sepeda motor dan mobil Terrios dan mengakibatkan pengendara luka parah, secara spontan orang berkerumun (*crowd*) di tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang itu saling bertanya satu sama lain untuk mengerti mengapa kecelakaan bisa terjadi. Pertanyaan tersebut belum sempat dijawab lengkap, sang penanya sudah pergi melanjutkan perjalanan. Kemudian, datang lagi dua orang yang lain dan bertanya tentang beberapa hal kepada seseorang, terus pergi. Ada juga, orang-orang yang berdiam diri menyaksikan korban kecelakaan tergeletak, sedangkan yang lain mengatur arus lalu lintas agar berjalan lancar. Setelah polisi datang dan peristiwa tersebut diproses, berangsur-angsur kerumunan orang-orang itu membubarkan diri.

Suasana di tempat kejadian terkesan “hiruk-pikuk” dan tidak ada pola-pola interaksi sosial yang stabil. Orang datang-pergi silih berganti semauanya. Ada interaksi antarindividu, tetapi tidak jelas tujuannya. Berbagai hal yang terkait interaksi sosial di tengah-tengah kerumunan orang tersebut lebih bersifat sambil lalu, tidak serius, tujuan kabur, dan sebagainya. Gambaran fenomena sosial demikian tidak dapat disebut sebagai peristiwa komunikatif yang mengandung delapan komponen di atas. Kerumunan orang seperti ini juga ditemukan di halte tempat pemberhentian angkota menghampiri calon penumpang; sekelompok orang yang lalu-lalang, datang dan pergi menyaksikan penjual obat kuat sedang

berpromosi secara atraktif di pasar desa; dan mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengobrol kesana-kemari di teras ruang kelas. Selain itu, berbagai aktivitas percakapan atau interaksi sosial di terminal, bandara, stasiun kereta api, dan di tempat-tempat lain yang tidak jelas topik pembicaraannya, sambil lalu, tidak bertujuan hanya basa-basi mengisi waktu senggang, dan peserta interaksi sering berganti-ganti, tidak dapat disebut sebagai suatu peristiwa komunikatif. Peristiwa komunikatif yang mereka jalani juga bukan suatu peristiwa komunikatif yang terbatas (*bounded communicative event*).

Selain kedelapan komponen komunikatif di atas, peristiwa komunikatif yang terbatas ditandai oleh hal-hal berikut ini (Kusnadi, 2013:16-17).

1. Interaksi sosial bersifat nyata atau aktual dan terjadi dalam berbagai bidang/urusan kehidupan sehari-hari masyarakat, serta dalam berbagai kepentingan partisipan.
2. Terjadi pada suatu aktivitas masyarakat, situasi sosial, tempat, dan waktu tertentu. Misalnya, interaksi sosial pada saat bimbingan skripsi, jual-beli di toko atau pasar tradisional, kegiatan produksi ekonomi (penangkapan ikan di laut dan industri pengolahan), rembug dengan keluarga, rapat desa, memberi nasehat anak, meminang calon menantu, bertamu untuk suatu keperluan, upacara, diskusi kelas, konsultasi pasien ke dokter, pelayanan publik, pengajaran di kelas, dan sebagainya.
3. Interaksi sosial itu merupakan suatu proses berkelanjutan yang memiliki titik akhir dan tersusun oleh beberapa *spot of social interaction*, yang biasanya menjadi “penanda” dari tahapan-tahapan interaksi antarsubjek.
4. Interaksi sosial atau tindak komunikatif memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai atau untuk mengatasi suatu persoalan bersama.

5. Karena ada tujuan yang akan dicapai atau disepakati bersama, maka proses interaksi sosial /peristiwa komunikatif itu terikat oleh batas-batas ruang dan waktu, ada awal dan akhirnya.
6. Adanya konsistensi posisi para pelaku interaksi sosial sampai mereka menyelesaikan persoalan yang dibicarakan atau mengakhiri percakapan. Kerumunan orang yang masing-masing berbicara kesana-kemari dan para pelaku silih berganti datang dan pergi tidak dapat dijadikan objek studi etnografi komunikasi.

Menurut Saville-Troike (1989: 30-32), objek kajian dalam studi etnografi komunikasi adalah kategori-kategori peristiwa komunikatif yang terjadi dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Dengan mengacu pada delapan komponen komunikasi dan empat ketentuan penegas di atas, peristiwa-peristiwa komunikatif yang dapat dijadikan objek studi etnografi komunikasi, di antaranya adalah seminar ilmiah di ruang kelas, perkuliahan etnografi komunikasi di ruang kelas, konsultasi kesehatan dan pengobatan pasien dengan dokter, jual-beli barang konsumsi di pasar *krem-pyeng*, persidangan koruptor dana bansos di pengadilan, wawancara *user* dengan pelamar kerja, dan interaksi antara orang-tua anak dalam keluarga Madura tentang sosialisasi nilai-nilai keagamaan. Aktivitas-aktivitas komunikasi tersebut akan terus berlangsung karena tujuannya relevan dengan kebutuhan masyarakat. Peristiwa-peristiwa komunikatif yang demikian terikat oleh batas-batas ruang, waktu, partisipan, topik, dan tujuan yang dibicarakan. Dalam peristiwa-peristiwa komunikatif itu terdapat batasan awal dan akhir dari suatu perbincangan interaktif.

Untuk memperjelas implemmentasi dari syarat-syarat peristiwa komunikatif di atas, berikut disajikan peristiwa komunikatif tentang konsultasi kesehatan dan pengobatan penyakit antara pasien dan dokter di sebuah puskesmas desa pada pagi hari jam 09.00.

Bab VI: Sudut Pandang Memahami Kajian Etnografi Komunikasi

Petugas : [memanggil] Ibu Risma, silakan masuk bu. Duduk di sana.

Pasien : Ya mbak, terima kasih [ia duduk di depan dokter]

Dokter : Selamat pagi, bu. Ada keluhan apa bu?

Pasien : Pagi dok. Ya, dok. Sejak tiga hari lalu, saya pusing-pusing dan kadang-kadang mau muntah-muntah dok..

Dokter : Mungkin kurang istirahat ya bu? [dokter memeriksa tensi darah, suhu badan, dan perut pasien]

Pasien : Ya, dok. Lima hari lalu, saya kerja lembur terus untuk memenuhi pesanan nasi dan kue kotak yang cukup banyak. Baru tidur jam 2 malam, jam 6 pagi harus bangun menyelesaikan pesanan itu.

Dokter : Makan juga sering tidak teratur?

Pasien : Ya, dok. Kadang perut nggak enak, mau makan.

Dokter : Baik, Ibu istirahat yang cukup ya. Lambung Ibu kena infeksi, tensi darah turun, dan suhu badan cukup panas. Ini penyakit biasa bu. Saya buat resep, nanti Ibu ambil di apotik depan puskesmas ini, tidak jauh. Mudah-mudahan cepat sembuh ya bu.

Pasien : Ya dok, Amin, terima kasih, mohon pamit [Beranjak keluar ruang]

Dokter : Ya, sama-sama.

Jika kita mengamati percakapan pasien dan dokter di atas, batas awal dan akhir percakapan cukup jelas; tempat dan waktu tertentu; topik komunikatif tentang sakit yang diderita pasien dan tujuan komunikatif adalah mencari jalan kesembuhan atas penyakit pasien. Partisipan mulai awal hingga akhir interaksi komunikatif tetap tiga orang, yaitu pasien, dokter, dan petugas

administrasi. Interaksi sosial yang demikian menimbulkan “stabilitas percakapan”, sehingga memudahkan kita untuk menyingkap makna secara komprehensif dibalik suatu peristiwa komunikatif dan tindak-tanduk komunikatif yang terjadi dalam aktivitas komunikasi tersebut.

6.3 Pendekatan Emik dan Etik

Istilah pendekatan emik dan etik berasal dari ahli linguistik Amerika Serikat Kenneth L. Pike (1954) dalam kaitannya dengan analisis data linguistik. Seorang linguist yang meneliti sebuah bahasa biasanya akan melihat data dari perspektifnya sendiri (*etic*) dan melalui analisisnya ia akan menempatkan data dari perspektif penutur asli bahasa yang ditelitinya (*emic*) (Suhardi, 2005: 215). Akan tetapi, “secara substantif” makna kedua konsep tersebut sudah dikemukakan jauh sebelumnya oleh antropolog Franz Boas (1943) dan Edward Sapir (1927) yang juga ahli bahasa. Dengan merferensi pemikiran kedua antropolog, pendekatan emik diartikan sebagai pendekatan untuk memaknai perilaku masyarakat yang diteliti berdasarkan persepsi, pemahaman, dan penilaian subjek penelitian (orang dalam); sedangkan pendekatan etik merupakan pendekatan yang dipakai untuk memaknai perilaku masyarakat yang diteliti berdasarkan persepsi, pemahaman, dan penilaian peneliti, etnografer, atau orang luar (Pelto dan Pelto, 1989:76-78). Tidaklah sepenuhnya benar adanya pandangan bahwa pendekatan emik diasosiasikan semata-mata dengan penelitian kualitatif (antropologis), sedangkan pendekatan etik dikaitkan dengan penelitian kuantitatif.

Baik pendekatan emik, maupun pendekatan etik merupakan dua pendekatan yang dianggap valid untuk memperoleh pemahaman atas realitas sosial yang menjadi objek kajian ilmiah

sepanjang memenuhi prosedur yang benar. Pendekatan mana yang akan digunakan dalam pembahasan etnografis, yakni apakah pengungkapan menurut “kategori warga budaya setempat” (*emik*) atau menurut “kategori peneliti atau antropolog” (*etik*) atau semacam kombinasi antarkeduanya sangat bergantung pada “maksud dan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai oleh peneliti”. Pendekatan emik (*native’s viewpoint*) dirancang untuk membuat orang dapat hidup membaur dalam budaya masyarakat yang diteliti; sedangkan pendekatan etik (*scientists viewpoint*) dirancang untuk menjadikan realitas itu dapat dipahami dalam suatu bingkai perbandingan dengan kebudayaan masyarakat yang lain, tidak untuk memproduksi realitas sosial (Kaplan dan Manners, 199:259). Praktek kedua pendekatan itu mencerminkan ciri dasar kajian antropologis yang bersifat holistik, komprehensif, dan komparatif.

Penggunaan pendekatan emik atau etik lebih berkaitan dengan dimensi epistemologis, yakni bagaimanakah pengetahuan itu divalidasi dan bukan pada bagaimanakah pengetahuan itu diperoleh. Implementasi kedua pendekatan tidak berkaitan dengan metode penelitian, melainkan dengan struktur penelitian. Apakah suatu deskripsi, analisis, eksplanasi, atau klaim tertentu terhadap pengetahuan itu bersifat emik atau etik haruslah semata-mata didasarkan pada prinsip-prinsip epistemologis. Jika dalam klaim pengetahuan emik ditentukan berdasarkan standar pengukuran dan penilaian dari *natives* (komunitas lokal), sedangkan untuk etik evaluasi diberikan oleh para antropolog atau pengamat (komunitas ilmiah). Menurut antropolog Marvin Haris (1979), “Kerja emik mencapai tingkat tertinggi ketika mengangkat informan *native* pada status penilai tertinggi bagi kecukupan deskripsi dan analisis peneliti/pengamat. Pe-

ngujian kecukupan dari analisis emik adalah kemampuannya menghasilkan pernyataan-pernyataan yang dapat diterima *native* sebagai nyata, bermakna, dan sesuai... Kerja etik mencapai tingkat tertinggi tatkala mengangkat pengamat (peneliti) kepada status penilai tertinggi dari kategori-kategori dan konsep-konsep yang digunakan dalam deskripsi dan analisis” (Saifuddin, 2005:90-91).

Suatu deskripsi atau analisis etik dapat diakui sebagai “etik” harus diterima oleh komunitas ilmiah sebagai pembahasan yang sesuai dan bermakna. Syarat-syarat suatu deskripsi disebut “etik” jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: (1) deskripsi harus dianggap bermakna dan sesuai oleh komunitas ilmiah secara luas, (2) deskripsi harus/dapat divalidasi oleh pengamat secara independen, (3) deskripsi harus memenuhi persyaratan berupa aturan-aturan dalam memperoleh pengetahuan dan bukti-bukti ilmiah, (4) deskripsi harus dapat diterapkan secara lintas budaya, serta (5) deskripsi harus memperhatikan kekhususan atau karakteristik kebudayaan yang menjadi objek kajian karena setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia sosialnya. Kelima kriteria tersebut memberikan ruang bagi informan, yaitu *natives* untuk memiliki pengetahuan etik. Dalam hal-hal tertentu, deskripsi etik lebih bernilai daripada deskripsi emik karena etik antropologi lebih bertanggung jawab secara epistemologis. Ini tidak berarti bahwa pengetahuan etik merupakan satu-satunya sasaran penelitian antropologi. Pilihan atas kedua pendekatan tersebut lebih ditentukan oleh motif pertanyaan penelitian yang kita ajukan (Saifuddin, 2005:93-94).

Tujuan utama dari penelitian etnografi komunikasi adalah untuk mengungkap tema-tema budaya yang mendasari sistem interaksi komunikatif yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai bidang pranata sosial. Kajian etnografi

komunikasi memandang aktivitas komunikasi sebagai realitas sosial yang bersifat ganda, yang mencakup fakta-fakta sosial komunikatif dan motif-motif dibalik tindakan komunikatif. Penggunaan metodologi yang bersifat kualitatif (teori, metode, dan teknik) merupakan perangkat yang diharapkan dapat menyingkap dunia maknawi dalam realitas sosial komunikatif tersebut. Dengan mempertimbangkan hal-hal demikian, penelitian etnografi komunikasi lebih relevan jika dilandasi oleh pendekatan emik.

Dalam kaitannya dengan penggunaan pendekatan emik dalam riset etnografi komunikasi, Saville-Troike (1989:130; Ibrahim, 1992:197) mengatakan, “Tujuan utama deskripsi etnografi adalah memperhatikan data secara *emic*, dalam bentuk kategori-kategori (dari) masyarakat tutur yang diteliti; perhatian *etic* dalam bentuk kategori-kategori apriori merupakan tolok ukur awal yang berguna untuk referensi dan perbandingan, tetapi biasanya bukan merupakan tujuan utama deskripsi itu”. Sebagaimana dikatakan oleh antropolog David Lett (1991) bahwa deskripsi emik tidak hanya ditandai oleh penggunaan metode yang relevan untuk memperoleh pengetahuan emik atau fakta deskripsi yang menggambarkan pandangan dunia masyarakat yang diteliti, tetapi yang sangat penting diperhatikan dan dilakukan oleh seorang peneliti emik adalah ia harus secara terus-menerus melakukan cek dan cek kembali (re-cek) data-data yang diperolehnya kepada para informan. Selanjutnya dikatakannya, “Kesimpulan-kesimpulan yang saya kembangkan saya cek kembali dengan para informan untuk menegaskan apakah mereka menganggap pernyataan-pernyataan saya itu sesuai dengan kenyataan dan merepresentasikan secara akurat persepsi dan sikap-sikap mereka” (Saifuddin, 2005:92).

Dalam menerapkan pendekatan emik untuk penelitian etnografi komunikasi, seorang peneliti atau etnografer, pertama-

tama ia harus memahami bahwa penelitian etnografi komunikasi adalah penelitian yang bersifat humanistik. Penelitian ini akan menyingkap dimensi-dimensi kemanusiaan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dari orang-orang yang terlibat interaksi sosial. Kedua, seorang peneliti harus mengembangkan sikap simpati dan empati dalam berinteraksi dengan masyarakat yang diteliti sebagai upaya mempertajam “rasa” dan memperlancar pelaksanaan kerja-kerja etnografi dengan tetap menjaga “jarak sosio-psikologis” sebagai peneliti, sehingga tidak mudah “hanyut perasaannya menuju subjektivitas yang berlebihan” ketika berinteraksi dengan para informan dan menanggapi pembicaraan yang berlangsung. Ketiga, seorang peneliti harus memahami secara konseptual dan terampil mengaplikasikan metodologi kualitatif sebagai sarana yang efektif untuk mengungkapkan dimensi-dimensi kemanusiaan aktivitas komunikatif. Keempat, adanya kemampuan untuk memverifikasi hasil penelitian yang mengarah pada “tingkat abstraksi yang tinggi” sehingga hasil riset tersebut memiliki daya jangkau pemanfaatan yang lebih luas tanpa menghilangkan karakteristik-karakteristik nilai-nilai yang melekat pada identitas masyarakat yang diteliti.

Penerapan pendekatan emik yang benar dan tepat dalam penelitian etnografi komunikasi dapat menghasilkan laporan etnografi yang “hidup dan berbicara” yang di dalamnya memuat proses-proses komunikatif, dunia maknawi dari interaksi sosial, dan berbagai dimensi kemanusiaan yang melingkupi peristiwa komunikatif tersebut. Laporan etnografi komunikasi yang bercorak demikian dapat memberikan kontribusi penting untuk memahami hakikat kemanusiaan kita yang terpantul dalam interaksi sosial sehari-hari.

6.4 Pola-pola Komunikasi sebagai Praktek Budaya

Kebudayaan memiliki tujuh unsur yang bersifat universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem matapencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Kebudayaan mewujudkan diri sebagai: (a) suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya; (b) suatu kompleks aktivitas dan tindakan berpola dalam kehidupan masyarakat; dan (c) sebagai benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 2009:151, 165). Ciri-ciri kebudayaan ini dapat ditemukan di berbagai kesatuan sosial, seperti masyarakat pedesaan/pedalaman/perkotaan, etnik minoritas dan mayoritas, suku bangsa terasing, komunitas gelandangan dan pengemis, komunitas adat, komunitas pesantren, komunitas tutur, dan sebagainya.

Kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang digunakan orang untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial. Pengertian ini memiliki persamaan dengan teori interaksionisme simbolik yang berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan makna (Spradley, 1997:5-7). Sebagai sistem pengetahuan yang kompleks, kebudayaan berisi perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi serta untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya. Dalam pengertian ini, kebudayaan adalah suatu kumpulan pedoman atau pegangan yang kegunaannya bersifat operasional, dalam hal manusia beradaptasi dengan dan menghadapi lingkungan-lingkungan tertentu (fisik/alam, sosial, dan budaya) agar dapat melangsungkan kehidupannya, yakni memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk hidup lebih baik. Karena itu, kebudayaan dinamakan sebagai *blueprint* atau desain menyeluruh dari kehidupan (Suparlan, 1994:105-106).

Kebudayaan merupakan objek disiplin antropologi atau etnografi. Sebagai disiplin ilmu pengetahuan, antropologi memiliki ciri-ciri: (a) pendekatannya bersifat holistik-sistemis yang melihat dan memperlakukan warga masyarakat sebagai manusia dan tidak sebagai agregat atau angka-angka, serta (b) bersifat kualitatif dengan ciri utama yang menekankan pada aspek pemahaman dan bukan pengujian atau penjelasan (Suparlan, 1995:3). Kajian etnografi komunikasi merupakan kajian tentang proses “aktivitas komunikasi sehari-hari” di berbagai ruang sosial untuk memperoleh formulasi pengetahuan nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi dasar berlangsungnya interaksi komunikatif tersebut.

Jika kita menempatkan kebudayaan sebagai “pedoman kehidupan” suatu masyarakat, maka aktivitas komunikatif yang terjadi di berbagai ruang kehidupan masyarakat itu adalah suatu “praktek budaya”. Dua ciri pokok yang menandai suatu praktek budaya adalah bahwa interaksi sosial dalam aktivitas komunikasi tersebut bersifat “berpola” dan didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma budaya. Perilaku berpola merupakan wujud kebudayaan yang kedua dan merupakan ciri umum kebudayaan masyarakat yang dapat disaksikan dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Pola-pola perilaku tersebut terjadi ketika interaksi sosial antarsubjek berlangsung dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Suatu perilaku sosial disebut “berpola” karena perilaku itu dipraktekkan secara berulang-ulang dan melembaga, sehingga dianggap oleh warga masyarakat sebagai perilaku yang ideal. Dalam setiap pranata sosial, perilaku sosial berpola sudah menjadi norma yang harus dipatuhi oleh siapa pun yang akan berinteraksi di ruang pranata tersebut. Jika seseorang memiliki perilaku sosial yang menyimpang dari pola-pola yang seharusnya, berarti ada hal-hal yang tidak beres pada orang tersebut.

Perilaku berpola merupakan perilaku umum dalam suatu masyarakat yang masih memegang teguh kebudayaannya. Sebagai contoh tentang tradisi bertamu ke tetangga yang dilakukan oleh Pak Asim ke rumah Pak Bondet. Tujuannya, mengundang Pak Bondet untuk hadir dalam pengajian warga kampung di rumah Pak Asim. Tema pengajiannya adalah pemberantasan korupsi menurut ajaran keagamaan. Sebelum masuk ke rumah Pak Bondet, Pak Asim mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Tidak seberapa lama, anak Pak Bondet, Rini, membukakan pintu dan menyilakan Pak Asim masuk dan duduk. Di ruang belakang, Rini menyampaikan informasi ke Pak Bondet kalau ada tamu, Pak Asim. Setelah itu, Pak Bondet menemui sambil mengucapkan salam dan duduk bersama. Keduanya terlibat perbincangan hangat dan Pak Asim menyampaikan niatnya mengundang Pak Bondet untuk hadir dalam pengajian di rumahnya. Setelah itu, Pak Asim mohon pamit dan Pak Bondet mengantarnya sampai di depan pintu.

Praktek bertamu atau pola-pola perilaku bertamu seperti di atas sudah berlangsung berabad-abad dan terus akan berlanjut sepanjang masa. Generasi mendatang akan mewarisi tradisi bertamu yang demikian dan mempraktekannya. Karakteristik pola-pola perilaku sosial dan tindak komunikatif yang ada dipengaruhi oleh karakteristik peristiwa (tradisi) bertamu tersebut dan tujuan bertamu. Pola-pola perilaku dan tindak komunikasi bertamu mengakomodasi praktek interaksi tatap muka dan saling berbicara (timbang-balik atau dialogis), sampai terbangun pengertian bersama atas hal-hal yang menjadi tujuan komunikasi. Hal-hal demikian tentu berbeda dengan pola-pola komunikasi dan tindakan komunikatif yang berlangsung dalam kegiatan kotbah Jumat (sholat Jum'atan) yang cenderung searah. Khatib

mengambil peran dominan dalam interaksi komunikatif untuk menyampaikan materi kotbah kepada jama'ah. Tidak ada interaksi aktif yang bersifat timbal-balik atau tanya-jawab antara jama'ah dengan khatib untuk mendiskusikan materi khotbah tersebut. Hal demikian disebabkan oleh: (a) waktu yang disediakan untuk sholat Jumat dan khotbah sangat terbatas, (b) membutuhkan konsentrasi yang tinggi, khususnya bagi jama'ah agar dapat menerima dan meresapi materi kotbah dengan baik, dan (c) fungsi khotbah untuk mengingatkan jama'ah, bukan memahamkan. Ketiga sebab ini menjadi dasar terbentuknya karakteristik pola-pola komunikasi dan tindakan komunikatif ketika khotbah Jumat dan tentu saja hal ini berbeda dengan tradisi bertamu atau pembelajaran di kelas.

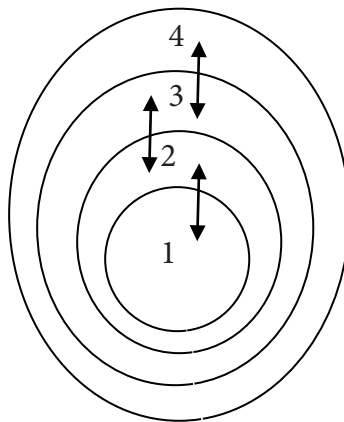
Perubahan pola-pola komunikasi dan interaksi sosial bisa saja terjadi karena perubahan lingkungan dan organisasi ekonomi masyarakat, misalnya dengan tumbuh suburnya pasar modern, seperti *super market* dan *mini market* (Adiwoso, 1984:78-88). Di Kota Jember, *Matahari Departemen Store* mulai berdiri pada awal tahun 1990-an, sedangkan *mini market* mulai marak pada pertengahan tahun 2010-an dan sekarang sudah meluas di kota-kota kecamatan atau desa-desa yang memiliki potensi ekonomi. Pola-pola komunikasinya dalam berbelanja di *super/mini market* memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan struktur interaksi tatap-muka (*face-to-face interaction*), berlapis-lapis, dan humanis di pasar tradisional atau toko-toko konvensional yang menjual kebutuhan pokok. Pola-pola komunikasi dan interaksi sosial di *mini market* mengikuti bentuk organisasi jual-beli modern dan bersifat *goal oriented*, impersonal, efisien, netral, anonim, dan teratur. Ciri-ciri demikian berkesesuaian dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang bersifat individualistik, efisien waktu dan tenaga, orientasi ekonomis, dan mengandalkan kekuatan

kapital dalam relasi-relasi sosial. Ciri-ciri budaya ini merupakan produk atas terjadinya pergeseran basis materi masyarakat perkotaan ke arah jasa dan perdagangan yang semakin mantap.

Meskipun sekarang belum semua lapisan masyarakat berbelanja ke *mini market*, pada saatnya nanti semua akan merasakan layanan *mini market*. Ekspansi pasar *mini market* akan mengakibatkan tergusurnya pasar tradisional dan toko/warung yang menjual kebutuhan pokok yang tidak siap berkompetisi dan dapat mendorong pasar tradisional/toko-warung melakukan reorganisasi ekonomi dan membenahi manajemen sehingga dapat bersaing sehat dengan *mini market*. Persaingan dua organisasi ekonomi ini sampai sekarang masih menjadi persoalan sehingga di beberapa daerah pemerintah setempat menahan laju perluasan *mini market* dengan alasan melindungi pelaku ekonomi mikro yang memasarkan produknya di pasar tradisional atau di toko-toko dan warung yang ada. Pola-pola komunikasi di pasar modern lahir dari sistem ekonomi kapitalistik yang bersifat ekspansif, serakah, dan eksploitatif dan merupakan pola-pola komunikasi baru yang menjadi khazanah masyarakat kita, di samping pola-pola komunikasi yang bersifat tradisional dan konvensional.

Faktor kebudayaan memainkan peranan yang penting dalam membentuk perilaku komunikatif masyarakat. Perubahan-perubahan pada aspek kebudayaan akan mempengaruhi praktek-praktek komunikatif di berbagai ruang interaksi sosial yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pola-pola komunikasi dalam berbelanja di pasar tradisional pedesaan Jawa dan nilai-nilai budaya atau norma-norma interaksi yang mendasarinya dipengaruhi secara berlapis-vertikal oleh: (1) karakteristik interaksi dan tujuan berbelanja di tempat jual-beli

barang, yakni pasar tradisional; (2) norma-norma yang berlaku pada institusi pasar/transaksi tradisional; (3) budaya komunitas desa (kesatuan sosial setempat); dan (4) kebudayaan Jawa sebagai pedoman kehidupan masyarakat desa yang bersifat menyeluruh. Demikian pula dalam berbelanja di pasar modern mini market di daerah perkotaan Jawa, pola-pola komunikasi dan norma-norma interaksi sosial yang mendasarinya dipengaruhi oleh karakteristik: (1) interaksi dan tujuan berbelanja di *mini market*; (2) norma-norma yang berlaku pada institusi pasar modern; (3) budaya komunitas kota (kesatuan sosial setempat); dan (4) kebudayaan Jawa sebagai pedoman kehidupan masyarakat kota yang bersifat menyeluruh. Karakteristik budaya masyarakat desa dan kota merupakan unsur penegas dan pembeda pola-pola komunikasi dan interaksi sosial di pasar tradisional dan pasar modern. Relasi nilai dan norma budaya secara vertikal dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Aktivitas komunikasi sebagai praktek budaya merupakan artefak sosial yang bersifat “hidup dan dinamis”. Kita mesti membedakan hal ini dengan artefak benda-benda material hasil karya manusia, seperti komputer, kuliner, dan desain mode pakaian,

yang bersifat statis dan “mati”. Meskipun kedua jenis artefak budaya ini memiliki potensi perubahan, eksistensi aktivitas komunikasi sebagai artefak sosial “hanya ada” ketika praktek komunikasi itu berlangsung “secara nyata” dalam beragam ruang sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Melalui interaksi yang nyata itu, individu-individu partisipan mengeksplorasi nilai-nilai dan norma-norma budaya, strategi-strategi, resep-resep, dan sebagainya untuk menafsirkan, memaknai, dan melahirkan tindakan sosial interaktif yang sesuai dan adaptif dengan tujuan aktivitas komunikasi. Aktivitas komunikasi berpola yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat “hadir” sebagai perwujudan dari kebudayaan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, pola-pola komunikasi yang termanifestasi dalam interaksi sosial adalah wujud dari praktek kebudayaan yang dimiliki oleh suatu komunitas atau masyarakat.

BAB VII

STRATEGI MENEMUKAN TOPIK PENELITIAN

7.1 Penentuan Topik Penelitian

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa subjek kajian etnografi komunikasi adalah komunitas tutur (*speech community*), sedangkan objek kajiannya adalah interaksi sosial atau interaksi komunikatif berbasis kepentingan (sosial-budaya, politik, dan ekonomi) yang dilakukan oleh komunitas tutur tersebut. Topik penelitian berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dalam objek kajian etnografi komunikasi. Dengan kata lain, di dalam objek kajian menyimpan bermacam-macam topik penelitian yang dapat diformulasikan peneliti dalam bentuk judul-judul penelitian. Pemilihan dan penetapan suatu topik penelitian atau lebih kongkretnya “judul penelitian” sangat ditentukan oleh ketiga hal berikut.

Pertama, minat yang ada pada diri peneliti. Minat ini dipengaruhi oleh kedekatan hubungan peneliti dengan peristiwa interaksi komunikatif yang akan dipilih atau peneliti telah memiliki pengetahuan yang relevan dengan minat tersebut yang diperolehnya melalui proses belajar secara intensif. Misalnya, seorang peneliti yang orangtuanya bekerja sebagai pedagang pasar, maka ia memiliki kedekatan dengan aktivitas perdagangan itu atau peneliti sudah memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang dunia perdagangan melalui pembacaan literatur.

Kedua, pemilihan literatur yang memadai, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk menunjang kegiatan penelitian etnografi komunikasi dibutuhkan beberapa kategori literatur di bidang etnografi atau antropologi, teori-teori sosial dalam sosiologi, ilmu komunikasi, dan ilmu penunjang yang terkait langsung dengan karakteristik topik, seperti transaksi bisnis/ekonomi. Pemilihan literatur seperti itu sangat relevan jika seseorang akan meneliti tentang interaksi komunikatif dalam transaksi jual-beli di pasar tradisional, pasar modern, atau bisnis berjejaring vertikal (*multilevel marketing*).

Ketiga, rencana pemilihan topik diorientasikan pada *trend* kepentingan masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Misalnya, pada sekarang ini, isu pelayanan publik merupakan isu strategis dalam memahami hubungan fungsional antara negara-masyarakat, khususnya dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan perizinan. Kajian etnografi komunikasi terhadap isu pelayanan publik tersebut akan memberikan kontribusi aksiologis tentang bagaimanakah kegiatan pelayanan publik yang baik harus dilakukan sehingga dapat memberikan kepuasan pada masyarakat. Bisa juga pemilihan minat topik riset berkaitan

dengan “motif pribadi” peneliti setelah menyelesaikan sarjana. Apabila seorang peneliti setelah lulus sarjana bermaksud bekerja di instansi perbankan, ia akan memilih topik penelitian tentang interaksi komunikatif antara petugas bank dengan calon nasabah dalam akad kredit usaha kecil-menengah. Pengetahuan tentang seluk-beluk perkreditan dan bagaimanakah pelayanan publik sebaiknya dilakukan kepada nasabah yang didapatkan selama riset berlangsung akan memberikan bekal yang memadai jika ia diterima bekerja di suatu instansi perbankan setelah menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya.

Keempat, memahami bahwa studi etnografi komunikasi adalah studi yang bersifat holistik-integratif dan mikro dengan tingkat deskripsi kualitatif yang mendalam. Maksud holistik-integratif adalah bahwa analisis atas topik yang dipilih selalu ada kaitannya dengan aspek-aspek lain dalam jalinan integratif. Pengertian mikro adalah bahwa studi etnografi komunikasi mengambil topik dengan skala yang bersifat “kecil”, tetapi dianalisis secara mendalam, sehingga topik tersebut dapat menjadi “besar” dan terang-benderang gejalanya. Misalnya, di pranata Program Studi Sastra Indonesia, terdapat beberapa ranah interaksi komunikatif yang bisa diidentifikasi, seperti interaksi komunikatif antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran (perkuliahan) di kelas, pembimbingan skripsi, dan perwalian mahasiswa. Topik yang dipilih cukup satu aktivitas interaksi komunikatif saja, yakni “interaksi komunikatif antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran di kelas”, sehingga tidak semua interaksi komunikatif dipilih. Tuntutan ini mengharuskan peneliti untuk bekerja secara fokus dan serius melakukan penelitian.

Dengan demikian, pemilihan topik penelitian tidak dapat dilakukan asal-asalan, yang penting bisa cepat lulus sarjana, tetapi

harus mempertimbangkannya secara saksama dan berorientasi pada kemampuan peneliti dan kebutuhan masyarakat luas. Apabila minat terhadap suatu topik penelitian sudah didapatkan, langkah selanjutnya adalah menggali dasar-dasar pemikiran akademis mengapa topik tersebut dipilih sebagai objek penelitian. Dalam hal ini diperlukan strategi sebagai berikut.

Pertama adalah melakukan “tinjauan pustaka” dengan jalan memeriksa, membaca, dan memahami kajian-kajian terdahulu yang berupa artikel jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki relevansi dengan minat topik peneliti. Aspek-aspek yang dipahami dan diresume adalah topik dan fokus kajian, pendekatan yang digunakan (metode), dan kesimpulan yang terkait dengan implikasi teoritis. Tujuan utama dari tinjauan pustaka ini adalah: (a) menemukan topik riset dan memetakan secara jelas dan tegas posisi topik penelitian yang akan dijadikan objek penelitian, sehingga tidak terjadi duplikasi topik riset yang berpotensi menimbulkan plagiasi; (b) memperluas cakrawala atau wawasan pengetahuan peneliti tentang hal-hal yang terkait dengan topik penelitian yang dipilih; serta (c) menyiapkan konsep, teori, dan metode yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kajian-kajian terdahulu ini menjadi pembanding atas nilai orisinalitas topik yang akan dipilih peneliti.

Kedua, melakukan observasi terbatas di lapangan dan menemukan karakteristik topik yang diminati oleh peneliti sehingga topik tersebut layak untuk diteliti karena dipastikan akan menghasilkan hal-hal yang baru. Dalam kajian etnografi, hasil pengamatan lapangan dan pengalaman pribadi peneliti merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan sebagai sumber topik penelitian. Sebagai contoh, seorang peneliti

akan mengkaji tentang pola-pola interaksi komunikatif dalam kegiatan penangkapan ikan yang melibatkan subjek riset *juragan* (nakhoda/juru mudi) dan nelayan buruh (*pandhiga*). Topik ini dipilih peneliti karena sistem interaksi komunikatif di sektor penangkapan memiliki ciri spesifik, seperti bersifat “komando” dengan peran dominan *juragan*, ekonomis ujaran tetapi bermakna luas dan mampu menggerakkan tindakan kolektif *pandhiga* secara cepat, serta berorientasi pada hasil (tangkapan ikan).

Ketiga, menggunakan pernyataan teoritis, “teori substantif” atau pemikiran konseptual dari literatur etnografi komunikasi dan ilmu-ilmu lain atau hasil-hasil penelitian terdahulu tentang suatu peristiwa komunikatif. Misalnya, penerapan/implementasi perspektif etnografi komunikasi yang melihat peristiwa komunikatif sebagai praktek budaya lokal, yang di dalamnya memuat nilai-nilai budaya dan bermanfaat sebagai pemelihara integrasi sosial masyarakat. Penerapan prinsip teoritis ini dalam berbagai peristiwa komunikatif merupakan upaya memahami makna peristiwa komunikatif bagi komunitas tuturnya, pengayaan kajian etnografi komunikasi, dan penggalian tema-tema budaya (“teori substantif”) yang mendasari pola-pola interaksi sosial.

Strategi lain yang lebih sederhana untuk memperoleh topik-topik penelitian etnografi komunikasi adalah dengan memahami masalah-masalah sosial yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Jadi, penemuan topik penelitian itu berangkat dari permasalahan sosial aktual yang terjadi atau sedang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya: (a) mengapa banyak pemuda di suatu kampung terlibat perjudian, narkoba, tawuran, dan minum-minuman keras di kota besar?; (b) mengapa banyak warga masyarakat di suatu dusun yang tidak suka berobat ke puskesmas terdekat?; (c) mengapa nilai pelajaran bahasa Indonesia siswa klas

2 SMPN X selalu rendah?; dan (d) mengapa banyak mahasiswa yang dari desa-desa pedalaman terjerat oleh paham keagamaan radikal?

Keempat permasalahan di atas dapat dijawab dengan pendekatan etnografi komunikasi. Jika seorang peneliti memutuskan memilih topik yang terkait dengan persoalan (a), ia harus punya asumsi bahwa kenakalan pemuda tersebut terjadi karena tiadanya pola-pola komunikasi dialogis yang kondusif dan empati sosial di lingkungan keluarga pemuda. Asumsi ini akan dibuktikan oleh peneliti melalui serangkaian kegiatan pengumpulan data dan pemaknaannya dari berbagai peristiwa tutur yang melibatkan si pemuda dan orangtuanya/keluarganya. Kenakalan pemuda bisa saja terjadi karena orangtua bersifat otoriter terhadap anak-anaknya dan kurang mendengarkan aspirasi anak-anaknya karena kesibukan yang luar biasa untuk mempertahankan kehidupan di kota besar. Akibatnya, para pemuda melampiaskan “tekanan kejiwaan” mereka dengan melakukan tindakan-tindakan anti-sosial sehingga mereka merasa terpuaskan jiwanya. Untuk memahami persoalan (a), peneliti harus membaca buku-buku sosiologi/ antropologi yang terkait dengan masalah sosial-ekonomi masyarakat perkotaan dan buku-buku lain yang relevan untuk menunjang pembahasan topik penelitian.

Strategi-strategi penemuan topik penelitian di atas untuk menggambarkan bahwa pilihan dan penetapan suatu topik penelitian etnografi komunikasi harus melalui proses-proses dan prosedur akademis yang benar dan tepat. Peneliti tidak boleh secara tiba-tiba menentukan suatu topik untuk diteliti tanpa melewati prosedur akademis yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Topik penelitian bukanlah entitas gratis yang jatuh dari langit, juga bukan sesuatu hal yang berada di ruang hampa

sosial. Topik penelitian bersumber dari pengetahuan akademis dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, target lain dari kegiatan penelitian adalah memberikan kontribusi pemikiran untuk mengatasi masalah kemasyarakatan.

Karena itulah, seseorang melakukan suatu penelitian karena adanya masalah akademis dan masalah sosial yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya. Jika tidak ada masalah, kegiatan penelitian tidak perlu dilakukan karena hanya akan menghabiskan energi secara sia-sia. Kejelian dan kemampuan menemukan topik penelitian merupakan suatu tantangan sosio-akademik bagi seorang peneliti. Topik penelitian yang baik mencerminkan pula kapasitas akademik penelitinya sehingga dibutuhkan kerja keras dan optimisme meraih keberhasilan. Modal utama yang harus dimiliki oleh seorang peneliti/akademisi yang andal untuk menemukan topik penelitian yang menarik adalah wawasan akademis yang luas dan mendalam dengan aset pustaka ribuan judul, rajin membaca, memiliki kepekaan sosial, serta ketajaman berpikir dialektika-integratif. Fakta menunjukkan bahwa sering ditemukan dari penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi yang tidak menggambarkan prosedur dan proses yang benar dalam menemukan dan menentukan suatu topik penelitian.

7.2 Informan Penelitian

Sebelum melakukan interaksi sosial dengan informan, biasanya ketika akan memasuki sebuah lokasi penelitian, seorang peneliti akan menemui terlebih dahulu *gate keeper* atau juru kunci (Basrowi dan Suwandi, 2008: 215-216). *Gate keeper* adalah individu-individu yang memiliki “otoritas tradisional” untuk mengizinkan peneliti masuk ke desanya melakukan kegiatan penelitian. Biasanya mereka

(*gate keeper*) adalah tokoh-tokoh yang dikenal luas oleh penduduk lokal dan memiliki pengetahuan yang mumpuni dan peran sosial yang penting di masyarakatnya. Mereka sebagai “penjaga pintu” suatu desa (lokasi penelitian) yang memiliki “kewenangan mengatur” orang-orang lalu lalang keluar-masuk desanya. Jika *gate keeper* sudah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di desanya, biasanya orang-orang desa yang akan diteliti tidak akan menolak kehadiran peneliti. *Gate keeper* merupakan penjamin dari keberadaan peneliti di desanya. Ada kemungkinan juga *gate keeper* berperan ganda sebagai informan kunci atau informan.

Dalam penelitian sosial yang bersifat kualitatif, informan (*informant*) adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informasi ini berkaitan dengan topik, fokus, atau masalah penelitian. Informan menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka di dalam pedoman wawancara yang diajukan oleh peneliti. Pengertian informan berbeda dengan *responden*. Kedua konsep itu sering dikacaukan pengertiannya. Responden adalah orang yang merespon (menjawab) pertanyaan tertutup (*quesioner*) yang diajukan oleh peneliti. Jawaban seorang responden otomatis menjadi “data penelitian”, sehingga tidak perlu diuji lebih lanjut keabsahannya. Yang perlu dipikirkan adalah ketepatan dan kelayakan membuat kuesioner yang berkualitas. Responden adalah satuan individu yang merepresentasikan sampel penelitian. Karena itu, responden merupakan perangkat konseptual yang dikenal dalam penelitian kuantitatif. Konsep lain yang berkaitan dengan responden adalah *populasi* dan *sampel*. Ketiga konsep tersebut tidak digunakan dalam penelitian kualitatif.

Bagi seorang peneliti kualitatif, seperti peneliti etnografi komunikasi, informan adalah sumber informasi primer yang sangat

penting. Informasi tersebut tidak secara otomatis berupa (menjadi) data penelitian. Untuk memperoleh keabsahan dan keakuratan suatu informasi harus diuji dengan informasi pembanding dari informan lain sebagai sumber informasi. Sekurang-kurangnya, jumlah informan pembanding berasal dari 3-5 orang dan semakin banyak informasi pembanding akan semakin baik. Setelah dicek, recek, dan cek-silang (*check*, *recheck*, dan *cross-check*) dengan sumber-sumber informasi yang lain akan terkonstruksi suatu informasi yang komprehensif, akurat, representatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kualitas kebenarannya. Informasi yang sudah terseleksi ini disebut “data” atau data adalah informasi yang terseleksi melalui sistem *triangulasi* sumber (informan). Data merupakan komponen dasar dalam kegiatan analisis penelitian.

Pada umumnya dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi dua, yaitu informan kunci (*key informant*) dan informan. Informan kunci atau *informan pengamat* adalah individu-individu di lokasi penelitian yang memiliki pengetahuan luas tentang sejarah perkembangan masyarakatnya dari waktu ke waktu. Pengetahuan kemasyarakatan ini mencakup aspek-aspek sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Informan atau *informan pelaku* adalah individu-individu di tempat penelitian yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perihal yang menjadi objek dan fokus penelitian. Mereka adalah pelaku dari perihal (objek/topik riset) yang akan diteliti (Afrizal, 2014:139-140). Kadang kala ada juga pembagian informan yang berbeda, seperti menjadi *informan kunci*, *informan utama*, dan *informan tambahan*. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki “berbagai informasi pokok” yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama adalah mereka yang terlibat dalam interaksi sosial (objek/topik riset) yang sedang diteliti. Informan tambahan adalah

mereka yang dapat memberikan “informasi pelengkap” meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendrarso, 2007:171-172).

Kategori-kategori informan manakah yang dipilih sebagai subjek penelitian sangat bergantung pada topik dan karakteristik data penelitian. Misalnya, untuk dua topik riset etnografi komunikasi tentang: (1) interaksi komunikatif dalam transaksi jual-beli barang di pasar tradisional desa dan (2) interaksi komunikatif antara orang tua dan anak dalam pewarisan nilai-nilai budaya Madura. Kategori informan pada topik pertama adalah sebagai berikut: informan kunci adalah kepala desa, kepala dusun, atau tokoh informal masyarakat; informan utama adalah individu-individu yang berstatus sebagai penjual dan pembeli; dan informan tambahan adalah para petugas pasar yang tidak terlibat langsung dalam praktek jual-beli barang. Pada topik kedua, yang termasuk informan kunci atau informan pengamat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memahami aspek-aspek kebudayaan Madura di lokasi penelitian dan informan atau informan pelaku adalah anggota-anggota keluarga inti (orang tua dan anak) yang terlibat dalam praktek pewarisan nilai-nilai budaya. Dalam topik kedua ini informan kunci merangkap sebagai informan tambahan atau informan penunjang. Seorang peneliti memiliki kebebasan untuk membuat kategori informan sesuai dengan kebutuhan penelitiannya.

Menurut Spradley (1997:61-70), syarat-syarat seseorang ditetapkan sebagai informan, khususnya dalam studi etnografi komunikasi adalah sebagai berikut.

1. Seorang informan adalah anggota dari suatu masyarakat tutur yang akan diteliti dan berusia dewasa.
2. Seorang informan telah hidup dalam masyarakat tuturnya dalam waktu yang cukup lama secara terus-menerus, sehingga

- memiliki kemampuan penguasaan kehidupan sosial-budaya, ekonomi, dan politik masyarakatnya dengan baik.
3. Seorang informan adalah orang yang bisa menjelaskan segi-segi kebudayaan masyarakatnya secara *apa adanya*, tanpa memasukkan analisis pendapat pribadinya.
 4. Seorang informan harus memiliki waktu luang yang cukup untuk memberikan informasi kepada peneliti secara bebas-terbuka, sehingga informasi yang dieksplorasi oleh seorang peneliti cukup komprehensif.
 5. Jumlah informan yang dipilih bersifat relatif sesuai dengan kecukupan dan kualitas data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal adanya ketentuan batasan jumlah informan yang harus diwawancarai.

Selain syarat-syarat umum di atas, untuk mendapatkan individu-individu informan dapat diterapkan dua teknik, yaitu teknik purposif/kesengajaan (*purposive*) dan teknik gelinding bola salju (*snowballing*) (Afrizal, 2014:140-142). Teknik purposif diawali oleh peneliti dengan membuat kriteria informan yang lebih terfokus, spesifik, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria ini digunakan untuk menjaring salah satu kategori informan, yaitu informan utama atau informan pelaku karena untuk kategori informan kunci atau informan tambahan sudah kita buat kriterianya. Jika topik riset yang kita pilih tentang interaksi komunikatif dalam transaksi jual-beli barang di pasar tradisional desa, maka syarat informan utama atau informan pelaku (penjual dan pembeli) adalah sebagai berikut: (a) penduduk lokal atau dari desa sekitarnya, berusia dewasa antara 25-45 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, (b) memiliki usaha dagang mandiri dengan pengalaman minimal 5 tahun terakhir, (c) normal berbahasa dan menguasai dengan baik bahasa pengantar (bahasa lokal) yang

digunakan dalam transaksi jual-beli, dan (d) dalam seminggu minimal dua kali berbelanja di pasar. Kriteria (a,b,c) digunakan untuk menjaring informan “penjual”, sedangkan kriteria (a,c,d) untuk menjaring informan “pembeli”. Dari segi skala substansi data, teknik purposif lebih diarahkan untuk memperoleh data yang lebih terfokus dan mendalam.

Teknik *snowballing* digunakan untuk mendapatkan informan secara berjejaring-vertikal. Para peneliti yang tidak/belum mengenal dengan baik seluk-beluk kehidupan masyarakat yang akan diteliti dan memerlukan informasi yang bersifat umum dalam waktu singkat dapat menerapkan teknik ini. Pada awal masuk di lokasi penelitian, peneliti dapat menemui langsung kepala desa, tokoh-tokoh informal masyarakat, atau orang-orang yang dituakan. Dari mereka ini, peneliti direkomendasikan untuk menemui orang-orang lain yang dipandang layak memberikan informasi kepada peneliti. Proses ini terus berkembang ke banyak informan sampai dengan mencapai penemuan informan utama atau informan pelaku yang menjadi subjek-fokus riset peneliti. Tentu saja penemuan informan utama ini melalui kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dengan kata lain, teknik *snowballing* dapat digunakan secara terpisah sesuai dengan target riset atau disinergikan dengan teknik purposif.

Agar interaksi dengan informan berlangsung produktif, peneliti harus merasa *tidak tahu apa-apa* tentang kehidupan masyarakat yang diteliti. Karena itu, seorang informan harus ditempatkan sebagai “guru yang baik bagi seorang peneliti (etnografer)” (Spradley, 1997:35). Seorang peneliti juga harus menjaga asas sopan-santun, komunikatif, dan bersikap baik dalam berinteraksi dengan warga masyarakat yang diteliti. Peneliti harus membangun rapor yang baik dengan informan dan menjaga kredibilitas

dirinya secara ketat dengan tidak berbuat tercela menurut ukuran nilai-nilai budaya masyarakat yang diteliti selama dan sesudah penelitian dilakukan.

Para informan juga berhak untuk dilindungi hak-hak privasinya, seperti dengan menyamarkan nama-nama mereka ketika hasil penelitian dipublikasikan secara luas. Penyamaran nama-nama informan menjadi sangat penting jika topik penelitian yang dilakukan sangat sensitif, seperti kasus konflik sosial atau konflik pengelolaan sumber daya alam. Kadang-kadang nama lokasi yang diteliti juga disamarkan, seperti dilakukan oleh antropolog Clifford Geertz yang menyamarkan nama Kota Pare, Kediri menjadi Mojokuto. Penyamaran nama dilakukan untuk melindungi nama baik dan rasa aman para informan, sehingga jika publikasi hasil riset tersebut menimbulkan permasalahan sosial atau ketidakpuasan pada sebagian masyarakat, para informan akan terjaga keselamatannya.

7.3 Perihal Data

Sebagaimana dijelaskan di atas, data adalah informasi terseleksi yang diperoleh melalui teknik triangulasi sumber. Secara umum, data dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan para informan dan hasil pengamatan peneliti, sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip, foto, catatan harian, literatur, pamflet, dan produk publikasi lainnya. Karena fungsinya untuk saling melengkapi dan saling menunjang, kedua kategori data selalu ditampilkan dalam suatu laporan akhir kegiatan penelitian.

Data primer dan data sekunder diperoleh peneliti melalui proses dan metode yang berbeda. Data primer merupakan data

yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek terkait dengan objek penelitian, yang berupa ujaran bermakna (kata-kata/kalimat) / pendapat/persepsi informan dan tindakan-tindakan sosial yang dilakukan informan. Data primer diperoleh dengan menerapkan teknik wawancara dengan informan dan pengamatan terhadap perilaku subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan kegiatan penelusuran dokumen, arsip, foto, literatur, dan lain-lain ke instansi-instansi yang menyimpannya, membuka dan membacanya, dan kemudian mencatat bagian-bagian yang dianggap penting untuk disandingkan dengan data primer.

Kegiatan wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara umum atau wawancara biasa (*interview*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara biasa memiliki tujuan untuk menggali beragam informasi yang bersifat umum, baik tentang kondisi masyarakat, maupun tentang objek penelitian. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan untuk mendalami beberapa informasi yang dipandang penting oleh peneliti dan informasi ini diperoleh ketika peneliti melakukan wawancara biasa. Proses dan praktek pendalaman informasi ini disebut *probing* (Afrizal, 2014:147). Ketika wawancara berlangsung, peneliti mencatat beragam informasi dan data pada catatan lapangan (*field note*), merekamnya, dan melakukan pemfotoan atau memvideokan kegiatan wawancara tersebut. Wawancara mendalam memerlukan waktu yang cukup sehingga peneliti harus menanyakan kapan kesediaan waktu informan untuk diwawancarai. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengungkapkan segala hal yang “tersimpan dalam pikiran informan” terkait dengan objek penelitian. Instrumen untuk menunjang kegiatan wawancara adalah berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi seperangkat pertanyaan penelitian yang bersifat

terbuka untuk disampaikan dan dijawab oleh informan.

Dilihat dari segi jumlah partisipan yang terlibat, kegiatan wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka atau bersemuka antarindividu (*vis to vis*), yakni antara peneliti dengan seorang informan dan dengan cara menggelar diskusi kelompok terfokus (*Focused Group Discussion*), yaitu antara peneliti dengan beberapa informan terpilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Jumlah peserta FGD adalah ganjil, sekitar 3, 5, atau 7 orang. Jumlah peserta FGD yang terlalu banyak dapat mengganggu efektivitas diskusi. FGD memiliki fungsi untuk menggali informasi umum atau untuk mendalami beberapa informasi khusus yang dianggap penting. Teknik FGD dapat merangsang produksi pendapat atau ide-ide baru, terjadinya cek, cek-ulang, dan cek-silang ide dan pendapat secara langsung, serta munculnya data yang representatif. Dari segi waktu, tenaga, dan biaya, FGD merupakan teknik wawancara yang efisien untuk memperoleh informasi berkualitas sebanyak mungkin dalam waktu yang pendek (Afrizal, 2014:147-152; Irwanto, 2006).

Selain wawancara, eksplorasi data dilakukan dengan pengamatan biasa (*observation*) dan pengamatan terlibat (*participant observation*). Pengamatan biasa adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang aktivitas manusia yang terkait dengan objek penelitian. Pengamatan terlibat adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melalui keterlibatannya secara langsung dalam aktivitas objek penelitian. Tujuan akhir dari kegiatan pengamatan adalah “memaknai perilaku sosial” masyarakat yang diteliti. Selama kegiatan pengamatan berlangsung, peneliti menyimak, mengidentifikasi, mencatat, merekam, dan memotret segala hal yang menjadi objek pengamatannya. Misalnya, dalam pengamatan terhadap aktivitas

sosial ekonomi di pasar tradisional, peneliti akan melihat orang-orang tua-muda, laki-perempuan berlalu-lalang di dalam pasar, para pedagang dikelompokkan berdasarkan jenis dagangannya, petugas pasar menarik restribusi dari pedagang, ada transaksi jual-beli di tiga pedagang buah-buahan, jam 14.00 pasar desa sudah sepi dari pembeli dan beberapa pedagang sudah menutup dagangannya, dan sebagainya. Semua peristiwa tersebut dicatat dalam *field note* dan dipotretnya untuk memahami secara umum aktivitas di pasar tradisional.

Jenis pengamatan terlibat dapat disederhanakan menjadi dua, yaitu pengamatan dengan “keterlibatan penuh” (*full participant observation*) dan pengamatan dengan “keterlibatan sebagian” (*partial participant observation*) (Lihat juga Moleong, 2005:176-177). Apabila kita melakukan penelitian yang bertopik interaksi komunikatif dalam transaksi jual-beli barang di pasar tradisional desa, pengamatan dengan “keterlibatan penuh” dilakukan jika peneliti menjalani praktek sebagai penjual barang dagangan yang sesungguhnya, seperti halnya pedagang-pedagang yang lain. Peneliti menjadi bagian dari komunitas pedagang. Teknik pengamatan dengan “keterlibatan sebagian” dilakukan oleh peneliti ketika ia menemani penjual ikut memasarkan barang dagangan milik penjual selama 2 jam dalam sehari dan terus berpindah ke pedagang-pedagang yang lain. Melalui pengamatan terlibat secara penuh/sebagian, peneliti akan memperoleh pengetahuan tentang dunia perdagangan pasar tradisional, makna-makna perilaku ekonomi, dan pengalaman hidup informan sebagai pedagang.

Dalam praktek penelitian kualitatif, instrumen penelitian (*research instrument*) adalah “diri peneliti sendiri”. Karena itu, ketika melakukan kegiatan wawancara dengan informan dan pengamatan terlibat, seorang peneliti harus hadir secara aktual

dalam kedua kegiatan pengumpulan data tersebut. Keterlibatan langsung peneliti dalam praktek pengumpulan data karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berciri khas untuk mengungkapkan “dimensi manusiawi” dari subjek penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif membutuhkan interaksi langsung antara peneliti dan informan sebagai subjek penelitian.

Data primer penelitian etnografi komunikasi yang berparadigma fenomenologis berdimensi ganda (bidimensi), yakni dimensi objektif dan subjektif. *Pertama*, data yang berdimensi *objektif* terdiri atas: (a) wacana interaksi komunikatif/interaksi sosial-kebahasaan yang berupa transkrip teks percakapan *life* antarindividu atau individu dengan kelompok, disertai dengan unsur-unsur suprasegmental dan kinesik yang muncul dalam percakapan timbal-balik; (b) makna yang melekat pada rangkaian tindak tutur dalam lingkup objektif teks percakapan itu; dan (c) konteks, yang terdiri atas konteks situasional dan konteks kultural (budaya) yang menyertai peristiwa tindak komunikatif. Konteks situasional berkaitan dengan hal-hal yang menyertai terjadinya peristiwa tindak komunikatif, seperti pelibat tutur, tempat dan waktu, karakteristik pranata, kode pesan, dan norma interaksi; sedangkan konteks budaya berkaitan dengan situasi kebudayaan setempat yang menaungi berlangsungnya peristiwa tindak komunikatif atau yang menjadi referensi perilaku para pelibat tutur. *Kedua*, data yang berdimensi *subjektif*, berupa motif-motif (*niat*) subjektif (pribadi) yang mendasari pengambilan keputusan untuk memproduksi suatu tindak komunikatif. Motif bersifat implisit, tidak tergambar dalam tuturan aktual; motif agak mirip dengan daya *illokusi* dalam suatu tindak tutur. Apakah seseorang yang berbicara dengan Anda dan mengajukan pertanyaan, “Apakah Anda mempunyai uang?”, benar-benar

motifnya untuk “meminjam uang”? Jawabnya “belum tentu”. Motif memuat kepentingan yang menguntungkan penutur, menjerumuskan orang lain, memuji atau mencemooh pihak lain, menguji kesetiaan petutur, mementahkan keinginan lawan tutur, memahami situasional untuk merancang tindakan kriminal, dan sebagainya. Pencarian data objektif dan subjektif dinyatakan berakhir jika keseluruhan data yang sudah terkumpul dianggap cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan oleh peneliti.

Dalam berbagai literatur metode penelitian kualitatif dan berdasarkan dimensi ruang dan waktu, kegiatan pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara simultan dan sinergi sejak penerjunan awal di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data sampai dengan berakhirnya masa pengumpulan data lapangan dan kembali ke rumah melanjutkan kegiatan hingga menyelesaikan penulisan kesimpulan penelitian. Meskipun berada di rumah, kegiatan pengumpulan data masih dapat dilakukan melalui sarana komunikasi jarak jauh, khususnya untuk menambah data-data yang kurang dan mengklarifikasi beberapa data yang masih diragukan validitasnya. Secara bersamaan dilakukan pula kegiatan pendeskripsian data dan penyelesaian laporan akhir penelitian (Miles dan Hubermann, 2009).

Kegiatan analisis data adalah kegiatan yang berkesinambungan dan berisi sejumlah sub-sub kegiatan, dimulai sejak pengumpulan data di lapangan dan dinyatakan selesai ketika sudah dicapai perumusan kesimpulan akhir dari suatu kegiatan penelitian. Sebagai kelanjutan dari kegiatan pengumpulan data, komponen-komponen kegiatan lanjutan, yaitu analisis penelitian secara prosedural adalah sebagai berikut.

- (a) Pereduksian data yaitu penyaringan, penyeleksian, penyempurnaan, pemadatan, dan abstraksi data untuk memperoleh data-data yang relevan dengan kebutuhan pembahasan objek dan topik penelitian. Hasil reduksi data akan menjadi materi analisis pada tahap berikutnya.
- (b) Pengkategorian data yaitu pengklasifikasian data berdasarkan unsur-unsur kesamaan yang terkandung di dalamnya sehingga hasil akhirnya berupa kategori-kategori data atau tipologi data.
- (c) Mencari dan menemukan relasi fungsional antartipologi atau antarkategori data melalui teknik deskripsi kualitatif untuk memperoleh gambaran yang utuh (realitas sosial) dari suatu objek/topik penelitian disertai dengan proses pemaknaan dan pengungkapan secara komprehensif terhadap hal-hal yang tersembunyi dibalik realitas sosial itu.
- (d) Merumuskan kesimpulan akhir penelitian, yang wujudnya berupa sekumpulan “pernyataan teoritis” dan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian awal proposal penelitian. Perumusan kesimpulan yang bersifat teoritis merupakan “penanda diperolehnya hasil penelitian” dan menjadi “batas akhir” dari suatu kegiatan penelitian.

Tahapan “penyajian hasil penelitian” sebenarnya secara “substansial” sudah terkandung dalam kegiatan (c) dan (d), serta berada di luar kegiatan analisis data. Dalam penelitian kualitatif, “penyajian hasil penelitian” yang ditujukan untuk kepentingan publik dipahami secara “teknis” sebagai aktivitas yang terkait dengan pembuatan laporan final penelitian setelah berakhirnya kegiatan penelitian yang ditandai dengan dirumuskannya “kesimpulan” penelitian. Bisa saja terjadi dalam penulisan laporan akhir tersebut, peneliti masih melakukan penyempurnaan

substansi analisis di sana-sini secara seperlunya, yang tidak mengganggu substansi secara umum.

Setelah laporan akhir penelitian dibuat, seorang peneliti akan memikirkan publikasi laporan tersebut dalam bentuk buku referensi atau artikel ilmiah di jurnal terakreditasi nasional/internasional. Apabila yang dipilih penerbitan buku referensi, peneliti harus mengubah struktur teknis laporan penelitian untuk disesuaikan dengan format umum suatu buku referensi. Jika yang akan dipublikasikan berupa artikel ilmiah, peneliti hanya mengambil sebagian dari materi laporan penelitian tersebut. Data-data dalam laporan tersebut dan koleksi data yang tidak terpakai dalam laporan, bisa dijadikan beberapa artikel ilmiah jika dalam analisisnya menggunakan beberapa teori yang berbeda-beda pula.

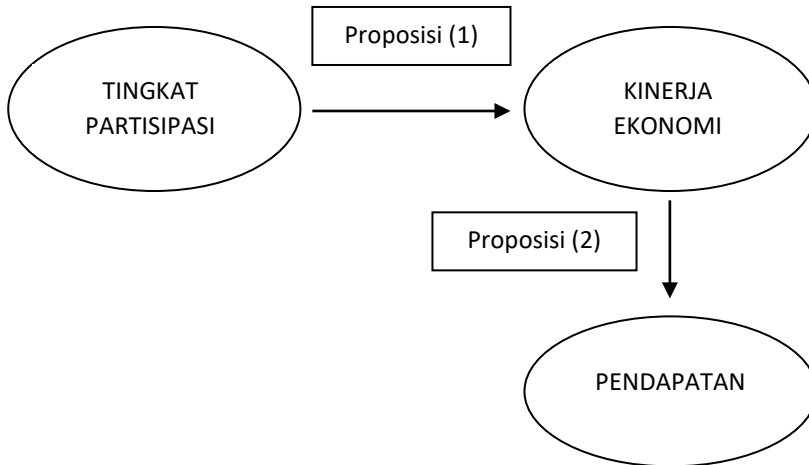
7.4 Konsep dan Teori

Tiang ilmu pengetahuan terdiri atas konsep, teori, dan metode. Ketiga unsur tersebut bersinergi dalam membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pengkajian ilmiah yang terus-menerus. Pertukaran kritik yang konstruktif antarilmuwan dan saling merespons secara positif untuk menyempurnakan temuan-temuan ilmiah mereka di bidang konsep, teori, dan metode merupakan atmosfer akademik yang menjadikan ilmu pengetahuan tumbuh dengan pesat di negara-negara Barat. Eksistensi dan kualitas ilmu pengetahuan sebagai representasi dari kemajuan peradaban terus memutakhirkan dirinya agar mampu menjawab kebutuhan zaman dan berbagai persoalan kehidupan yang menyertai perubahan masyarakat. Hal-hal seperti ini bisa kita lihat dalam sejarah perdebatan teori-teori sosiologi dari masa klasik hingga kontemporer. Kondisi demikian sama sekali tidak terjadi dalam perjalanan sejarah pengembangan ilmu

pengetahuan di Indonesia.

Dari ketiga tiang ilmu pengetahuan, sub-bab ini akan membahas tentang nilai penting konsep dan teori dalam penelitian kualitatif, khususnya di bidang etnografi komunikasi. Konsep didefinisikan sebagai simbol yang digunakan untuk memaknai fenomena tertentu. Tiga elemen yang membentuk konsep adalah: simbol, muatan makna (konsepsi), dan objek (berupa peristiwa: fenomenon, fakta, dan referensi empirik). Dari sudut konstruksi teori, konsep merupakan komponen utama untuk membentuk teori (Ihalauw, 2008:24-27).

Proposisi adalah sebuah pernyataan tentang sifat fenomenon. Konstruksi teori membahas tentang *arti* dari pernyataan tentang sifat fenomenon daripada tentang *kebenaran* dari pernyataan tentang sifat fenomenon itu. Proposisi dibentuk dengan cara menautkan dua konsep. Pertautan itu dilandaskan pada spesifikasi dengan dasar teoritis yang kuat (Ihalauw, 2008:78-79; 111-115). Teori adalah sebuah sistem proposisi-proposisi atau sebuah rangkaian terpadu dari proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi adalah komponen pembentuk teori. Proposisi 1: semakin tinggi tingkat partisipasi, maka semakin tinggi kinerja ekonomi. Proposisi 2: semakin tinggi kinerja ekonomi, maka semakin tinggi pendapatan. Lihat diagram di bawah ini.



Pada proposisi (1) terdapat dua konsep, yaitu “tingkat partisipasi” dan “kinerja ekonomi” dan proposisi (2) memiliki dua konsep, yaitu “kinerja ekonomi” dan “pendapatan”. Konsep-konsep dalam setiap proposisi bertautan dalam relasi kausalitas (sebab-akibat). Hal sama juga terjadi dalam pembentukan “teori” yang mempertautkan antarproposisi secara kausalitas dan terpadu. Dengan demikian, jika kita akan membuat suatu “teori” berdasarkan relasi kedua proposisi tersebut, pernyataan teoritis yang terbentuk adalah “Semakin tinggi tingkat partisipasi, maka semakin tinggi pula kinerja ekonominya sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan”.

Struktur teori dapat tersusun secara sederhana atau kompleks bergantung pada jumlah proposisi yang membentuknya. Komponen-komponen substantif dari teori bersumber dari realitas sosial yang menjadi objek pengkajian. Sebagai contoh, teori involusi pertanian (*agricultural involution*) antropolog Clifford Geertz bersumber dari tiga pemikiran konseptual dari: (1) teori *dual society* Boeke, (2) kompleksitas konsep involusi antropolog Goldenweiser tentang seni primitif, dan (3) pandangan

tentang harmoni sosial dalam kebudayaan Jawa (Kleden, 1995:3; Geertz, 1983). Ketiga hal tersebut terangkai secara terpadu dan dalam relasi kausalitas membentuk teori involusi pertanian. Teori berbeda dengan paradigma atau paradigma bukanlah sinonimi dari teori. Pradigma adalah suatu istilah umum yang merujuk pada seperangkat asumsi dasar mengenai hakikat dan batasan bidang studi, metode, dan kriteria bahan buktinya. Asumsi dasar itu juga menentukan bentuk/karakteristik teori (Leech, 1993:3-4).

Konsep dan teori merupakan dua hal penting yang dibutuhkan dalam kegiatan pengkajian ilmiah, seperti penelitian dan penulisan artikel ilmiah. Keduanya akan menjadi “panduan atau pemandu” peneliti dalam memahami realitas sosial yang menjadi objek pengkajian. Akan tetapi, dalam kegiatan yang berparadigma “grounded research” konsep dan teori diperlakukan secara longgar, tidak mengikat peneliti secara ketat dalam memahami objek kajian. Pikiran peneliti “dilepasliarkan” dan dikonsentrasikan sepenuhnya untuk memahami realitas sosial dengan menghimpun informasi dan data lapangan seoptimal mungkin, sehingga data-data menjadi basis utama menemukan “teori (substantif)”. Teori substantif adalah “teori” yang dihasilkan dalam suatu kegiatan penelitian dengan topik, pada masyarakat, dan pada masa tertentu (Moleong, 2005:277). Hasil penelitian atau kajian ilmiah apa pun seharusnya dapat menghasilkan “teori substantif” yang wujudnya berupa proposisi-proposisi yang bersifat “teoritis”.

Pada dasarnya, konsep-konsep dan teori berfungsi untuk membantu dalam mengatur dan menyusun pemikiran kita serta memperdalam, mempertajam, dan memperluas pemahaman peneliti dalam kaitannya dengan objek kajiannya. Fungsi lain teori adalah untuk meramalkan adanya kejadian-kejadian sosial akan datang. Dalam teori-teori sosial sering ditemukan struktur

konseptualnya yang bersifat rumit dan abstrak. Namun demikian, prinsip teori yang baik adalah *pasimoni*, yaitu ‘sangat bermanfaat’. *Pasimoni* berarti bahwa semakin sederhana suatu teori akan semakin baik dan semakin baik suatu teori, maka akan semakin minimal kerumitannya. Teori yang baik adalah teori yang tidak kelebihan dan kekurangan elemen-elemen pembentuknya. Apabila kita memiliki dua teori yang sama-sama meyakinkan, maka teori yang lebih sederhana merupakan teori yang lebih baik (Neuman, 2013:65-66).

Dalam penelitian etnografi komunikasi, konsep, teori, dan informasi/pengetahuan yang dibutuhkan untuk membantu pemikiran dan pemahaman peneliti tentang objek kajiannya adalah cukup beragam. *Pertama* adalah konsep-konsep, teori, metode, dan laporan kajian etnografi; *kedua*, konsep-konsep dan teori yang terkait dengan penggunaan bahasa (*language use*) dalam interaksi sosial-budaya kemasyarakatan, seperti etnolinguistik, antropologi linguistik, atau sosiolinguistik; *ketiga*, konsep-konsep dan teori dalam ilmu komunikasi; *keempat* adalah konsep-konsep dan teori yang terkait dengan hakikat dan eksistensi bahasa, seperti dalam ilmu bahasa struktural (linguistik) dan filsafat bahasa; *kelima*, konsep-konsep dan teori sosial humaniora, seperti dalam ilmu antropologi dan sosiologi; dan *keenam*, informasi/pengetahuan tentang kebudayaan masyarakat yang sedang diteliti, seperti etnik/komunitas Jawa, Madura, atau Bali.

Selain keenam hal di atas, konsep-konsep dan teori lain yang dibutuhkan dan harus dipahami oleh peneliti adalah yang berkaitan dengan aspek objek kajian, misalnya apakah kajiannya tentang pelayanan publik, manajemen usaha, pewarisan nilai-nilai budaya etnik, resolusi konflik sosial, atau perumusan kebijakan publik pemberdayaan masyarakat. Apabila objek yang dikaji

tersebut bertemakan “kebijakan publik pemberdayaan masyarakat”, seorang peneliti diwajibkan mendalami konsep-konsep dan teori tentang kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan penguasaan ketujuh jenis konsep-konsep, teori, dan informasi/pengetahuan tersebut akan membangun pengetahuan dan pemahaman peneliti secara komprehensif, luas, dan holistik, sehingga memudahkannya melakukan kajian ilmiah terhadap objek etnografi komunikasi.

Pengetahuan yang luas dan mendalam tentang konsep dan teori yang harus diperoleh peneliti sampai seberapa takarannya? Jawabannya sangat relatif yaitu sampai perolehan pengetahuan itu mencakupi objek kajian dan sudah memadai untuk menjawab fokus persoalan yang dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Biasanya pada tahap pembuatan proposal penelitian, seseorang sering harus berkali-kali melakukan revisi hanya karena merasa kurang puas terhadap konsep-konsep dan teori yang digunakan. Jika kondisinya demikian terus terjadi, besar kemungkinan pembuatan proposal itu tidak pernah selesai hingga pada akhirnya kegiatan penelitian tidak jadi dilakukan.

Sebaliknya, jika kita tidak sedang menghadapi rencana kegiatan penelitian, upaya-upaya sistemik dan berkelanjutan untuk menguasai konsep-konsep, teori-teori, dan metode, khususnya dari bidang keilmuan yang didalami harus terus berlangsung. Penguasaan yang mumpuni terhadap ketiga matra ilmu pengetahuan itu merupakan penanda paling jelas dan tegas atas keahlian akademik yang dimiliki seseorang. Seorang akademisi di suatu perguruan tinggi disebut sebagai pakar ilmu komunikasi karena ia menguasai dengan baik semua aspek yang terkait dengan metode, konsep-konsep, dan teori-teori dalam ilmu komunikasi. Penguasaan ilmu tersebut dilanjutkan dengan hadirnya penandaan

yang berupa publikasi nasional/internasional artikel ilmiah atau buku-buku referensi, penemuan konsep-konsep, kritik teori, metode, serta karya-karya lain (seperti produk, desain, teknologi, dan arsitektur) yang bermanfaat langsung bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Kita mesti harus belajar dan bangga sebagai bangsa dengan dinobatkannya Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia Prof. Rhenald Kasali sebagai salah satu dari 30 guru manajemen “kelas dunia” oleh Lembaga Riset *The Global Gurus*. Ini merupakan kisah inspiratif dan peristiwa pertama dalam sejarah akademisi Indonesia sejak kemerdekaan. Penobatan dilakukan berdasarkan kriteria opini publik, orisinalitas ide, dampak yang dirasakan masyarakat atas ide itu, kegunaan ide, jumlah penerbitan karya ilmiah di jurnal internasional, dan kemampuan mempresentasikan ide. Selain sebagai pendidik, Rhenald Kasali dikenal sebagai penggagas Rumah Perubahan, suatu lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemandirian dan kecakapan warga dalam berwirausaha. Ia juga rajin menerbitkan buku-buku panduan ekonomi dan perkembangan karakter bagi khalayak umum. Ia berpesan, “Penghargaan ini berarti Indonesia dipandang penting oleh dunia. Jadi, para akademisi harus lebih giat berkarya!” (*Kompas*, Jumat 18 Maret 2016:11).

Setiap perguruan tinggi, khususnya bagi perguruan tinggi di daerah (kabupaten) tentunya harus berpikir, kapan dan bisakah para akademisinya mampu mencapai jenjang prestasi nasional atau internasional? Dalam dunia perguruan tinggi, jabatan akademik dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi bukanlah formalitas belaka tetapi merupakan tanggung jawab substansial untuk mewujudkan cita-cita perguruan tinggi sebagai “mercu suar” produsen dan pengembang ilmu pengetahuan

dan pembangunan bangsa. Prestasi-prestasi akademis akan senantiasa lahir jika kepemimpinan perguruan tinggi memiliki dan menerapkan sistem meritokrasi secara konsisten, bukan mengembangkan kebijakan yang tidak adil, primordialisme, dan politik praktis yang hanya menguntungkan sekelompok kecil orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwoso, Riga. 1984. "Interaksi Jual-Beli dan Tindakan Komunikasi di Tempat Belanja", dalam Majalah Ilmiah *Prisma*, No. 9, hal. 78-88.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baryadi, I. Praptomo. 2012. *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2010a. *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2010b. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John. W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 2014. *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Fiske, John. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- _____. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gumperz, John J. dan Jenny Cook-Gumperz. 1982. "Introduction: Language and The Communication of Social Identity", dalam John J. Gumperz (ed.). *Language and Social Identity*. London: Cambridge University Press, hal. 1-21.
- Habermas, Jurgen. 2012a. *Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- _____. 2012b. *Kritik atas Rasio Fungsionalis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Harapan, Edi dan Syarwani Ahmad. 2014. *Komunikasi Antarpribadi: Perilaku Insani dalam Organisasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haryatmoko. 2016. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendrarso, Emy Susanti. 2007. "Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar", dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (Ed.). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, hal. 165-175.
- Ibrahim, Abd. Syukur. 1994. *Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ihalauw, John J.O.I. 2008. *Konstruksi Teori: Komponen dan Proses*. Jakarta: Grasindo.

- Irwanto. 2006. *Focused Group Discussion*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jacky, M. 2015. *Sosiologi: Konsep, Teori, dan Metode*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Johnson, Doyle Paul. 1988. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern* (Jilid 1). Jakarta: Gramedia.
- Kaplan, David dan Albert A. Manners. 1999. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keraf, Gorys. 1977. *Komposisi*. Ende: Nusa Indah.
- Kincaid, D. Lawrence dan Welbur Schramm. 1987. *Asas-asas Komunikasi Antarmanusia*. Jakarta: LP3ES.
- Kleden, Ignas. "Beberapa Proposisi tentang Teori Involusi dan Studi Clifford Geertz tentang Indonesia", *Makalah Diskusi Panel "Indonesia sebagai Lahan Kajian Antropologi Clifford Geertz"*, Jakarta: Program Studi Antropologi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 13 November 1995.
- Kleden-Probonegoro, Ninuk. 2012. "Etnografi: Membuat Data Ber-ceritera", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 14 (1): 1-30.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kridalaksana, Harimurti. 1983. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2005. *Mongin-Ferdinand de Saussure (1857-1913): Peletak Dasar Strukturalisme dan Linguistik Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusnadi, 1995. "Pasar Tradisional dan Masyarakat Kota", *Harian Angkatan Bersenjata*, 17 April, hal. 4.
- _____. "Orang Osing dan Orang Madura: Studi tentang Konflik dan Integrasi Antarkelompok Etnik di Desa Biting,

Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Jember: Lembaga Penelitian, Universitas Jember.

_____. 2013. "Pengantar Etnografi Komunikasi". Jember: Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember (Buku ajar untuk kalangan internal).

Kuswarno, Engkus. 2008. *Etnografi Komunikasi: Suatu Pengantar dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Jakarta: UI Press.

Martinet, Andre. 1987. *Ilmu Bahasa: Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.

Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzali, Amri. 1997. "Kata Pengantar" dalam buku James P. Spradley. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. xv-xxiii.

Maulana, Amalia E. 2009. *Consumer Insights via Ethnography: Mengungkap yang Tidak Pernah Terungkap*. Jakarta: Esensi.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nababan, P.W.J. 1986. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.

Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks.

Poloma, Margaret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Purwoko, J. Herudjati. 2014. *Muatan Budaya, Sosial, dan Politik dalam Bahasa dan Komunikasi*. Yogyakarta. Jakarta: Graha Ilmu.

- Robins, R.H. 1995. *Sejarah Singkat Linguistik*. Bandung: Penerbit ITB.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2005. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Prenada Media.
- Saville-Troike, Muriel. 1989. *The Ethnography of Communication: An Introduction*. New York: Basil Blackwell.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suhardi, Basuki. 2005. "Tokoh-tokoh Linguistik Abad ke-20", dalam Kushartanti, Untung Yuwono, dan Multamia RMT Lauder (Peny.). *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia, hal. 200-219.
- _____. 2009. *Pedoman Penelitian Sosiolinguistik*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Sudaryanto. 1983. *Linguistik: Esei tentang Bahasa dan Pengantar ke dalam Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 1986. *Metode Linguistik: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 1989. *Pemanfaatan Potensi Bahasa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suparlan, Parsudi. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia.
- _____. "Antropologi dalam Pembangunan", *Materi Kuliah Perdana Mahasiswa S2 Antropologi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia*, 12 September 1995.
- Sumarsono dan Paina Partana. 2004. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PENGANTAR ETNOGRAFI KOMUNIKASI

Suwito. 1983. *Sosiolinguistik: Teori dan Problema*. Surakarta: Henary Offset

Wexley, Kenneth N. dan Gary A. Yuki. 2003. *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zeitlin, Irving M. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



Drs. Kusnadi, M.A., seorang antropolog lulusan Universitas Indonesia dan dosen tetap di Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember (FIB UNEJ). Pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember, 1998-2002. Sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Lembaga Penelitian, Universitas Jember. Mata kuliah yang diampu

selama ini di FIB UNEJ adalah Etnografi Komunikasi, Sosiolinguistik, Antropologi Budaya, Sosiologi, Teori-teori Kebudayaan, dan Metode Penelitian Kualitatif.

Etnografi Komunikasi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari peranan bahasa dalam perilaku komunikatif dari suatu masyarakat atau komunitas yang berbeda-beda kebudayaannya. Etnografi komunikasi bukanlah bagian dari ilmu komunikasi. Etnografi komunikasi tergolong kajian linguistik interdisipliner yang mulai diperkenalkan oleh Dell Hymes, seorang antropolog dan ahli bahasa AS pada tahun 1962 dengan nama *ethnography of speaking* dan pada tahun 1964 berubah namanya menjadi *ethnography of communications*. Etnografi komunikasi memandang bahasa hanya memiliki fungsi strategis jika bahasa itu diletakkan dalam praktek komunikasi sosial.

Bidang telaah etnografi komunikasi meliputi interaksi komunikatif pelayanan sosial di lembaga-lembaga publik dan beragam pranata budaya, pewarisan nilai-nilai agama atau etika sosial pada keluarga etnik, dan transaksi di dunia bisnis. Dalam kajian tersebut, etnografi komunikasi menawarkan pendekatan emik-komprehensif untuk memahami proses-proses interaksi sosial, pemolaannya, pemaknaan teks percakapannya, dan konstruksi tema budaya yang menjadi dasar berlangsungnya interaksi komunikatif. Publikasi buku ini memiliki relevansi yang tinggi untuk menjawab problematik interaksi komunikatif pada masyarakat kita yang sedang bertransisi menuju masyarakat modern.



Penerbit:

LaksBang PRESSindo Yogyakarta
member of Laksbang Group
<http://laksbangpressindo.com>
Email: laksbangyk@yahoo.com

SASTRA INDONESIA (18+)
ISBN 978-602-5452-48-2



9 786025 452482
Harga di P. Jawa Rp 55.000,-